BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional sedangkan pos aset, kewajiban dan ekuitas dana ada dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran tahun 2020 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Lampung dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp7.244.171.719.572,14 dan direalisasikan sebesar Rp7.019.319.471.883,36 atau sebesar 96,90 %.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Asli Daerah	2.962.401.653.051,14	2.842.286.479.070,36	95,95%	3.018.067.291.159,88
Pendapatan Transfer	4.267.854.721.786,00	2.508.320.307.957,00	58,77%	2.671.698.670.893,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.915.344.735,00	1.668.712.684.856,00	11991,89%	1.577.227.476.775,00
Total	7.244.171.719.572,14	7.019.319.471.883,36	96,90%	7.266.993.438.827,88

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.453.824.716.968,00	2.386.345.268.304,00	97,25	2.627.888.230.394,00
Hasil Retribusi Daerah	11.431.298.440,00	17.080.208.104,00	149,42	11.069.477.866,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.056.449.342,14	29.873.630.623,14	99,39	27.837.905.348,92
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	467.089.188.301,00	408.987.372.039,22	87,56	351.271.677.550,96
Jumlah	**2.962.401.653.051,14**	**2.842.286.479.070,36**	**95,95**	**3.018.067.291.159,88**

1) **Pendapatan Pajak Daerah**

Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2020 terdiri atas:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	720,000,000,000.00	786,228,389,430.00	109.20	799,767,612,251.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	624,000,000,000.00	440,909,561,650.00	70.66	728,165,240,209.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	530,000,000,000.00	536,625,926,088.00	101.25	599,660,914,181.00
Pajak Air Permukaan	4,000,000,000.00	5,091,629,070.00	127.29	3,828,897,057.00
Pajak Rokok	575,824,716,968.00	617,489,762,066.00	107.24	496,465,566,696.00
Jumlah	**2,453,824,716,968.00**	**2,386,345,268,304.00**	**97.25**	**2,627,888,230,394.00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 mencapai 97,25% dari anggaran yang ditargetkan, namun bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp241.542.962.090,00 atau 9,19%. penurunan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pada TA 2020 Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok terealisasi melebihi target yaitu masing-masing sebesar 109,20%, 101,25%, 127,29% dan 107,24% sedangkan untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya mencapai realisasi sebesar 70,66% dari target yang telah ditetapkan.

a) **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2020 sebesar 109,20% dari target. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp13.539.222.821,00 atau 1,69%. Dari sembilan jenis Pajak Kendaraan3 Bermotor (PKB),terdapat dua jenis pajak yang melebihi targetnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor A-1 Sedan Jeep, *Station Wagon* (pribadi) dan Pajak Kendaraan Bermotor C-1 *Truck*, Pick Up (pribadi) masing-masing sebesar 116,04% dan 126,98%. Kemudian Pada jenis Pajak Kendaraan A-2 Sedan Jeep, *Station Wagon* (umum) dan D-2 Bermotor Kendaraan Khusus (umum) hanya terealisasi masing-masing sebesar 29,99% dan 0,92% hal ini dikarenakan kebijakan insentif PKB kendaraan umum hanya diberikan kepada kendaraan umum yang berbadan hukum yaitu atas nama Perseroan Terbatas (PT), koperasi, BUMN dan BUMD sehingga banyak kendaraan umum/plat kuning yang atas nama perorangan perhitungan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya dikembalikan ke plat hitam/pribadi selain itu realisasi PKB jenis kendaraan khusus (umum) sangat rendah dikarenakan potensinya memang sangat kecil. Kemudian untuk realisasi jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lainnya yaitu jenis Pajak Kendaraan Bermotor B-1 Bus *Micro Bus* (pribadi) 91,89%,B-2 Bus *Micro Bus* (umum) 63,77%,C-2 *Truck*, Pick Up (Umum) 96,33%, D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 31,37% dan E Sepeda Motor *Scooter* 91,81%.

Tabel 5.4 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
A-1 Sedan Jeep, Station Wagon (Pribadi)	352.800.000.000,00	409.406.212.297,00	116,04	403.615.934.017,00
A-2 Sedan Jeep, Station Wagon (Umum)	906.750.000,00	271.951.620,00	29,99	473.263.963,00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.743.750.000,00	1.602.289.506,00	91,89	1.367.823.063,00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1.255.500.000,00	800.678.450,00	63,77	1.041.694.033,00
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	112.455.000.000,00	142.797.298.776,00	126,98	136.095.857.126,00
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	61.449.750.000,00	59.194.079.725,00	96,33	66.032.044.032,00
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	135.000.000,00	42.343.200,00	31,37	11.057.000,00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	1.800.000.000,00	16.501.000,00	0,92	45.393.655,00
E Sepeda Motor, Scooter	187.454.250.000,00	172.097.034.856,00	91,81	191.084.545.362,00
Jumlah	**720.000.000.000,00**	**786.228.389.430,00**	109,20	**799.767.612.251,00**

b) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Realisasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2020 adalah sebesar 70,66 %. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp287.255.678.559,00 atau 39,45 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Dimana pada jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor A-2 Sedan Jeep, *Station Wagon* (Umum) dan D-2 Kendaraan Khusus (Umum) hanya terealisasi masing-masing sebesar 2,32% dan 0,99% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid 19 yang mengakibatkan turunnya tingkat mobilitas masyarakat sehingga tingkat pembelian kendaraan baru untuk didaftarkan sebagai kendaraan umum/plat kuning juga menurun. Selain itu, seperti halnya PKB, kebijakan insentif kendaraan umum juga ikut mempengaruhi rendahnya realisasi BBNKB angkutan umum.

Tabel 5.5 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
A-1 Sedan Jeep, Station Wagon (Pribadi)	290.784.000.000,00	205.681.881.000,00	70,73	318.704.853.000,00
A-2 Sedan Jeep, Station Wagon (Umum)	1.060.800.000,00	24.623.500,00	2,32	56.691.450,00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.310.400.000,00	2.125.865.000,00	162,23	2.287.695.000,00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	624.000.000,00	157.889.500,00	25,30	349.635.400,00
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	91.341.522.581,00	67.984.813.275,00	74,43	100.854.365.650,00
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	28.329.600.000,00	12.400.193.750,00	43,77	27.315.915.638,00
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	80.516.129,00	104.085.375,00	129,27	31.147.500,00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	805.161.290,00	7.989.500,00	0,99	82.652.621,00
E Sepeda Motor	209.664.000.000,00	152.422.220.750,00	72,70	278.482.283.950,00
Jumlah	**624.000.000.000,00**	**440.909.561.650,00**	**70,66**	**728.165.240.209,00**

c) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Realisasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2020 sebesar 101,25 %. Untuk rincian Pertamax plus terekapitulasi pada

Laporan Wajib Pungut pada bulan september 2020 sehingga angka realisasi hanya sebesar 34,36%.

Tabel 5.6 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Bensin/Premium	258.471.630.000,00	257.989.783.829,00	99,81	514.152.640.603,00
Pertamax	69.145.569.000,00	71.661.238.857,80	103,64	8.345.251.935,00
Pertamax Plus	5.532.814.000,00	1.900.958.727,00	34,36	-
Solar	196.849.987.000,00	205.073.944.674,20	104,18	77.163.021.643,00
Jumlah	**530.000.000.000,00**	**536.625.926.088,00**	**101,25**	**599.660.914.181,00**

d) **Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi pajak kabupaten/kota. Pada TA 2020 realisasi Pajak Air Permukaan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 127,29% dan bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.732.013,00 atau 32,98%.

Tabel 5.7 Pendapatan Pajak Air Permukaan TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	5.091.629.070,00	127,29	3.828.897.057,00
Jumlah	**4.000.000.000,00**	**5.091.629.070,00**	**127,29**	**3.828.897.057,00**

e) **Pajak Rokok**

Realisasi pajak rokok tahun 2020 sebesar Rp617.489.762.066,00 atau sebesar 107,24% dari anggaran sebesar Rp575.824.716.968,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp121.024.195.370,00 atau sebesar 24,38%.

Tabel 5.8 Pendapatan Pajak Rokok TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pajak Rokok	575.824.716.968,00	617.489.762.066,00	107,24	496.465.566.696,00
Jumlah	**575.824.716.968,00**	**617.489.762.066,00**	**107,24**	**496.465.566.696,00**

2) **Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya *budgettair* tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut dan telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2020 sebesar Rp17.080.208.104,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	462.493.580,00	6.170.230.166,00	1.334,12	196.208.849,00
Retribusi Jasa Usaha	10.662.079.360,00	10.246.922.538,00	96,11	10.592.811.217,00
Retribusi Perizinan Tertentu	306.725.500,00	663.055.400,00	216,17	280.457.800,00
Jumlah	**11.431.298.440,00**	**17.080.208.104,00**	**149,42**	**11.069.477.866,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar 149,42% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.010.730.238,00 atau 54,30%.

a) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum menampung pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Terminal.

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	342.493.580,00	6.114.309.666,00	1.785,23	196.208.849,00
Retribusi Terminal	120.000.000,00	55.920.500,00	46,60%	-
Jumlah	**462.493.580,00**	**6.170.230.166,00**	**1.334,12**	**196.208.849,00**

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pembayaran atas Pelayanan hanya pada Rumah Sakit Bandar Negara Husada pada Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp6.114.309.666,00 atau 1.785,23%.

(2) Retribusi Terminal adalah pendapatan berasal dari hasil kontribusi MOU kerjasama DAMRI dan Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 realisasi hanya sebesar 46,60%. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

a. Karena adanya pandemi covid 19 sehingga kendaraan yang masuk ke terminal sedikit.

b. Belum pernah dilakukan survey LHR terhadap kendaraan yang masuk terminal.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Pada TA 2020 Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp10.246.922.538,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.512.248.620,00	6.940.304.443,00	92,39	7.781.580.146,00
Retribusi Tempat Pelelangan	580.343.400,00	491.711.900,00	84,73	439.933.400,00
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	55.532.500,00	55.478.000,00	99,90	54.105.500,00
Retribuisi Pengelolaan Limbah Cair	1.270.837.000,00	1.778.280.900,00	139,93	1.270.207.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.243.117.840,00	981.147.295,00	78,93	1.046.985.171,00
Jumlah	**10.662.079.360,00**	**10.246.922.538,00**	**96,11**	**10.592.811.217,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2020 sebesar 96,11% dari target yang bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp345.888.679,00 atau 3,27%.

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Pada TA 2020 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp6.940.304.443,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020

	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**70.707.500,00**	**13.896.000,00**	**19,65%**	**262.235.000,00**
UPTD Museum Negeri Rua Jurai	36.870.000,00	7.435.000,00	20,17%	33.185.000
Museum Transmigrasi	22.250.000,00	2.711.000,00	12,18%	-
UPTD Anjungan Lampung TMII	0,00	-	0,00%	208.450.000
UPTD Taman Budaya	11.587.500,00	3.750.000,00	32,36%	20.600.000
Dinas Kesehatan	**2.658.276.320,00**	**4.482.392.715,00**	**168,62%**	**2.876.752.000,00**
UPTD Laboratorium Kesehatan	1.435.387.320,00	4.153.444.715,00	289,36%	1.653.863.000,00
UPTD Bapelkes	1.222.889.000,00	328.948.000,00	26,90%	1.222.889.000,00
Dinas Bina Marga	**1.068.136.460,00**	**519.673.600,00**	**48,65%**	**976.871.400,00**
Sewa Alat Berat	554.094.460,00	329.475.600,00	59,46%	462.829.400,00
Sewa Laboratorium	514.042.000,00	190.198.000,00	37,00%	514.042.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**280.151.320,00**	**193.870.000,00**	**69,20%**	**284.769.700,00**
BLK Bandar Lampung	19.906.320,00	16.925.000,00	85,02%	21.664.000,00
BPLK Way Abung	2.767.400,00	2.119.000,00	76,57%	2.484.000,00
BPLK Kalianda ,	7.963.000,00	6.216.000,00	78,06%	6.927.000,00
BPLK Metro	3.551.000,00	3.551.000,00	100,00%	3.088.200,00
UPTD Hiperkes (Balai K3)	219.606.300,00	143.985.000,00	65,57%	217.450.000,00
Sewa Rumah Dinas	26.357.300,00	21.074.000,00	79,96%	21.569.000,00
UPTD Musium Ketransmigrasian	0,00	-	0,00%	11.587.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah,	**175.140.250,00**	**60.705.000,00**	**34,66%**	**221.595.000,00**
UPTD Bandiklat & PKM (Koperasi)	175.140.250,00	60.705.000,00	34,66%	221.595.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	**181.506.000,00**	**54.220.000,00**	**29,87%**	**151.000.000,00**
UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga	181.506.000,00	54.220.000,00	29,87%	151.000.000,00
Dinas Pendapatan	**256.383.000,00**	**283.615.900,00**	**110,62%**	**231.383.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Parkir	231.383.000,00	233.121.500,00	100,75%	231.383.000,00
Sewa Lahan dan Bangunan	25.000.000,00	50.494.400,00	201,98%	-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	**119.186.580,00**	**133.997.230,00**	**112,43%**	**119.186.580,00**
Sewa Rumah Dinas (Sekretaris Dinas)	10.734.300,00	16.447.500,00	153,22%	10.734.300,00
UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih (BPSB)	108.452.280,00	108.549.730,00	100,09%	108.452.280,00
Sewa Lahan		9.000.000,00	0,00%	

a. Dinas Pendidikan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 19,65% hal ini disebabkan pada gedung Museum Ruwa Jurai sedang dalam renovasi kemudian tidak adanya kegiatan pada Museum Transmigrasi dan Taman Budaya sehingga kedua tempat tersebut ditutup. Untuk UPTD TMII tidak ada realisasi karena pada tahun 2020 ini diklasifikasikan sebagai pendapatan pada Badan penghubung.

b. Dinas Kesehatan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada uptd Bapelkes sebesar 26,90% hal ini disebabkan adanya pandemi
covid 19 sehingga pelatihan dasar tidak terlaksana.

c. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 37% hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 sehingga terjadi penyusutan anggaran sehingga peralatan yang akan diuji sedikit ditambah lagi dengan kondisi alat uji yang sudah tidak memadai.

d. Dinas Tenaga Kerja Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Museum Transmigrasi tidak dianggarkan dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 di anggarkan pada Dinas Pendidikan.

e. Dinas Koperasi dan UMKM,Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan dan Badan Penghubung realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah masing-masing sebesar 34,66%, 29,87%, 43,92% dan 28,75% hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19.

f. Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan pada tahun 2020 mengalami restruktur organisasi menjadi satu (1) instansi.

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2020 target pendapatan tidak tercapai hal ini dikarenakan sewa gedung/rumah dilakukan pada tahun 2019 dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung 2019 sampai dengan 2024 sehingga target awal tidak mungkin terpenuhi selain itu dikarenakan adanya pengalihan status pengguna barang kepada perangkat daerah sebagai pengguna barang.

h. Badan Pendidikan dan Latihan tidak ada realisasi juga `dikarenakan adanya pandemi covid 19.

(2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Pada TA 2020 realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp981.147.295,00

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	359.399.200,00	359.748.700,00	100,10%	322.042.800,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	737.314.440,00	494.446.595,00	67,06%	625.735.371,00
Dinas Perikanan dan Kelautan (UPTD BBDI)	146.404.200,00	126.952.000,00	86,71%	99.207.000,00
JUMLAH	1.243.117.840,00	981.147.295,00	78,93	1.046.985.171,00

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA 2020 terdiri dari:

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi Izin Trayek	150.930.000,00	125.359.000,00	83,06	145.082.000,00
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	31.605.400,00	29.350.000,00	92,86	27.800.000,00
Retribusi Perizinan Kapal Perikanan	46.949.300,00	84.255.000,00	179,46	45.335.000,00
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	62.240.800,00	424.091.400,00	681,37	62.240.800,00
Retribusi Perizinan usaha Perikanan	15.000.000,00			
Jumlah	**306.725.500,00**	**663.055.400,00**	**216,17**	**280.457.800,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2020 sebesar 216,17% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp382.597.600,00 atau 136,42%.

3) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke Kas Daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada TA 2020 penerimaan pendapatan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp29.732.704.705,14 atau sebesar 99,39%, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.035.725.274,22 atau 7,31%.

Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**29.776.534.998,14**	**29.732.704.705,14**	**99,85**	**27.557.991.004,92**
Bank Lampung	29.729.274.051,14	29.729.274.051,14	100,00	27.510.730.057,92
PT. Lampung Jasa Utama	47.260.947,00	3.430.654,00	7,26	47.260.947,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	**279.914.344,00**	**140.925.918,00**	**50,35**	**279.914.344,00**
Perusahaan PT. Sarana Lampung Ventura	123.359.719,00	65.685.000,00	53,25	123.359.719,00
Deviden Asuransi Bangun Askrida	156.554.625,00	75.240.918,00	48,06	156.554.625,00
Jumlah	**30.056.449.342,14**	**29.873.630.623,14**	**99,39**	**27.837.905.348,92**

4) **Lain-lain PAD yang Sah**

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pos ini mempunyai sifat pembuka bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan, yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Pos Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	116.007.946.556,00	9.707.141.998,00	8,37	8.602.236.679,00
Penerimaan Jasa Giro	24.670.277.500,00	25.060.186.941,36	101,58	28.959.985.291,56
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	2.000.000.000,00	23.500.000,00	1,18	12.200.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	262.435.767,00	533,38	49.202.288,00
Pendapatan Denda Pajak	15.668.731.907,00	18.258.922.697,00	116,53	19.144.586.776,00
Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000,00	10.376.786.228,00	94,33	11.613.934.486,53
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	275.716.856.000,00	339.281.603.795,47	123,05	261.776.518.211,90
Penerimaan Lain-lain	21.976.174.050,00	6.016.794.612,39	27,38	21.113.013.817,97
Jumlah	**467.089.188.301,00**	**408.987.372.039,22**	**87,56**	**351.271.677.550,96**

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 sebesar 87,56% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp57.715.694.488,26 atau 16,43%.

a) **Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pelepasan Hak Atas Tanah	115,225,134,200.00	9,606,778,417.00	8.34	7,381,512,656.00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	64,611,956.00	54,287,333.00	84.02	64,611,956.00
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	420,000,000.00	46,076,248.00	10.97	857,911,667.00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	-	-	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	298,200,400.00	-	-	298,200,400.00
Jumlah	**116,007,946,556.00**	**9,707,141,998.00**	**8.37**	**8,602,236,679.00**

Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2020 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.104.905.319,00 atau 12,84% namun tidak mencapai target hanya sebesar 8,37% hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Proses pelepasan HPL (Hak Pelepasan Lahan) Way Dadi belum bisa tercapai sepenuhnya, dikarenakan belum ada titik temu antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat.
2. Belum ada proses penghapusan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai.
3. Tidak ada proses penjualan rumah dinas di TA.2020 hanya ada cicilan angsuran rumah dinas.
4. Tidak ada proses penghapusan penjualan kendaraan dinas roda empat.

b) **Jasa Giro**

Jasa Giro adalah penerimaan dari lain-lain PAD yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada PT Bank Lampung dan atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh gubernur yang bersumber kas BUD, kas Dana Kegiatan BOS dan lain-lain.

Realisasi penerimaan Jasa Giro TA 2020 sebesar Rp25.060.186.941,36 atau 101,58% dari target, merupakan penerimaan Jasa Giro yang diterima atas rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.380.418.234,13 dan sisanya sebesar Rp680.450.841,53 dari pemegang kas lainnya yaitu bendahara BOS dan lain-lain.

Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Jasa Giro	24.670.277.500,00	25.060.186.941,36	101,58	28.959.985.291,56
Jumlah	**24.670.277.500,00**	**25.060.186.941,36**	**101,58**	**28.959.985.291,56**

c) Pendapatan TP/TGR

Pendapatan TP/TGR merupakan penerimaan atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.

Realisasi Pendapatan TP/TGR tahun 2020 sebesar Rp23.500.000,00 atau 1,18 % apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp11.300.000,00 atau 92,62%

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan TP/TGR per 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	2.000.000.000,00	23.500.000,00	1,18	12.200.000,00
Jumlah	**2.000.000.000,00**	**23.500.000,00**	**1,18**	**12.200.000,00**

d) **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2020 sebesar Rp262.435.767,00 atau 533,38% dari anggaran, apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp213.233.479,00 atau 433,38%.

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	262.435.767,00	533,38	49.202.288,00
Jumlah	**49.202.288,00**	**262.435.767,00**	**533,38**	**49.202.288,00**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari :

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2020

No.	OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	9.886.873,00
2	Dinas Pendidikan	52.774.401,00
3	Dinas Pendidikan	14.237.930,00
4	Dinas Pendidikan	11.657.558,00
5	Dinas Pendidikan	61.553.726,00
6	Dinas Pendidikan	2.289.000,00
7	Dinas Pendidikan	3.355.836,00
8	Dinas Pendidikan	1.316.763,00
9	Dinas Pendidikan	206.261,00
10	Dinas Pendidikan	3.782.735,00
11	Dinas Pendidikan	9.911.000,00
12	Dinas Pendidikan	3.361.067,00
13	Dinas Pendidikan	4.639.575,00
14	Dinas Pendidikan	4.619.867,00
15	Dinas Pendidikan	2.719.158,00
16	Dinas Pendidikan	2.405.741,00
17	Dinas Pendidikan	929.991,00
18	Dinas Pendidikan	4.838.630,00
19	Dinas Pendidikan	4.342.692,00
20	Dinas Pendidikan	299.376,00
21	Dinas Pendidikan	11.675.523,00
22	Dinas Pendidikan	3.997.445,00
23	Dinas Pendidikan	381.514,00
24	Dinas Pendidikan	4.792.455,00
25	Dinas Pendidikan	22.659.650,00
26	Dinas Pendidikan	19.801.000,00
	TOTAL	**262.435.767,00**

e) **Pendapatan Denda Pajak**

Pendapatan denda pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Denda Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Denda Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Berm	14.565.196.907,00	17.606.536.127,00	120,88	18.604.708.825,00
Denda Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.103.535.000,00	645.956.290,00	58,54	539.877.951,00
Denda Pajak Air Permukaan	-	705.317,00	-	-
Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	5.724.963,00	-	-
Jumlah	**15.668.731.907,00**	**18.258.922.697,00**	**116,53**	**19.144.586.776,00**

Realisasi Pendapatan denda Pajak tahun 2020 sebesar Rp18.258.922.697,00 atau 116,53%, apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp885.664.079,00 atau 4,63%.

f) **Pendapatan Dari Pengembalian**

Pendapatan Pengembalian merupakan pendapatan yang berasal dari tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat dan BPK RI sebesar Rp10.376.786.228,00 atau 94,33%.

Tabel 5.23 Realisasi Pendapatan Pengembalian per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan dari pengembalian lain-lain	11.000.000.000,00	10.376.786.228,00	94,33	11.613.934.486,53
Jumlah	**11.000.000.000,00**	**10.376.786.228,00**	**94,33**	**11.613.934.486,53**

g) **Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Pendapatan atas Layanan yang diberikan oleh Provinsi Lampung kepada masyarakat berupa layanan kesehatan dan penguatan modal bagi UKM dengan rincian:

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek	263.216.856.000,00	322.419.051.264,14	122,49	243.175.328.505,76
Unit Kerja Bagian Umum Badan Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta	-	-	-	553.128.901,52
Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	-	-	-	350.306.023,94
UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian	-	-	-	202.961.670,42
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa	12.500.000.000,00	16.862.552.531,33	134,90	17.494.793.110,26
Jumlah	**275.716.856.000,00**	**339.281.603.795,47**	**123,05**	**261.776.518.211,90**

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2020 sebesar 123,05% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 77.505.085.583,57 atau 29,61%.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan kedua UPTD ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Akibatnya, KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian pada akhir bulan September 2019 tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung.Oleh karena itu pada tahun 2020 kedua instansi tersebut tidak lagi dianggarkan untuk BLUD.

Sedangkan untuk Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan status BLUD tersebut telah dicabut melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/853/VI.02/HK/2019 Tanggal 18 desember 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243//IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi pemerintah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

h) **Penerimaan Lain-lain**

Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain yang diterima oleh Provinsi Lampung selama TA 2020 berasal dari pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp5.782.365.000,00 dan Dinas Arsip dan Perpustakaan serta dari Penerimaan Lainnya yang tidak terakomodir pada akun pendapatan sebelumnya sebesar Rp234.429.612,39.

Tabel 5.25 Realisasi Penerimaan Lain-lain per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10,893,008,000.00	5,782,365,000.00	53.08	17,204,849,000.00
Penerimaan Lainnya/pendapatan pengembalian	11,083,166,050.00	234,429,612.39	2.12	3,908,164,817.97
Jumlah	**21,976,174,050.00**	**6,016,794,612.39**	27.38	**21,113,013,817.97**

b. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Provinsi Lampung selama TA 2020 terdiri dari:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.221.420.623.786,00	2.461.886.209.957,00	58,32	2.627.195.349.110,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	100,00	26.756.363.000,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	17.746.958.783,00
Jumlah	**4.267.854.721.786,00**	**2.508.320.307.957,00**	**58,77**	**2.671.698.670.893,00**

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar 58,77% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp163.378.362.936,00 atau 6,12%.

1) Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil pajak, bukan pajak/sumber daya alam, alokasi umum, alokasi khusus dan dana penyesuaian, terdiri:

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	163.007.232.243,00	123.204.760.040,00	75,58	87.416.096.820,00
Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	43.383.161.492,00	34.589.203.086,00	79,73	51.128.238.596,00
Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	1.732.551.921.000,00	99,58	1.906.780.297.000,00
Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	571.540.325.831,00	25,12	581.870.716.694,00
Jumlah	**4.221.420.623.786,00**	**2.461.886.209.957,00**	**58,32**	**2.627.195.349.110,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar 58,32% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp165.309.139.153,00 atau 6,29%. Kontribusi penurunan terbesar berasal dari dana alokasi khusus.

a) **Dana Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak penghasilan PPh Pasal 25, Pasal 29 terdiri dari:

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	43.887.034.341,00	16.851.808.783,00	38,40	29.961.702.921,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	90.569.291.204,00	106.352.951.257,00	117,43	92.534.598.872,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	3.424.797.879,00
Jumlah	**134.456.325.545,00**	**123.204.760.040,00**	**91,63**	**125.921.099.672,00**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar 91,63% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.716.339.632,00 atau 2,16%. Pada rincian bagi hasil cukai hasil tembakau tidak ada realisasi karena adanya reklasifikasi pada Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

b) **Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil Iuran Hak pengusahaan hutan, provisi sumber daya alam, dana rebosiasi dan lain lain terdiri:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	4.051.372,00	-	-
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	920.432.542,00	344.613.250,00	37,44	575.706.000,00
Bagi Hasil Iuran Tetap (Land-rent)	310.853.183,00	228.023.258,00	73,35	485.529.800,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.619.541.686,00	1.421.716.534,00	39,28	1.351.747.325,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	23.844.753.000,00	22.150.757.800,00	92,90	33.392.946.301,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.231.319.051,00	4.194.587.051,00	99,13	9.882.967.541,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	8.484.134.051,00	4.432.714.651,00	52,25	5.439.341.629,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.972.127.979,00	1.812.739.170,00	91,92	-
Jumlah	**43.383.161.492,00**	**34.589.203.086,00**	**79,73**	**51.128.238.596,00**

c) **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2020 sebesar Rp1.732.551.921.000,00 atau terealisasi 99,58% dari total anggaran sebesar Rp1.739.916.377.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp174.228.376.000,00 atau 9,14%.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	1.732.551.921.000,00	99,58	1.906.780.297.000,00
Jumlah	**1.739.916.377.000,00**	**1.732.551.921.000,00**	**99,58**	**1.906.780.297.000,00**

d) **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp10.330.390.863,00 atau 1,78% yaitu terealisasi sebesar Rp571.540.325.831,00 atau terealisasi 25,12% dari total anggaran sebesar Rp2.275.113.853.051,00 hal ini disebabkan adanya reklasifikasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dianggarkan pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik). Reklasifikasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kedalam akun Pendapatan – Lain-lain Pendapatan yang sah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pasal 4, yang menyatakan bahwa:

1. Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.
2. Penganggaran pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Menteri ini.

Tabel 5.31 Anggaran da n Realisasi Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	571.540.325.831,00	25,12	581.870.716.694,00
Jumlah	**2.275.113.853.051,00**	**571.540.325.831,00**	**25,12**	**581.870.716.694,00**

Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non-Fisik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik	263.393.488.870,00
2	Dak Non-Fisik	308.146.836.961,00
	TOTAL	571540.325.831,00

2) **Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Pada TA 2020 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yaitu Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp.46.434.098.000,00 yaitu 100% dari target.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dana Penyesuaian	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	100,00	26.756.363.000,00
Jumlah	**46.434.098.000,00**	**46.434.098.000,00**	**100,00**	**26.756.363.000,00**

3) **Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2020 ini tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur	-	-	-	1.140.718.595,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lampung Selatan	-	-	-	973.757.106,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lampung Tengah	-	-	-	3.320.190.852,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lampung Utara	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lampung Barat	-	-	-	292.859.280,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	697.981.284,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Tanggamus	-	-	-	593.040.042,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lampung Timur	-	-	-	2.074.419.900,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Pesawaran	-	-	-	266.013.846,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Way Kanan	-	-	-	497.860.776,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Pringsewu	-	-	-	1.071.376.866,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat	-	-	-	410.002.992,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Mesuji	-	-	-	358.752.618,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Pesisir Barat	-	-	-	124.465.194,00
Bantuan Keuangan dari Kota Bandar Lampung	-	-	-	4.617.414.648,00
Bantuan Keuangan dari Kota Metro	-	-	-	1.308.104.784,00
Petugas Haji		-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**17.746.958.783,00**

Bantuan Keuangan merupakan subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung dari ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta PP serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan.Pada Tahun 2020 tidak ada realisasi pada Bantuan Keuangan hal ini disebabkan tidak dilaksanakannya ibadah haji karena dampak pandemi
covid 19.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Realisasi dari lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Lainnya yaitu Dana BOS. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Rincian realisasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.35 Lain-lain pendapatan Yang Sah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	37.500.000,00	496.679.695,00	1324,48%	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	13.877.844.735,00	8.450.197.163,00	60,89%	11.362.590.000,00
Pendapatan Lainnya	-	1.659.765.807.998,00	-	1.565.864.886.775,00
Jumlah	**13.915.344.735,00**	**1.668.712.684.856,00**	**11.991,89**	**1.577.227.476.775,00**

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya terdiri dari hibah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu *Integrated Participatory Development & Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan Program Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas padi serta hibah Rehabilitasi Bantuan Bencana.

Tabel 5.36 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Instansi	37.500.000,00	496.679.695,00	1.324,48	-
Jumlah	**37.500.000,00**	**496.679.695,00**	**1.324,48**	**-**

2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi terdiri atas hibah yang diterima dari Jasa Raharja, Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah (SP3D) Dinas Kehutanan dan SP3D Dinas Kelautan.

Tabel 5.37 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Instansi	13.877.844.735,00	8.450.197.163,00	60,89	11.362.590.000,00
Jumlah	**13.877.844.735,00**	**8.450.197.163,00**	**60,89**	**11.362.590.000,00**

Tabel 5.38 Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Dipenda	13.704.179.735,00	4.468.197.163,00		7.487.090.000,00
Jasa Raharja	-	3.789.000.000,00		3.720.000.000,00
SP3D Dinas Kehutanan	148.198.000,00	175.000.000,00		137.500.000,00
SP3D Dinas Kelautan dan Perikanan	25.467.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
Jumlah	**13.877.844.735,00**	**8.450.197.163,00**	**-**	**11.362.590.000,00**

3) **Pendapatan Lainnya**

Realisasi pendapatan lainnya TA 2020 sebesar Rp1.659.765.807.998,00 merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan dan reklasifikasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dianggarkan pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik). Reklasifikasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kedalam akun Pendapatan – Lain-lain Pendapatan yang sah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pasal 4 yang menyatakan bahwa:

a. Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.
b. Penganggaran pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Menteri ini.

Tabel 5.39 Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Lainnya	-	1.659.765.807.998,00	-	1.565.864.886.775,00
Jumlah	**-**	**1.659.765.807.998,00**	**-**	**1.565.864.886.775,00**

Adapun rincian Pendapatan Lainnya berupa pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan dan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	BOS Reguler	1.541.404.340.000,00
2	BOS Afirmasi	74.520.000.000,00
3	BOS Kinerja	43.740.000.000,00
4	Pendapatan Tidak Terklasifikasi	101.467.998,00
	TOTAL	**1.659.765.807.998,00**

2. BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2020 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Provinsi Lampung. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Operasi	5.088.795.434.128,30	4.864.108.842.521,80	95,58	4.569.600.348.332,29
Belanja Modal	844.613.045.859,10	752.528.210.219,89	89,10	1.014.037.524.021,39
Belanja Tak Terduga	160.879.583.508,45	119.312.701.296,00	74,16	-
Transfer	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	95,69	1.475.076.016.670,73
Jumlah	7.381.124.107.714,45	6.967.358.448.182,63	94,39	7.058.713.889.024,41

Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2020 sebesar 94,39% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja dan transfer tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp91.355.440.841,78 atau 1,31%. Belanja yang mengalami kenaikan yaitu belanja operasi dan Belanja Tak Terduga sedangkan belanja modal dan Transfer mengalami penurunan.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Lampung yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri atas:

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	2.005.574.674.424,10	1.971.312.365.234,00	98,29	1.927.672.778.408,00
Belanja Barang dan Jasa	1.588.883.969.104,20	1.423.341.867.179,80	89,58	1.277.194.649.465,29
Belanja Bunga	33.000.000.000,00	31.583.615.813,00	95,71	33.382.304.468,00
Belanja Subsidi	-	-	-	926.015.480,00
Belanja Hibah	1.460.836.790.600,00	1.437.518.594.295,00	98,40	1.329.394.600.511,00
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	352.400.000,00	70,48	1.030.000.000,00
Jumlah	5.088.795.434.128,30	4.864.108.842.521,80	95,58	4.569.600.348.332,29

Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 sebesar 95,58% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja operasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp294.508.494.189,51 atau 6,44%.

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar 98,29% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja pegawai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp43.639.586.826,00 atau 2,26%. Komponen belanja pegawai yang mengalami kenaikan terbesar yaitu Belanja Gaji dan

Tunjangan

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.511.976.686.859,09	1.449.676.872.027,00	95,88	1.414.720.937.317,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	296.618.261.954,66	262.234.297.114,00	88,41	264.689.097.759,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH	20.247.645.386,35	19.167.800.000,00	94,67	20.218.500.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	61.960.500.000,00
Honorarium PNS	37.479.080.524,00	33.903.256.900,00	90,46	30.452.231.500,00
Honorarium Non-PNS	121.728.851.900,00	119.378.621.000,00	98,07	101.940.774.800,00
Uang Lembur	4.649.355.300,00	4.162.214.200,00	89,52	-
Belanja Pegawai BLUD	3.293.783.500,00	2.479.767.600,00	75,29	2.489.621.832,00
Belanja Pegawai BOS	9.581.009.000,00	80.309.536.393,00	838,22	31.201.115.200,00
Jumlah	2.005.574.674.424,10	1.971.312.365.234,00	98,29	1.927.672.778.408,00

a) **Belanja Gaji dan Tunjangan**

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2020 sebesar 95,68% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp108.812.540.004,00 atau 8,12%.

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	% %	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	749.662.906.142,00	715.561.224.450,00	95,45%	733.181.214.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga	76.005.401.437,80	69.986.039.307,00	92,08%	71.860.527.757,00
Belanja Tunjangan Jabatan	16.002.353.295,00	14.483.764.600,00	90,51%	15.101.115.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional	46.984.397.700,00	45.061.499.003,00	95,91%	45.649.927.800,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	14.568.780.413,00	12.771.530.000,00	87,66%	13.523.370.000,00
Belanja Tunjangan Beras	44.328.528.858,00	41.228.416.300,00	93,01%	42.687.317.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.385.153.684,25	715.349.611,00	51,64%	784.562.787,00
Belanja Pembulatan Gaji	67.827.447,18	9.496.957,00	14,00%	10.726.014,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	69.041.729.840,00	59.544.669.094,00	86,24%	35.224.956.146,00
Belanja Uang Paket	231.120.000,00	225.720.000,00	97,66%	229.950.000,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	86.913.000,00	51.156.000,00	58,86%	45.501.000,00
Belanja Tunjangan Komisi	144.855.000,00	141.723.000,00	97,84%	119.994.750,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	86.913.000,00	71.514.000,00	82,28%	-
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	32.103.000,00	12.984.750,00	40,45%	12.245.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	804.141.000,00	31.581.000,00	3,93%	23.749.500,00
Belanja Tunjangan Perumahan	20.642.941.216,00	20.635.764.752,00	99,97%	12.089.700.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian	102.600.000,00	36.000.000,00	35,09%	1.094.850.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00	432.000.000,00	100,00%	360.000.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru	302.323.770.220,00	302.070.624.604,00	99,92%	279.964.148.220,00
Belanja Tambahan Penghasilan Guru	2.502.000.000,00	2.320.500.000,00	92,75%	2.439.000.000,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru	2.419.663.520,00	1.707.567.000,00	70,57%	1.537.236.600,00
Belanja Tunjangan Transportasi	16.830.000.000,00	16.766.600.000,00	99,62%	8.713.760.000,00
Belanja Tunjangan Reses	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	100,00%	2.550.000.000,00
Belanja Tunjangan Panitia	-	-	0,00%	58.942.500,00
Gaji Ketiga Belas	71.776.310.388,53	70.982.326.533,00	98,89%	73.601.537.479,00
Tunjangan Hari Raya	71.689.277.697,33	71.003.821.066,00	99,04%	73.856.605.294,00
Jumlah	1.511.976.686.859,09	1.449.676.872.027,00	95,88%	1.414.720.937.317,00

b) **Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

Belanja Tambahan Penghasilan PNS merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, rincian:

Tabel 5.45 Realisasi BelanjaTambahan Penghasilan PNS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	684.000.000,00	684.000.000,00	100,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	295.934.261.954,66	261.550.297.114,00	88,38	264.689.097.759,00
Jumlah	296.618.261.954,66	262.234.297.114,00	88,41	264.689.097.759,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar 88,41% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.454.800.645,00 atau 0,93%.

c) **Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH merupakan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional KDH/WKDH dengan rincian:

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00	14.940.000.000,00	97,65	15.246.750.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	4.947.645.386,35	4.227.800.000,00	85,45	4.971.750.000,00
Jumlah	20.247.645.386,35	19.167.800.000,00	94,67	20.218.500.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 sebesar 94,67% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.050.700.000,00 atau 5,20%.

d) **Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah**

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah merupakan belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.47 Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	0,00	61.960.500.000,00
Jumlah	-	-	0,00	61.960.500.000,00

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

e) **Honorarium PNS**

Honorarium PNS merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja honorarium diantaranya honorarium panita pelaksana kegiatan lintas SKPD, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pemeriksa barang dan jasa dan lainnya, terdiri:

Tabel 5.48 Realisasi Honorarium PNS Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD	12,367,980,024.00	10,455,468,900.00	84.54	8,044,090,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,266,130,000.00	2,177,450,000.00	96.09	2,352,240,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	551,400,000.00	486,380,000.00	88.21	472,440,000.00
Honorarium Tenaga Operator	6,185,260,000.00	5,997,715,000.00	96.97	3,272,240,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	9,108,420,000.00	8,541,072,500.00	93.77	8,944,519,500.00
Honorarium TPHD	-	-	0.00	66,000,000.00
Honorarium Paramedis	234,800,000.00	209,750,000.00	89.33	308,080,000.00
Uang Piket	2,384,740,000.00	2,170,375,000.00	91.01	2,777,017,000.00
Uang Pembinaan	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00	130,500,000.00
Honorarium PPTK	4,305,350,500.00	3,790,045,500.00	88.03	4,085,105,000.00
Jumlah	37,479,080,524.00	33,903,256,900.00	90.46	30,452,231,500.00

dan Honorarium PPTK yang mengalami penurunan.

f) Honorarium Non-PNS

Honorarium Non-PNS merupakan akun untuk menampung belanja honorarium pegawai, honorer/tidak tetap, honorarium tenaga tukang/operator/asisten dan lainnya terdiri:

Tabel 5.49 Realisasi Honorarium Non-PNS Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	94.174.298.000,00	92.845.187.000,00	98,59	90.987.207.800,00
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	22.824.838.900,00	21.994.174.000,00	96,36	6.326.472.000,00
Honorarium TPHD	72.000.000,00	-	0,00	63.840.000,00
Uang Piket	3.356.725.000,00	3.288.960.000,00	97,98	3.436.305.000,00
Uang Pembinaan	1.300.990.000,00	1.250.300.000,00	96,10	1.126.950.000,00
Jumlah	121.728.851.900,00	119.378.621.000,00	98,07	101.940.774.800,00

Realisasi Belanja Honorarium Non-PNS tahun 2020 sebesar 98,07% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Honorarium

Non-PNS tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp17.437.846.200,00 atau 17,11%. Seluruh komponen belanja honorarium Non-PNS mengalami kenaikan kecuali belanja honorarium honorarium tenaga tukang/operator/asisten dan uang piket yang mengalami kenaikan.

g) **Uang Lembur**

Uang Lembur merupakan akun untuk menampung belanja lembur PNS dan belanja lembur Non-PNS

Tabel 5.50 Realisasi Uang Lembur per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Uang Lembur PNS	4.649.355.300,00	4.162.214.200,00	89,52%	-
Jumlah	**4.649.355.300,00**	**4.162.214.200,00**	**89,52%**	-

Realisasi Belanja uang lembur tahun 2020 sebesar 89,52% dibanding anggarannya.

h) **Belanja Pegawai BLUD**

Belanja Pegawai BLUD merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja pegawai pada unit BLUD terdiri:

Tabel 5.51 Realisasi Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	1,852,000,000.00	1,308,437,000.00	70.65	1,371,774,832.00
Belanja Pegawai BLUD Unit Kerja Bagian Umum Badan Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta	-	-	0.00	52,750,000.00
Belanja Pegawai BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	115,140,000.00	-	0.00	24,600,000.00
Belanja Pegawai BLUD UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian	-	-	0.00	74,140,000.00
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa	1,326,643,500.00	1,171,330,600.00	88.29	966,357,000.00
Jumlah	3,293,783,500.00	2,479,767,600.00	75.29	2,489,621,832.00

anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Pegawai BLUD tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.854.232,00 atau 0,40%.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan kedua UPTD ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Akibatnya, KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian pada akhir bulan September 2019 tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung.Oleh karena itu pada tahun 2020 kedua instansi tersebut tidak lagi dianggarkan untuk BLUD.

Sedangkan untuk Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD) perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan status BLUD tersebut telah dicabut melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/853/VI.02/HK/2019 Tanggal 18 desember 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243//IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi pemerintah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

i) **Belanja Pegawai BOS**

Belanja Pegawai BOS merupakan akun untuk menampung belanja pegawai yang didanai dari BOS.

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Pegawai BOS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Pegawai BOS	9.581.009.000,00	80.309.536.393,00	838,22	31.201.115.200,00
Jumlah	9.581.009.000,00	80.309.536.393,00	838,22	31.201.115.200,00

Realisasi Belanja Pegawai BOS tahun 2020 sebesar 838,22% dibanding anggarannya.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa merupakaan akun untuk menampung belanja bahan pakai habis, bahan /material, jasa kantor dan lainnya. Realisasi belanja barang dan jasa terdiri atas:

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	49.076.493.857,10	47.726.438.800,99	97,25%	40.106.468.335,00
Belanja Bahan/Material	17.061.509.485,00	13.800.961.249,60	80,89%	14.102.547.259,20
Belanja Jasa Kantor	85.643.821.479,00	79.028.211.385,52	92,28%	59.426.204.401,67
Belanja Premi Asuransi	73.044.439.988,00	70.075.030.468,00	95,93%	47.890.718.051,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.328.320.640,00	19.392.357.384,00	95,40%	20.248.034.056,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	52.522.192.105,91	51.048.740.777,43	97,19%	33.319.239.301,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.957.447.500,00	19.932.771.200,00	83,20%	32.048.184.100,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.769.114.900,00	1.520.833.400,00	85,97%	1.740.275.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.167.935.000,00	5.264.737.490,00	85,36%	5.480.128.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	83.629.668.706,36	75.605.049.974,00	90,40%	54.924.442.341,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.515.176.500,00	2.444.614.000,00	97,19%	2.360.325.700,00
Belanja Pakaian Kerja	492.622.500,00	344.917.500,00	70,02%	1.748.924.400,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.868.561.000,00	3.352.534.350,00	86,66%	6.009.750.940,00
Belanja Perjalanan Dinas	135.063.722.637,33	112.101.289.419,00	83,00%	160.954.377.852,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	696.550.000,00	477.450.000,00	68,54%	483.700.000,00
Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.167.076.500,00	4.247.123.735,00	82,20%	9.529.593.307,00
Belanja Pemeliharaan	128.904.295.353,00	127.218.348.736,00	98,69%	60.458.221.721,00
Belanja Jasa Konsultasi	15.171.489.400,00	14.304.123.470,00	94,28%	6.226.415.100,00
Belanja Jasa Keamanan	2.260.445.000,00	2.148.605.000,00	95,05%	1.735.479.800,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	285.995.347.000,00	284.337.665.425,00	99,42%	208.529.231.282,42
Belanja Akomodasi, Transportasi dan Uang Saku Peserta	19.143.970.200,00	16.599.774.546,00	86,71%	14.638.262.820,00
Belanja Hibah Barang Jasa yang diserahkan pada Masyarakat/pihak ketiga	206.785.662.052,50	178.598.588.270,26	86,37%	162.006.190.995,00
Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa yang diserahkan pada Masyarakat/pihak ketiga	3.768.097.500,00	2.921.882.116,00	77,54%	1.683.008.410,00
Belanja Restitusi Pajak	152.545.000,00	53.788.615,00	35,26%	59.469.065,00

Realisasi belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar 89,58% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Barang dan Jasa tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp146.274.788.512,51 atau 11,45%.

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan Habis Pakai merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja diantaranya belanja alat tulis kantor, belanja dokumen/administrasi tender, belanja alat listrik dan elektronik. Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja alat tulis kantor	29.085.844.295,10	28.656.973.383,99	98,53	22.703.204.643,00
Belanja dokumen/ administrasi tender	15.336.700,00	3.655.000,00	23,83	13.654.900,00
Belanja alat listrik dan elektronik	2.123.060.424,00	2.066.605.121,00	97,34	1.457.718.320,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	322.814.150,00	313.267.900,00	97,04	516.775.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.582.625.295,00	2.508.892.740,00	97,15	2.415.224.782,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.626.850.825,00	2.441.025.837,00	92,93	2.403.201.475,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	65.100.000,00	65.050.000,00	99,92	121.292.500,00
Belanja pengisian tabung gas	23.281.800,00	22.490.300,00	96,60	23.782.500,00
Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi	4.065.010.378,00	3.873.226.070,00	95,28	585.289.670,00
Belanja Pantry	223.417.050,00	220.386.150,00	98,64	83.692.150,00
Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	90.375.800,00	90.127.400,00	99,73	259.955.830,00
Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien	60.596.200,00	60.248.000,00	99,43	-
Belanja Pakan	1.307.329.840,00	1.246.837.414,00	95,37	1.102.210.650,00
Belanja Laundry	409.250.000,00	400.405.035,00	97,84	128.004.935,00
Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/ Pameran/Alat Bantu	1.452.165.415,00	1.371.695.650,00	94,46	2.691.437.910,00
Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.428.145.685,00	1.267.727.300,00	88,77	2.388.092.350,00
Belanja alat/Perlengkapan Pertukangan	552.164.800,00	542.775.000,00	98,30	74.010.500,00
Belanja Souvenir/Cindera Mata/Piala/Tropy/Hadiah	2.643.125.000,00	2.575.050.500,00	97,42	3.138.920.220,00
Jumlah	**49.076.493.857,10**	**47.726.438.800,99**	**97,25**	**40.106.468.335,00**

Realisasi Belanja Barang Habis Pakai tahun 2020 sebesar 97,25% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Barang Habis Pakai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.619.970.465,99 atau 19,00%. Belanja Barang dan Jasa yang mengalami penurunan diantaranya belanja alat dokumen/administrasi tender, belanja pengisian tabung pemadam, belanja bahan dan alat sanitasi serta dokumen dan dekorasi namun ada belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan diantaranya belanja listrik dan elektronik, belanja peralatan kesehatan/laboratorium/radiologi dan bahan alat sanitasi serta belanja laundry.

b) **Belanja Bahan/Material**

Belanja Bahan/Material merupakan akun tempat menampung diantaranya belanja bahan baku bangunan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja bibit ternak dan lainnya. Belanja Bahan/Material tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.55 Realisasi Belanja Bahan/ Material per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja bahan baku bangunan	4.297.627.400,00	2.128.070.114,00	49,52	628.894.719,00
Belanja bahan/bibit tanaman	535.198.000,00	533.408.000,00	99,67	2.229.676.300,00
Belanja bibit ternak	16.050.000,00	15.333.000,00	95,53	14.645.000,00
Belanja bahan obat-obatan	1.814.744.867,00	1.786.053.847,60	98,42	3.802.269.510,20
Belanja bahan kimia dan Pupuk	712.884.800,00	662.494.850,00	92,93	187.119.700,00
Belanja Tas Kegiatan	1.527.665.000,00	1.202.090.000,00	78,69	1.605.602.100,00
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	226.651.562,00	226.642.150,00	100,00	234.986.405,00
Belanja Perlengkapan /Peralatan Olahraga	286.309.500,00	269.575.500,00	94,16	268.550.345,00
Belanja Specimen	8.155.590,00	8.155.400,00	100,00	84.100.000,00
Belanja bahan pakan ternak	152.700.000,00	151.800.500,00	99,41	0,00
Belanja Bahan Kompensasi	105.300.000,00	102.730.000,00	97,56	156.007.500,00
Belanja Publikasi	1.407.481.990,00	1.217.440.500,00	86,50	866.501.800,00
Belanja Spanduk	1.629.280.000,00	1.469.652.000,00	90,20	912.625.000,00
Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam)	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
Belanja Bahan Peralatan Kerja	526.997.700,00	483.012.800,00	91,65	203.631.005,00
Belanja Bahan Perlengkapan / Peralatan Kesehatan / Ke	1.198.433.700,00	1.033.784.752,00	86,26	920.405.600,00
Belanja Bahan Suku Cadang Alat Berat/Besar/Bengkel	223.275.000,00	222.850.000,00	99,81	132.471.000,00
Belanja Bahan Laboratorium	1.529.856.001,00	1.528.067.836,00	99,88	1.535.928.775,00
Belanja Bahan Pustaka	-	-	-	3.382.500,00
Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	798.098.375,00	695.308.000,00	87,12	243.750.000,00
Belanja Benih/Induk Ikan	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	72.000.000,00
Belanja Wallpaper Kantor	25.800.000,00	25.492.000,00	98,81	
Jumlah	17.061.509.485,00	13.800.961.249,60	80,89	14.102.547.259,20

anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Bahan/Material tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp301.586.010,20 atau 2,14%. Belanja Bahan/Material yang mengalami penurunan diantaranya belanja bahan bibit dan tanaman dan belanja bahan obat-obatan namun ada belanja barang dan jasa mengalami kenaikan diantaranya belanja bahan bangunan, belanja bahan kimia dan pupuk serta belanja spanduk.

c) **Belanja Jasa Kantor**

Belanja Jasa Kantor merupakan akun untuk menampung belanja diantaranya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dan lainnya.

Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2020 sebesar 92,28% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jasa Kantor tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.602.006.983,85 atau 32,99%. Belanja Jasa Kantor yang mengalami penurunan diantaranya belanja transaksi keuangan, belanja publikasi, belanja kawat/faksimile/internet, belanja jasa *service* peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga namun ada Belanja Jasa Kantor yang mengalami kenaikan diantaranya belanja listrik dan belanja pemeliharaan peralatan. Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.56 Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Telepon	2.242.784.182,00	1.717.335.395,00	76,57%	2.100.550.994,00
Belanja Air	913.124.400,00	606.407.155,00	66,41%	538.050.107,00
Belanja Listrik	18.641.421.379,00	15.483.343.172,00	83,06%	16.021.466.803,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	3.370.328.550,00	3.281.063.000,00	97,35%	2.636.080.500,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.363.255.507,00	14.410.103.026,35	93,80%	9.825.544.333,00
Belanja Paket/Pengiriman	914.150.000,00	813.969.740,00	89,04%	46.100.000,00
Belanja Sertifikasi	336.095.000,00	181.659.480,00	54,05%	122.825.560,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	606.120.970,00	513.784.940,00	84,77%	235.458.037,00
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00%	5.939.248,85
Belanja Publikasi	24.415.421.000,00	24.006.266.736,00	98,32%	14.912.781.239,00
Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.002.564.610,00	1.873.644.656,00	93,56%	2.507.167.150,00
Belanja Pemeliharaan	2.547.961.500,00	2.426.359.156,00	95,23%	

d) **Belanja Premi Asuransi**

Belanja Premi Asuransi merupakan akun untuk menampung belanja premi asuransi kesehatan dan belanja premi asuransi barang. Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.57 Realisasi Belanja Premi Asuransi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	71.572.377.518,00	68.933.269.331,00	96,31	47.456.268.000,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	406.312.470,00	402.283.750,00	99,01	335.838.259,00
Belanja Premi Asuransi Jiwa	579.750.000,00	511.962.787,00	88,31	98.611.792,00
Belanja Asuransi Pertanian	486.000.000,00	227.514.600,00	46,81	
Jumlah	73.044.439.988,00	70.075.030.468,00	95,93	47.792.106.259,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi tahun 2020 sebesar 95,93% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Premi Asuransi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp22.282.924.209,00 atau 46,62%.

e) **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor merupakan akun untuk menampung terkait kendaraan bermotor diantaranya belanja jasa *service*, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas pelumas. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jasa Service	4,312,953,975.00	4,255,780,634.00	98.67	3,354,114,027.00
Belanja Penggantian Suku Cadang	3,593,136,525.00	3,543,107,951.00	98.61	4,695,690,999.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,336,571,710.00	8,107,206,859.00	97.25	9,887,432,986.00
Belanja Jasa KIR	34,886,000.00	20,460,903.00	58.65	29,775,560.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	854,608,400.00	424,971,187.00	49.73	811,656,144.00
Belanja Pembelian Ban	2,514,332,780.00	2,386,658,950.00	94.92	1,172,287,600.00
Belanja Pembelian ACCU	681,831,250.00	654,170,900.00	95.94	297,076,740.00
Jumlah	20,328,320,640.00	19,392,357,384.00	95.40	20,248,034,056.00

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2020 sebesar

95,40% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja perawatan kendaraan bermotor tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp855.676.672,00 atau 4,23%. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor yang mengalami penurunan belanja penggantian suku cadang, dan belanja BBM/gas dan pelumas namun ada belanja mengalami kenaikan yaitu belanja jasa service, belanja pembelian ban dan pembelian accu.

f) **Belanja Cetak dan Penggandaan**

Belanja Cetak dan Penggandaan merupakan akun untuk menampung belanja cetak, penggandaan dan penjilidan. Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.59 Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja cetak	35,444,379,342.00	34,403,651,054.00	97.06	20,521,126,939.00
Belanja Penggandaan	14,216,547,474.91	13,863,729,615.43	97.52	10,618,823,612.00
Belanja Penjilidan	2,861,265,289.00	2,781,360,108.00	97.21	2,179,288,750.00
Jumlah	52,522,192,105.91	51,048,740,777.43	97.19	33,319,239,301.00

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2020 sebesar 97,19% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp17.729.501.476,43 atau 53,21%.

g) **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**

Belanja Sewa Gedung merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa ruang rapat, belanja sewa gudang. Belanja Sewa Gedung tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja sew a gedung/ kantor/tempat	13,078,100,000.00	10,602,200,200.00	81.07	26,376,782,700.00
Belanja sew a ruang rapat/pertemuan	10,332,007,500.00	8,825,571,000.00	85.42	5,533,251,400.00
Belanja Sew a Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	80,750,000.00
Belanja Sew a Gudang	455,340,000.00	446,500,000.00	98.06	-
Belanja Sew a Taman	86,000,000.00	52,500,000.00	61.05	57,400,000.00
Jumlah	23,957,447,500.00	19,932,771,200.00	83.20	32,048,184,100.00

Realisasi Belanja Sewa Gedung tahun 2020 sebesar 83,20% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Sewa Gedung tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.115.412.900,00 atau 37,80%.

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas merupakan akun untuk menampung belanja sewa sarana mobilitas darat dan belanja sewa sarana mobilitas air. Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja sew a Sarana Mobilitas Darat	1,764,114,900.00	1,515,833,400.00	85.93	1,705,275,000.00
Belanja sew a Sarana Mobilitas Air	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	35,000,000.00
Jumlah	1,769,114,900.00	1,520,833,400.00	85.97	1,740,275,000.00

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 sebesar 85,97% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp219.441.600,00 atau 12,61%.

i) **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan**

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja sewa meja/kursi, belanja sewa proyektor, belanja sewa generator. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.62 Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja sewa meja kursi	804,080,000.00	715,854,490.00	89.03	574,281,000.00
Belanja sewa proyektor	400,000.00	400,000.00	100.00	11,200,000.00
Belanja sewa generator	72,500,000.00	70,000,000.00	96.55	72,500,000.00
Belanja sewa tenda	3,237,125,000.00	2,912,213,800.00	89.96	2,694,512,000.00
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	123,280,000.00
Belanja Sewa Sound System dan elektronik	1,201,175,000.00	1,121,234,200.00	93.34	1,084,980,000.00
Belanja sewa Partisi	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	49,900,000.00
Belanja Sewa Peralatan Elektronik	518,420,000.00	255,550,000.00	49.29	618,450,000.00
Belanja Sewa Tanaman	138,885,000.00	138,135,000.00	99.46	159,525,000.00
Belanja Sewa peralatan Praktek	4,250,000.00	4,250,000.00	100.00	34,500,000.00
Belanja Sewa Baleho	140,000,000.00	-	0.00	-
Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	46,000,000.00	42,000,000.00	91.30	57,000,000.00
Jumlah	6,167,935,000.00	5,264,737,490.00	85.36	5,480,128,000.00

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan tahun 2020 sebesar 85,93% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp215.390.510,00 atau 3,93%. Belanja Sewa Perlengkapan sebagian besar mengalami penurunan yang mengalami kenaikan diantaranya belanja sewa meja kursi, sewa tenda serta sewa *sound system* dan elektronik.

j) **Belanja Makan Minum**

Belanja Makan Minum merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja makan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minuman rapat, belanja makan dan minuman tamu. Belanja Makan Minum tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.63 Realisasi Belanja Makan Minum per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.676.690.350,00	11.132.500.185,00	75,85	12.956.184.146,00
Belanja makanan dan minuman rapat	19.752.018.696,36	18.181.689.389,00	92,05	12.165.433.050,00
Belanja makanan dan minuman tamu	15.207.166.550,00	15.048.069.100,00	98,95	11.857.648.050,00
Belanja makanan dan minuman pasien	646.896.000,00	641.820.500,00	99,22	797.145.900,00
Belanja makanan dan minuman Panti sosial	4.841.340.000,00	3.677.315.600,00	75,96	5.127.373.595,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.505.557.110,00	26.923.655.200,00	94,45	12.020.657.600,00
Jumlah	83.629.668.706,36	75.605.049.974,00	90,40	54.924.442.341,00

Realisasi Belanja Makan Minum tahun 2020 sebesar 90,40% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Makan Minum tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.783.949.981,00 atau 28,53%. Belanja Makan Minum yang mengalami penurunan diantaranya belanja makan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minum pasien dan belanja makan dan minum panti sosial, namun ada belanja mengalami kenaikan diantaranya belanja makan dan minum rapat, belanja makan minum tamu dan belanja makan minum peserta.

k) **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya merupakan akun penampungan diantaranya untuk belanja pakaian dinas KDH dan WKDH, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	621,302,500.00	620,545,000.00	99.88	699,500,000.00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	446,150,000.00	432,550,000.00	96.95	421,300,000.00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	0.00	425,425,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	379,950,000.00	368,050,000.00	96.87	296,450,000.00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	37,700,000.00	36,500,000.00	96.82	74,150,000.00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	566,574,000.00	565,724,000.00	99.85	181,700,700.00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	463,500,000.00	421,245,000.00	90.88	261,800,000.00
Jumlah	2,515,176,500.00	2,444,614,000.00	97.19	2,360,325,700.00

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 sebesar 97,19% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp84.288.300,00 atau 3,57%. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya yang mengalami penurunan diantaranya belanja pakaian dinas KDH dan WKDH serta Pakaian Dinas Upacara namun ada belanja mengalami kenaikan diantaranya belanja atribut kelengkapan pakaian dinas dan belanja pakaian sipil.

l) **Belanja Pakaian Kerja**

Belanja Pakaian Kerja meruapakan akun untuk menampung belanja pakaian kerja lapangan dan belanja atribut kelengkapan kantor. Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja pakaian kerja lapangan	455,122,500.00	307,417,500.00	67.55	1,721,924,400.00
Belanja Atribut Kelengkapan Kantor	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	27,000,000.00
Jumlah	492,622,500.00	344,917,500.00	70.02	1,748,924,400.00

Realisasi Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 sebesar 70,02% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Pakaian Kerja tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.404.006.900,00 atau 80,28%. Belanja Pakaian Kerja lapangan mengalami penurunan namun belanja atribut kelengkapan kantor mengalami kenaikan.

m) **Belanja Pakaian Kerja Hari-hari Tertentu**

Belanja Pakaian Kerja Khusus merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja pakaian adat daerah, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian olah raga. Belanja Pakaian Kerja Khusus tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.66 Realisasi Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja pakaian adat daerah	850,000,000.00	804,100,000.00	94.60	933,300,000.00
Belanja pakaian batik tradisional	805,200,000.00	748,600,000.00	92.97	1,217,590,000.00
Belanja pakaian olahraga	854,166,000.00	650,136,000.00	76.11	1,138,790,000.00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	286,080,000.00	167,725,000.00	58.63	276,675,000.00
Belanja pakaian Pasien/ kelayan Panti sosial	256,215,000.00	255,090,000.00	99.56	161,692,740.00
Belanja Pakaian Peserta	816,900,000.00	726,883,350.00	88.98	2,281,703,200.00
Jumlah	3,868,561,000.00	3,352,534,350.00	86.66	6,009,750,940.00

Realisasi Belanja Pakaian Kerja Khusus tahun 2020 sebesar 86,66% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Pakaian Kerja Khusus tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.657.216.590,00 atau 44,22%. Belanja Pakaian Kerja Khusus yang mengalami kenaikan hanya belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial.

n) **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas merupakan akun untuk menampung belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.67 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.180.493.175,33	55.647.138.644,00	84,08	53.536.392.098,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.883.229.462,00	56.454.150.775,00	81,96	103.482.143.602,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri	-	-	-	3.935.842.152,00
Jumlah	135.063.722.637,33	112.101.289.419,00	83,00	160.954.377.852,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar 83,00% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan denga n Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp48.853.088.433,00 atau 30,35%.

o) **Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS merupakan akun untuk menampung belanja beasiswa tugas belajar dan belanja bantuan biaya pendidikan izin belajar PNS. Belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja beasiswa tugas belajar S2	168.350.000,00	114.400.000,00	67,95	62.800.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S3	523.200.000,00	363.050.000,00	69,39	418.900.000,00
Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS	5.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00
Jumlah	696.550.000,00	477.450.000,00	68,54	483.700.000,00

Realisasi Belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2020 sebesar 68,54% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.250.000,00 atau 1,29%. Bila dibandingkan Belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2019 Belanja beasiswa tugas belajar S2 mengalami kenaikan sedangkan Belanja beasiswa tugas belajar S3 mengalami penurunan.

p) **Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS merupakan akun untuk menampung belanja kursus singkat/sosiaisasi dan belanja bimbingan teknis. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.69 Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1,679,774,000.00	1,305,221,910.00	77.70	2,793,415,232.00
Belanja sosialisasi	311,548,500.00	259,222,000.00	83.20	149,074,800.00
Belanja bimbingan teknis	3,175,754,000.00	2,682,679,825.00	84.47	6,587,103,275.00
Jumlah	5,167,076,500.00	4,247,123,735.00	82.20	9,529,593,307.00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 sebesar 82,20% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.282.469.572,00 atau 55,43%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 hanya belanja sosialisasi yang mengalami kenaikan.

q) **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja pemeliharaan jalan, belanja pemeliharaan gedung, belanja pemeliharaan perlengkapan kantor. Belanja Pemeliharaan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.70 Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Pemeliharaan Jalan	82.105.189.727,00	81.962.774.031,00	99,83	19.998.944.569,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.724.030.000,00	1.712.813.270,00	99,35	-
Belanja Pemeliharaan Gedung	33.128.379.734,00	31.788.854.590,00	95,96	26.467.863.905,00
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	1.770.803.732,00	1.744.839.400,00	98,53	2.804.413.650,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik	1.368.023.400,00	1.305.075.727,00	95,40	1.695.965.720,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.472.989.640,00	5.444.843.063,00	99,49	1.670.807.770,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	6.000.000,00	5.010.000,00	83,50	566.183.850,00
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	844.994.980,00	843.088.000,00	99,77	5.934.771.057,00
Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	123.200.000,00	123.159.000,00	99,97	84.499.550,00
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	1.322.025.000,00	1.320.876.500,00	99,91	612.235.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Berat	243.750.000,00	216.184.600,00	88,69	348.838.000,00
Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	54.750.000,00	54.750.000,00	100,00	65.048.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	-	-	0,00	3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kedokteran	200.000.000,00	197.756.955,00	98,88	98.481.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	182.825.000,00	145.479.000,00	79,57	88.168.000,00
Belanja Pemeliharaan Drainase	352.584.140,00	348.094.600,00	98,73	15.000.000,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020 sebesar 98,69% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp66.760.127.015,00 atau 110,42%. Belanja Pemeliharaan yang mengalami kenaikan diantaranya belanja pemeliharaan jalan, belanja pemeliharaan peralatan kantor, belanja pemeliharaan komputer dan jaringan, dan belanja pemeliharaan drainase namun ada belanja mengalami penurunan diantaranya belanja pemeliharaan jaringan air minum serta belanja pemeliharaan rumah jabatan/rumah dinas.

r) **Belanja Jasa Konsultansi**

Belanja Jasa Konsultansi merupakan akun tempat menampung belanja jasa konsultasi appraisal, belanja jasa konsultansi pengawas non fisik, belanja jasa konsultasi appraisal. Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.71 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3,019,610,400.00	3,015,441,400.00	99.86	602,092,100.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Non Fisik	11,084,022,000.00	10,384,140,690.00	93.69	4,293,309,800.00
Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	428,470,000.00	307,216,900.00	71.70	47,135,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Non Fisik	470,387,000.00	428,844,480.00	91.17	979,830,200.00
Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi	169,000,000.00	168,480,000.00	99.69	304,048,000.00
Jumlah	15,171,489,400.00	14,304,123,470.00	94.28	6,226,415,100.00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi tahun 2020 sebesar 94,28% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jasa Konsultansi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.077.708.370,00 atau 129,73%. Belanja Jasa Konsultansi yang mengalami penurunan hanya belanja jasa konsultasi pengawasan non fisik dan belanja jasa konsultasi aplikasi.

s) **Belanja Jasa Keamanan**

Belanja Jasa Keamanan merupakan akun untuk menampung belanja jasa kemanan untuk kepolisian dan belanja jasa keamanan untuk penjaga malam. Belanja Jasa Keamanan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.72 Realisasi Belanja Jasa Keamanan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jasa Keamanan Kepolisian	438,470,000.00	378,250,000.00	86.27%	468,449,800.00
Belanja Jasa Keamanan Penjaga Malam	1,313,050,000.00	1,264,630,000.00	96.31%	1,067,275,000.00
Belanja Jasa Keamanan POL PP	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	-
Belanja Jasa Keamanan Satpam	506,425,000.00	503,225,000.00	99.37%	199,755,000.00
Jumlah	2,260,445,000.00	2,148,605,000.00	95.05%	1,735,479,800.00

Realisasi Belanja Jasa Keamanan tahun 2020 sebesar 95,05% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jasa Keamanan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp413.125.200,00 atau 23,80%.

t) **Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan akun untuk menampung belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD perkuatan modal. Belanja Jasa BLUD Tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.73 Realisasi Belanja dan Jasa BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggarn 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	276.408.825.000,00	273.457.558.091,00	98,93%	195.988.891.502,42
Belanja Barang dan Jasa BLUD Unit Kerja Bagian Umum Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta	-	-	0,00%	407.734.607,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	120.000.000,00	-	0,00%	233.574.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD PMU Bidang Pertanian	-	-	0,00%	103.962.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa	9.466.522.000,00	10.880.107.334,00	114,93%	11.795.069.173,00
Jumlah	285.995.347.000,00	284.337.665.425,00	99,42%	208.529.231.282,42

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2020 sebesar 99,42% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Jasa BLUD tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp75.808.434.142,58 atau 36,35%. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan kedua UPTD ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Akibatnya, KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian pada akhir bulan September 2019 tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung.Oleh karena itu pada tahun 2020 kedua instansi tersebut tidak lagi dianggarkan untuk BLUD.

Sedangkan untuk Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan status BLUD tersebut telah dicabut melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/853/VI.02/HK/2019 Tanggal 18 desember 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243//IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi pemerintah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

u) **Belanja Akomodasi Transportasi dan uang saku peserta**

Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta merupakan akun untuk menampung belanja transportasi peserta non PNS, belanja uang saku peserta non PNS dan belanja akomodasi tamu. Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Transportasi Peserta Non PNS	3.389.024.200,00	1.968.716.000	117,69	3.988.413.162
Belanja Uang Saku Peserta Non PNS	13.043.080.000,00	12.551.210.000	45,08	5.880.085.000
Belanja Akomodasi Tamu	2.711.866.000,00	2.079.848.546	175,88	4.769.764.658
Jumlah	19.143.970.200,00	16.599.774.546,00	86,71	14.638.262.820,00

Realisasi Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta tahun 2020 sebesar 86,71% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.961.511.726,00 atau 13,40%. Belanja Akomodasi Transportasi dan uang saku peserta yang mengalami kenaikan hanya belanja uang saku peserta non PNS.

v) **Belanja Hibah Barang Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**

Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Belanja Hibah Barang Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.75 Realisasi Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	205.069.662.052,50	176.993.212.270,26	86,31	146.582.383.345,00
Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.716.000.000,00	1.605.376.000,00	93,55	15.423.807.650,00
Jumlah	206.785.662.052,50	178.598.588.270,26	86,37	162.006.190.995,00

Realisasi Belanja Hibah Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020 sebesar 86,37% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Hibah Barang Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.592.397.275,26 atau 10,24%. Belanja Hibah Barang Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga mengalami kenaikan.

w) **Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga**

Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, berupa pemberian paket bantuan ke organisasi sosial oleh Biro Kesejahteraan Sosial. Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak

Ketiga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.76 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.771.697.500,00	1.765.615.900,00	99,66	389.169.000,00
Belanja Bantuan Sosial Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.996.400.000,00	1.156.266.216,00	57,92	1.293.839.410,00
Jumlah	3.768.097.500,00	2.921.882.116,00	77,54	1.683.008.410,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2020 sebesar 77,54% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.238.873.706,00 atau 63,61%.

x) **Belanja Restitusi Pajak**

Belanja Restitusi Pajak merupakan akun untuk menampung belanja restitusi PKB dan belanja restitusi BBNKB. Belanja Restitusi Pajak tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.77 Realisasi Belanja Restitusi Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Restitusi PKB	142.545.000,00	52.798.615,00	37,04	59.469.065,00
Belanja Restitusi BBNKB	10.000.000,00	990.000,00	9,90	-
Jumlah	152.545.000,00	53.788.615,00	35,26	59.469.065,00

Realisasi Belanja Restitusi Pajak tahun 2020 sebesar 35,26% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Restitusi Pajak tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.680.450,00 atau 9,55%.

y) **Belanja Jasa Pihak Ketiga**

Belanja Jasa Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung belanja jasa pihak ketiga. Belanja Jasa Pihak Ketiga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.78 Realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Jasa Pihak Ketiga	70.640.943.298,00	44.935.905.653,00	63,61	112.304.962.077,00
Jumlah	70.640.943.298,00	44.935.905.653,00	63,61	112.304.962.077,00

Realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga tahun 2020 sebesar 63,61% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jasa Pihak Ketiga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.369.056.424,00 atau 59,99%.

z) **Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur**

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur merupakan akun untuk menampung belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.79 Realisasi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	37.806.239.073,00	33.369.332.416,00	88,26	23.457.874.072,00
Jumlah	37.806.239.073,00	33.369.332.416,00	88,26	23.457.874.072,00

Realisasi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur tahun 2020 sebesar 88,26% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.911.458.344,00 atau 42,25%.

aa) **Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja Uang yang dibagikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Belanja Uang yang dibagikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	6.564.600.000,00	6.564.600.000,00	100%	-
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.168.483.000,00	960.969.500,00	82,24	919.372.000,00
Jumlah	7.733.083.000,00	7.525.569.500,00	97,32	919.372.000,00

Realisasi Belanja Uang yang dibagikan kepada Pihak ketiga tahun 2020 sebesar 97,32% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.606.197.500,00 atau 718,56%.

bb) **Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.919.651.400,00	16.717.643.550,00	88,36%	7.945.332.500,00
Belanja Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.593.750,00	11.000.000,00	30,90%	119.500.000,00
Jumlah	18.955.245.150,00	16.728.643.550,00	88,25%	8.064.832.500,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2020 sebesar 88,25%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.663.811.050,00 atau 107,43%.

cc) **Belanja Barang Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Belanja Barang Jasa BOS merupakan akun untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS. Belanja Barang Jasa BOS tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.82 Realisasi Belanja Barang Jasa BOS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	230.561.954.279,00	188.236.578.749,00	81,64%	186.738.416.579,00
Jumlah	230.561.954.279,00	188.236.578.749,00	81,64%	186.738.416.579,00

Realisasi Belanja Barang Jasa Bos tahun 2020 sebesar 81,64% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Barang Jasa BOS tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.498.162.170,00 atau 0,80%.

3) **Belanja Bunga**

Belanja Bunga merupakan akun untuk menampung belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI. Rincian Belanja Bunga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.83 Realisasi Belanja Bunga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	33.000.000.000,00	31.583.615.813,00	95,71	33.382.304.468,00
Jumlah	**33.000.000.000,00**	**31.583.615.813,00**	**95,71**	**33.382.304.468,00**

Realisasi Belanja Bunga tahun 2020 sebesar 95,71% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Bunga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.798.688.655,00 atau 5,39%.

4) **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi merupakan akun untuk menampung belanja subsidi kepada PT Lampung Jasa Utama/Trans Lampung Utama. Rincian Belanja Subsidi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.84 Realisasi Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Subsidi kepada Lampung Jasa Utama/ Trans Lampung Utama	-	-	0,00	926.015.480,00
Jumlah	**-**	**-**	**0,00**	**926.015.480,00**

Belanja Subsidi tahun 2020 tidak dianggarkan.

5) **Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan akun untuk menampung belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar. Belanja Hibah tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.85 Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.735.000.000,00	12.282.638.250,00	89,43	15.313.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	50.626.946.200,00	45.880.796.445,00	90,63	46.043.507.791,00
Belanja Hibah Bos Kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.391.661.270.000,00	1.374.593.490.000,00	98,77	1.268.038.092.720,00
Belanja Hibah kepada Partai Politik	4.813.574.400,00	4.761.669.600,00		-
Jumlah	**1.460.836.790.600,00**	**1.437.518.594.295,00**	**98,40**	**1.329.394.600.511,00**

Realisasi Belanja Hibah tahun 2020 sebesar 98,40% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Hibah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp108.123.993.784,00 atau 8,13%.

a) **Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.86 Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.735.000.000,00	12.282.638.250,00	89,43	15.313.000.000,00
Jumlah	**13.735.000.000,00**	**12.282.638.250,00**	**89,43**	**15.313.000.000,00**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar 89,43% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.030.361.750,00 atau 19,79%.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan hibah yang diberikan kepada Korem 043 Gatam, Polda Lampung, Brigif III Marinir Piabung, Angkatan laut (Lanal) Lampung Komando Resor Militer (Denpom)

Lampung dan Kepolisian Resort Kabupaten Pesawaran.

b) **Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.87 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	50.626.946.200,00	45.880.796.445,00	90,63	46.043.507.791,00
Jumlah	**50.626.946.200,00**	**45.880.796.445,00**	**90,63**	**46.043.507.791,00**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi tahun 2020 sebesar 90,63% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp162.711.346,00 atau 0,35%. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi merupakan hibah untuk kegiatan keagamaan, olahraga dan pendidikan.

c) Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar

Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar merupakan akun untuk menampung belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung. Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.88 Realisasi Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Satuan Pendidikan Dasar Kota Bandar Lampung	176.718.603.981,74	157.085.180.000,00	88,89	148.314.040.000,00
Satuan Pendidikan Dasar kota Metro	39.970.352.837,88	36.706.050.000,00	91,83	35.075.760.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan	162.055.584.819,63	161.285.560.000,00	99,52	144.572.320.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Tengah	209.314.934.734,17	209.695.150.000,00	100,18	191.995.560.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara	106.194.608.085,75	99.949.960.000,00	94,12	96.520.770.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat	44.286.229.364,43	45.679.590.000,00	103,15	40.669.880.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tulang Bawang	71.712.940.752,29	75.212.890.000,00	104,88	64.003.520.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus	89.682.533.553,49	93.608.510.000,00	104,38	87.672.808.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur	162.606.313.369,00	157.320.570.000,00	96,75	149.483.400.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesawaran	66.744.348.202,61	65.512.430.000,00	98,15	62.397.600.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Way Kanan	75.159.799.816,01	82.702.620.000,00	110,04	70.222.520.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pringsewu	79.992.020.050,38	73.396.760.000,00	91,76	70.956.960.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tulang Bawang Barat	46.065.919.887,11	47.746.700.000,00	103,65	44.478.600.000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Mesuji	34.178.257.630,00	39.481.240.000,00	115,52	35.088.794.720,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Barat	26.009.519.302,83	26.424.280.000,00	101,59	25.865.560.000,00
Satuan Pendidikan Dasar SLB Swasta (SDLB/SMPLB)	969.303.612,68	2.786.000.000,00	287,42	720.000.000,00
Jumlah	1.391.661.270.000,00	1.374.593.490.000,00	98,77	1.268.038.092.720,00

Realisasi Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Tahun

2019 sebesar 98,77% dibanding anggarannya. Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp106.555.397.280,00 atau 8,40%. Seluruh Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar di Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kenaikan.

d) Belanja Hibah kepada Partai Politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik merupakan hibah yang ditujukan kepada Partai Politik.

Tabel 5.89 Realisasi Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja hibah kepada partai politik	4.813.574.400,00	4.761.669.600,00	98,92%	-
Jumlah	**4.813.574.400,00**	**4.761.669.600,00**	**98,92%**	**-**

Realisasi belanja hibah kepada partai politik tahun 2020 sebesar Rp4.761.669.600,00 atau 98,92 %

6) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan akun untuk menampung belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, belanja bantuan sosial untuk pemberian perlindungan sosial, belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana. Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.90 Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	0,00	1.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberian Perlindungan Sosial	400.000.000,00	341.200.000,00	85,30	30.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial akibat resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi	50.000.000,00	11.200.000,00	22,40	-
Belanja Bantuan Sosial akibat resiko yang terkait dengan lingkungan	50.000.000,00	-	0,00	-
Jumlah	5.000.000.000,00	352.400.000,00	7,05	1.030.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar 7,05% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Bantuan Sosial tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp677.600.000,00 atau 65,79%.

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan akun untuk menampung belanja tanah, belanja peralatan dan kantor, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja Modal tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Tanah	10.843.075.000,00	8.785.013.950,00	81,02	-
Belanja Peralatan dan Mesin	272.737.795.607,00	254.349.003.701,00	93,26	166.619.328.650,44
Belanja Gedung dan Bangunan	189.577.659.168,00	182.406.597.671,89	96,22	302.998.946.941,95
Belanja Jalan, Irigasi danJaringan	327.418.116.574,10	280.131.995.852,00	85,56	499.805.986.099,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	44.036.399.510,00	26.855.599.045,00	60,99	44.613.262.330,00
Jumlah	844.613.045.859,10	752.528.210.219,89	89,10	1.014.037.524.021,39

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar 89,10 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Modal tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp261.509.313.801,50 atau 25,79%.

1) **Belanja Tanah**

Belanja Tanah merupakan akun untuk menampung diantaranya pengadaan tanah pengguna lain,pengadaan tanah untuk bangunan gedung serta pengadaan tanah bangunan jalan dan jembatan. Belanja Modal Tanah tahu 2020 terdiri dari :

Tabel 5.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pengadaan Tanah Pengguna Lain	5.208.075.000,00	3.632.712.750,00	69,75	-
Pengadaan Tanah Untuk Banguna Gedung	5.635.000.000,00	5.152.301.200,00	91,43	-
Jumlah	10.843.075.000,00	8.785.013.950,00	81,02	-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2020 sebesar Rp8.785.013.950,00 atau 81,02 %.

2) **Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja Peralatan dan Mesin merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja modal pengadaan alat berat, belanja modal pengadaan alat bantu, belanja modal angkutan darat bermotor. Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.93 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal pengadaan alat berat	3.520.000.000,00	3.335.650.000,00	94,76	304.999.960,00
Belanja modal alat alat bantu	45.430.600,00	44.289.500,00	97,49	2.025.000,00
Belanja modal angkutan darat bermotor	5.058.962.000,00	4.090.000.000,00	80,85	3.297.513.409,44
Belanja modal angkutan darat tak bermotor	-	-	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat bengkel bermesin	455.000.000,00	302.230.000,00	66,42	1.027.999.500,00
Belanja Modal Pengadaan alat bengkel tak bermesin	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	168.050.050,00
Belanja Modal Pengadaan alat ukur	43.940.000,00	40.550.000,00	92,28	250.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat pengolahan	100.548.700,00	95.043.700,00	94,53	85.824.300,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	634.859.450,00	566.219.240,00	89,19	49.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat kantor	1.455.906.200,00	1.382.007.115,00	94,92	1.595.824.155,00
Belanja Modal Pengadaan alat Rumah Tangga	28.643.827.360,00	26.974.959.181,00	94,17	26.584.154.082,00
Belanja modal pengadaan komputer	11.209.327.655,00	10.483.505.047,00	93,52	11.227.546.327,00
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/meubelair	6.766.581.400,00	6.569.271.550,00	97,08	6.949.201.765,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.712.180.545,00	2.517.154.554,00	92,81	4.722.803.050,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	461.708.000,00	407.770.800,00	88,32	676.559.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemancar	-	-	0,00	48.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	27.935.721.973,00	24.548.272.789,00	87,87	24.024.788.831,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	18.947.475.848,00	18.589.971.831,00	98,11	146.308.170,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.908.694.600,00	4.655.977.600,00	94,85	174.373.649,00

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar 93,26% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Modal tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp87.729.675.050,56 atau 52,65%.

Belanja Belanja Modal yang mengalami penurunan diantaranya belanja modal pengadaan alat bengkel bermesin, pengadaan alat bengkel tak bermesin serta pengadaan alat-alat studio Belanja modal yang mengalami kenaikan diantaranya belanja modal pengadaan alat berat, pengadaan alat bantu, pengadaan alat ukur, pengadaan alat kesehatan serta pengadaan alat laboratorium.

3) **Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan bangunan gedung pemerintah, belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal pengadaan bangunan tugu peringatan, belanja modal pengadaan bangunan rambu-rambu. Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.94 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.547.901.168,00	182.376.839.671,89	96,22	300.503.239.808,95
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	0,00	2.078.253.133,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	29.758.000,00	29.758.000,00	100,00	417.454.000,00
Jumlah	189.577.659.168,00	182.406.597.671,89	96,22	302.998.946.941,95

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar 96,22% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp120.592.349.270,06 atau 39,80%.

4) **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja modal pengadaan rambu-rambu, belanja modal jalan,irigasi, dan jaringan, belanja modal jembatan, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air, belanja modal konsultansi. Belanja

Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.95 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Jalan	297.415.870.724,10	261.223.246.496,00	87,83	484.066.628.943,00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan	8.261.797.250,00	7.120.608.180,00	86,19	6.951.608.020,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17.980.000.000,00	8.662.699.900,00	48,18	4.893.341.400,00
Belanja Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000,00	9.984.098,00	99,84	189.697.868,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000	189.905.000	94,95	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.700.021.100,00	2.103.483.300,00	77,91	10.442.500,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	218.050.000	202.454.378	92,85	-
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Bersih	91.477.500,00	87.623.000,00	95,79	148.121.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	104.203.178,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	200.000.000,00	196.207.000,00	98,10	3.182.464.890,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	340.900.000,00	335.784.500,00	98,50	259.478.300,00
Jumlah	327.418.116.574,10	280.131.995.852,00	85,56	499.805.986.099,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar 85,56% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp219.673.990.247,00 atau 43,95%. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami penurunan diantaranya belanja modal pengadaan jalan, belanja modal pengadaan bangunan air irigasi, belanja modal pengadaan jaringan listrik, belanja modal pengadaan jaringan telepon dan belanja modal konsultansi.

a) **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan**

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan merupakan akun untuk menampung belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan provinsi, jalan khusus, fasilitas jalan, konsultasi perencanaan jalan, pengawas pelaksanaan pembangunan jalan, konsultansi konstruksi. Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan tahun 2020 terdiri:

Tabel 5.96 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	255.757.142.280,10	222.879.944.335,00	87,15	362.453.922.380,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	2.714.642.444,00	216.364.441,00	7,97	48.238.108.810,00
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Jalan	101.588.000,00	101.142.000,00	99,56	479.545.900,00
Konsultasi Perencanaan	23.154.350.400,00	22.891.668.170,00	98,87	10.064.904.160,00
Konsultasi Pengawasan	15.688.147.600,00	15.134.127.550,00	96,47	17.429.237.975,00
Pemeliharaan jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	45.400.909.718,00
Jumlah	297.415.870.724,10	261.223.246.496,00	87,83	484.066.628.943,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan tahun 2020 sebesar 87,83% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar Rp222.843.382.447,00 atau 46,04%.

b) **Belanja Modal Pengadaan Jembatan**

Belanja Modal Pengadaan Jembatan merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan jembatan. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.97 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jembatan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi	8.257.200.000,00	7.116.010.930,00	86,18	6.864.260.270,00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus	4.597.250,00	4.597.250,00	100,00	87.347.750,00
Jumlah	8.261.797.250,00	7.120.608.180,00	86,19	6.951.608.020,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan tahun 2020 sebesar 86,19 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp169.000.160,00 atau 2,43%.

c) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan bangunan pelengkap irigasi. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.98 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	17.892.000.000,00	8.584.874.900,00	47,98	4.108.258.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	88.000.000,00	77.825.000,00	88,44	785.083.400,00
Jumlah	17.980.000.000,00	8.662.699.900,00	48,18	4.893.341.400,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi tahun 2020 sebesar 48,18% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.769.358.500,00 atau 77,03%.

d) **Belanja Modal Pengadaan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam**

Belanja modal pengadaan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan pengamanan sungai. Belanja modal pengadaan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.99 Realisasi Belanja modal pengadaan pengamanan sungai per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal pengadaan pengamanan sungai	10.000.000,00	9.984.098,00	99,84%	189.697.868,00
Jumlah	10.000.000,00	9.984.098,00	99,84%	189.697.868,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku tahun 2020 sebesar 94,74 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp179.713.770,00 atau 94,74%.

e) **Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**

Belanja modal pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan bangunan pengambilan pengembangan Sumber Air. Belanja modal Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.100 Realisasi Belanja modal pengadaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal pengadaan pengembangan sumber air dan air tanah	200.000.000,00	189.905.000,00	94,95%	0,00
Jumlah	200.000.000,00	189.905.000,00	94,95%	-

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku tahun 2020 sebesar 94,95 % dibanding anggarannya.

f) **Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku**

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan bangunan pengambil air bersih/baku. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.101 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	700.000.000,00	397.500.000,00	56,79	10.442.500,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih	2.000.210.100,00	1.705.983.300,00	85,29	0,00
Jumlah	2.700.210.100,00	2.103.483.300,00	77,90	10.442.500,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku tahun 2020 sebesar 77,90 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan yg signifikan sebesar Rp2.093.040.800,00 atau 20043,48% hal ini disebabkan adanya penambahan klasifikasi belanja modal bangunan pembawa air bersih yang baru dianggarkan pada tahun 2020.

g) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan instalasi air kotor. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.102 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	218.050.000,00	202.454.378,00	92,85	0,00
Jumlah	218.050.000,00	202.454.378,00	92,85	-

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor tahun 2020 sebesar Rp202.454.378,00 atau 92,85% dibanding anggarannya.

h) **Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih**

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan air tanah dalam, pengadaan air bersih/air tanah. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun 2020 terdiri dari :

Tabel 5.103 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	75.000.000,00	71.145.500,00	94,86	148.121.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air baku lainnya	16.477.500,00	16.477.500,00	100,00	0,00
Jumlah	91.477.500,00	87.623.000,00	95,79	148.121.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih tahun 2020 sebesar 94,86 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp60.498.000,00 atau 40,84%.

i) **Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor**

Belanja modal pengadaan Instalasi Air Kotor merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan instalasi air kotor. Belanja modal pengadaan instalasi air kotor Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.104 Realisasi Belanja modal pengadaan pengamanan sungai per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal pengadaan instalasi air kotor	0,00	0,00	0,00%	104.203.178,00
Jumlah	-	-	0,00%	104.203.178,00

Tahun 2020 Belanja Modal Pengadaan instalasi air kotor tidak ada realisasi.

j) **Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas**

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan instalasi jaringan pipa gas. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.105 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	200.000.000,00	196.207.000,00	98,10	3.182.464.890,00
Jumlah	200.000.000,00	196.207.000,00	98,10	3.182.464.890,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik tahun 2020 sebesar 98,10 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.986.257.890,00 atau 93,83%.

k) **Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik**

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik merupakan akun untuk menampung pengadaan jaringan distribusi, pengadaan jaringan transmisi. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.106 Realisasi Belanja Pengadaan Jaringan Listrik per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	171.000.000,00	166.006.500,00	97,08	99.851.500,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	169.900.000,00	169.778.000,00	99,93	159.626.800,00
Jumlah	340.900.000,00	335.784.500,00	98,50	259.478.300,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik tahun 2020 sebesar 98,50% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp76.306.200,00 atau 29,41%.

5) **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan buku/kepustakaan, pengadaan barang bercorak kesenian/kebudayaan, pengadaan hewan/ternak dan tanaman dan belanja modal aset tetap lainnya – BOS.

Tabel 5.107 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Buku	773.100.000,00	771.946.000,00	99,85%	303.502.015,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	172.000.000,00	171.857.700,00	99,92%	182.600.000,00
Belanja Modal Alat Olah Raga Lainnya	8.639.200,00	8.582.100,00	99,34%	49.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan hewan	223.000.000,00	212.900.000,00	95,47%	-
Belanja Modal Pengadaan tanaman	75.000.000,00	73.690.000,00	98,25%	-
Belanja modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00%	11.685.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.784.660.310,00	25.616.623.245,00	59,87%	44.065.625.315,00
Jumlah	44.036.399.510,00	26.855.599.045,00	60,99	44.613.262.330,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar 60,99 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp17.757.663.285,00 atau 40,30%.

a) Belanja Modal Pengadaan Buku

Belanja Modal Pengadaan Buku merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja pengadaan buku umum, pengadaan buku agama, pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial. Belanja Modal Pengadaan Buku Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.108 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Buku per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Umum	285.100.000,00	284.652.000,00	99,84	120.262.015,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Agama	-	-	0,00	2.500.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	488.000.000,00	487.294.000,00	99,86	180.740.000,00
Jumlah	773.100.000,00	771.946.000,00	99,85	303.502.015,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku tahun 2020 sebesar 99,85% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp468.443.985,00 atau 154,35%.

b) **Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan pahatan, lukisan, alat kesenian, benda-benda bersejarah, barang kerajinan, pengadaan alat olah raga. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.109 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	172.000.000,00	171.857.700,00	99,92%	182.600.000,00
Jumlah	172.000.000,00	171.857.700,00	99,92%	182.600.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan tahun 2020 sebesar 99,92% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp10.742.300,00 atau 5,88%.

c) **Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya**

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya merupakan akun untuk menampung belanja pegadaan alat olah raga lainnya. Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.110 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	8.639.200,00	8.582.100,00	99,34	49.850.000,00
Jumlah	8.639.200,00	8.582.100,00	99,34	49.850.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2020 sebesar 99,34% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp18.449.002.070,00 atau 82,78%.

d) **Belanja Modal Pengadaan Hewan**

Belanja Modal Pengadaan Hewan merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan hewan ternak. Belanja Modal Pengadaan Hewan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.111 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Hewan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	223.000.000,00	212.900.000,00	95,47%	-
Jumlah	223.000.000,00	212.900.000,00	95,47%	-

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2020 sebesar Rp212.900.000 atau 95,47% dibanding anggarannya.

e) **Belanja Modal Pengadaan Tanaman**

Belanja Modal Pengadaan Tanaman merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan hewan ternak. Belanja Modal Pengadaan Tanaman Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.112 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanaman per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	75.000.000,00	73.690.000,00	98,25%	-
Jumlah	75.000.000,00	73.690.000,00	98,25%	-

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2020 sebesar Rp73.690.000 atau 98,25% dibanding anggarannya.

f) **Belanja Modal Pengadaan Terbitan**

Belanja Modal Pengadaan Terbitan merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan terbitan berkala. Belanja Modal Pengadaan Terbitan Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.113 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	-	-	0,00	11.685.000,00
Jumlah	-	-	0,00	11.685.000,00

Tahun 2020 Belanja Modal Pengadaan Terbitan tidak ada realisasi.

g) **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Lainnya merupakan akun untuk menampung belanja aset tetap lainnya yang berasal dari belanja operasional sekolah. Tahun 2020 terdiri dari.

Tabel 5.114 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	42.784.660.310,00	25.616.623.245,00	59,87%	44.065.625.315,00
Jumlah	42.784.660.310,00	25.616.623.245,00	59,87%	44.065.625.315,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2020 sebesar 59,87% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp41.267.900,00 atau 82,78%

c. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga tahun 2020 merupakan belanja yang diujukan untuk pembiayaan penanganan pandemi covid 19.

Tabel 5.115 Realisasi Belanja TIdak Terduga per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	160.879.583.508,45	119.312.701.296,00	74,16	0,00
Jumlah	160.879.583.508,45	119.312.701.296,00	74,16	-

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp119.312.701.296,00 atau 74,16% dari anggaran. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.116 Tabel Rincian Belanja Tak Terduga TA.2020

Uraian	Anggaran	Realisasi
Dinas Kesehatan		
Alat Kesehatan	98.383.140.358,45	2.894.103.553,00
Obat-obatan		4.800.139.247,00
Habis Pakaian/Material Kesehatan		56.150.436.133,00
Belanja Lainnya		2.150.823.896,00
Jumlah	**98.383.140.358,45**	**65.970.340.557,00**
Dinas Sosial		
Belanja Dapur Umum	1.504.000.000,00	1.433.970.000,00
Belanja Penyemprotan Disinfektan		64.000.000,00
Jumlah	**1.504.000.000,00**	**1.448.769.500,00**
Biro Umum		

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan pandemi covid dan dampak pandemi covid 19. Terdapat beberapa Organisasi Perangka Daerah yang melakukan pembelanjaan dana Belanja Tidak Terduga. Diantaranya adalah belanja yang digunakan karena berhubungan langsung dengan penanganan pasien covid yaitu pada Dinas Kesehatan yang

digunakan untuk pembelian APD, suplemen petugas kesehatan dan masyarakat, masker, hand sanitizer kantong mayat dan kantong plastik infeksius, pengadaan rapid test, transport pengambilan spesimen maupun jasa pengiriman specimen. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah belanja tidak terduga fokus pada penyediaan logistik posko covid-19 di komplek Kantor Gubernur, termasuk honor piket, makan minum petugas piket, penyediaan obat-obatan, peralatan dan perlengkapan posko covid-19. Dalam rangka penanganan pasien covid-19 juga telah dilakukan beberapa pambangunan fisik, seperti pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi realisasi diperuntukkan perbaikan jalan menuju rumah sakit rujukan covid-19 di Kota Baru dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya melakukan rehabilitasi bangunan mahan nunyai RSUDAM serta pengadaan rumah lift dan lift di UPTD Laboratorium Daerah.

Selain belanja yang diperuntukkan untuk penanganan penderita covid-19, belanja tidak terduga pada beberapa organisasi perangkat daerah juga digunakan dalam rangka mengurangi dampak adanya pandemi. Pada Dinas Sosial, realisasi digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan melalui dapur umum pada masyarakat kurang mampu, dan para pekerja sektor informal, pengemudi angkutan umum, ojek online, penjual asongan dan lain-lain. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melakukan operasi pasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung juga merealisasikan Belanja Tidak Terduga guna memenuhi kebutuhan bahan makanan yang dibagikan dalam bentuk sembako kepada masyarakat Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung berupa beras, gula putih, minyak goreng, kecap manis, teh celup sebanyak 71.550 Paket Sembako. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura, realisasi Bealanja Tidak Terduga juga digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi khususnya di daerah stunting dan rawan kekurangan makanan.

Realisasi Belanja Tidak Terduga juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan stimulus terhadap usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bisa bertahan dan melakukan kerja sama pengadaan APD untuk kebutuhan Rumah Sakit.

Disamping itu pula, pemerintah Provinsi Lampung melalui beberapa organisasi perangkat daerah melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang bersuber dari Belanja Tidak Terduga, diantaranya sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.

d. **Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2020 merupakan realisasi belanja dana bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Belanja Transfer/Bantuan Keuangan kepada Desa.

Tabel 5.117 Realisasi Belanja Transfer Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer/Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	95,69	1.459.179.743.870,73
Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	15.896.272.800,00
Jumlah	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	95,69	1.475.076.016.670,73

Realisasi Belanja Transfer Daerah tahun 2020 sebesar 95,69% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja transfer daerah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp243.667.322.525,79 atau 16,52%.

1) **Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota**

Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung. Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.118 Realisasi Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Bandar Lampung	134.071.863.786,61	132.571.863.786,61	98,88%	160.727.480.305,27
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Metro	61.912.539.402,08	56.362.479.436,59	91,04%	71.063.330.413,49
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Utara	95.819.794.422,79	92.439.261.617,63	96,47%	98.943.320.975,93
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Selatan	115.677.320.827,84	111.753.717.301,74	96,61%	130.278.379.145,62
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Barat	64.915.046.099,51	62.140.456.604,26	95,73%	70.674.988.287,03
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tanggamus	82.323.807.858,04	79.130.592.199,93	96,12%	96.009.633.885,99
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang	82.972.604.906,72	73.809.441.641,15	88,96%	92.247.063.445,82
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Tengah	120.172.763.262,25	115.682.278.908,33	96,26%	145.048.226.261,11
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Way Kanan	81.209.238.807,22	77.377.656.931,50	95,28%	88.025.606.987,59
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Timur	118.742.446.887,80	113.410.191.254,05	95,51%	118.332.439.361,55
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesawaran	76.282.289.380,12	69.617.577.495,09	91,26%	83.709.946.756,74
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pringsewu	73.928.908.385,65	71.430.610.320,92	96,62%	84.268.963.502,69
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat	63.744.673.957,26	61.513.503.973,00	96,50%	80.693.362.330,41
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mesuji	58.502.504.841,03	58.196.649.674,17	99,48%	70.088.543.709,31
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesisir Barat	69.388.244.135,68	68.372.412.069,91	98,54%	83.068.486.504,16
Jumlah	1.286.836.044.218,60	1.231.408.694.144,94	95,69%	1.459.179.743.870,73

Realisasi Belanja Transfer Daerah Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.231.408.694.144,94 atau 95,69% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Transfer Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp227.771.049.725,79 atau 15,61%.

2) **Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung transfer

bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada desa, bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya, bantuan keuangan partai politik. Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.119 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	-	-	0,00	2.100.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	0,00	9.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik	-	-	0,00	4.796.272.800,00
Jumlah	-	-	0,00	15.896.272.800,00

Belanja Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 tidak ada realisasi.

3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Dalam tahun 2020 pendapatan ditargetkan sebesar Rp7.244.171.719.572,14 dan terealisasi sebesar Rp7.019.319.471.883,36 atau 96,90% sedangkan belanja dan transfer dianggarkan Rp7.381.124.107.714,45 dan terealisasi sebesar Rp5.736.046.654.037,69 atau 94,40%. Surplus sebesar Rp51.850.037.605,08 diperoleh berdasarkan transaksi kas dari pendapatan, belanja, dan transfer. Secara lebih lengkap, hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.120 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
PENDAPATAN	7.244.171.719.572,14	7.019.319.471.883,36	96,90	7.266.993.438.827,88
BELANJA DAN TRANSFER	7.381.124.107.714,45	6.967.358.448.182,63	94,39	7.058.713.889.024,41
SURPLUS/DEFISIT	(136.952.388.142,31)	51.961.023.700,73	(37,94)	208.279.549.803,47

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan pada TA 2020 adalah sebesar Rp336.132.388.142,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121 Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	99,99	93.875.534.190,84
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	120.115.470.500,00
Total	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	100,00%	213.991.004.690,84

Penggunaan SiLPA sebelumnya adalah sebesar Rp336.132.388.142,31. Bila dibandingkan dengan Penggunaan SiLPA Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp242.256.853.951,47 atau 258%.

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu dan pembentukan dana cadangan. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp199.180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.176.332.704,00.

Tabel 5.122 Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Penyertaan Modal	58.000.000.000,00	56.000.000.000,00	96,55%	15.550.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	100,00%	70.588.166.352,00
Jumlah	199.180.000.000,00	197.176.332.704,00	98,99%	86.138.166.352,00

1) Penyertaan Modal

Realisasi penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp56.000.000.000,00 kepada PT.Bank Lampung dan pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank yaitu PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero).

Tabel 5.123 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
PT. Lampung Jasa Utama (LJU)	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000.000,00
PT.Bank Lampung	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	100,00%	0,00
PT. Wahana Rahardja	-	0,00	0,00%	5.550.000.000,00
Jumlah	58.000.000.000,00	56.000.000.000,00	96,55%	15.550.000.000,00

2) Pembayaran Pokok Utang

Realisasi Pembayaran Pokok Utang merupakan akun untuk menampung pembayaran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp141.176.332.704,00 atau 99,98% dari anggaran. Pembayaran Pokok Utang terdiri dari :

Tabel 5.124 Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	99,98	70.588.166.352,00
Jumlah	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	99,98	70.588.166.352,00

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA selama TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
PENDAPATAN	7.244.171.719.572,14	7.019.319.471.883,36	96,90	7.266.993.438.827,88
BELANJA DAN TRANSFER	7.381.124.107.714,45	6.967.455.348.182,63	94,40	7.058.713.889.024,41
SURPLUS/DEFISIT	(136.952.388.142,31)	51.961.023.700,73	(37,94)	208.279.549.803,47
PEMBIAYAAN NETTO	136.952.388.142,31	138.956.055.438,31	101,46	127.852.838.338,84
SiLPA	-	190.917.079.139,04		336.132.388.142,31

SiLPA TA 2020 sebesar Rp190.917.079.139,04 mengalami penurunan sebesar Rp145.215.309.003,27 bila dibandingkan dengan SiLPA TA 2019 sebesar Rp336.132.388.142,31.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut. yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya),penggunaan saldo anggaran lebih,sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih TA 2020 terdiri dari:

Tabel 5.126 Laporan Perubahan SAL Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	336.132.388.142,31	93.876.882.791,31
Penggunaan SAL	336.132.388.142,31	93.875.534.190,84
Sub Total	**-**	**1.348.600,47**
SILPA/SIKPA	190.917.079.139,04	336.132.388.142,31
Sub Total	**190.917.079.139,04**	**336.133.736.742,78**
Koreksi Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	(1.348.600,47)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**190.917.079.139,04**	**336.132.388.142,31**

Saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp336.132.388.142,31 dengan penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp336.132.388.142,31. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp190.917.079.139,04 per 31 Desember 2020.

C. NERACA

Neraca atau laporan posisi keuangan *(balance sheet)* adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas Aset (aktiva), Kewajiban *(liabilities),* dan Ekuitas.

Tabel 5.127 Rincian Neraca Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Aset	11.231.997.705.317,70	9.717.052.081.267,49
Kewajiban	873.388.365.230,16	1.102.785.690.547,03
Ekuitas	10.358.609.340.087,60	8.614.266.390.720,46
Kewajiban + Ekuitas	11.231.997.705.317,70	9.717.052.081.267,49

1. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri atas:

Tabel 5.128 Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	417.250.657.840,82	536.678.940.746,05
2	Investasi Jangka Panjang	487.396.970.917,00	426.078.274.017,18
3	Aset Tetap	10.182.106.235.517,70	8.583.721.621.939,36
4	Aset Lainnya	145.243.841.042,25	170.573.244.564,90
Jumlah		**11.231.997.705.317,80**	**9.717.052.081.267,49**

Berdasarkan rincian aset sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi terbesar atas aset merupakan kelompok Aset Tetap yaitu 90,65% terhadap total keseluruhan aset Provinsi Lampung TA 2020.

a. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar tersebut antara lain terdiri atas kas dan setara kas. Adapun rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rincian Aset Lancar Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	119.824.886.780,03	253.200.004.143,14
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	268.460,11	307.740,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.903.800.000,00	-
4	Kas di BLUD	59.957.946.534,08	45.004.642.256,78
5	Kas di Bendahara BOS	790.828.430,07	37.847.139.783,20
6	Kas Lainnya	498.205.512,75	80.294.219,19
7	Investasi Jangka Pendek	-	-
8	Piutang Pajak	10.682.279,00	3.790.827,44
9	Penyisihan Piutang Pajak	(53.411,40)	(18.954,14)
10	Piutang Pajak Netto	**10.628.867,60**	**3.771.873,30**
11	Piutang Retribusi	4.180.000,00	14.075.000,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi	(20.900,00)	(70.375,00)
13	Piutang Retribusi Netto	**4.159.100,00**	**14.004.625,00**
14	Beban Dibayar Dimuka	231.242.245,83	227.458.055,00
15	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	8.559.317.214,74	10.119.042.620,11
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. An	(14.901.472,19)	(15.638.305,52)
17	Bag. Lancar Tagihan Penj. Angsuran Netto	**8.544.415.742,55**	**10.103.404.314,59**
18	Bag. Lancar TPTGR	5.932.004,17	68.776.279,17
19	Penyisihan Bagian Lancar TPTGR	(29.660,02)	(299.221,38)
20	Bagian TPTGR Netto	**5.902.344,15**	**68.477.057,79**
21	Piutang Lainnya	78.837.524.872,00	62.743.719.073,00
22	Penyisihan Piutang Lainnya	(429.523.104,12)	(334.675.248,35)
23	Piutang Lainnya Netto	**78.408.001.767,88**	**62.409.043.824,65**
24	Persediaan	147.070.372.055,77	127.720.392.853,41
Jumlah		**417.250.657.840,82**	**536.678.940.746,05**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum aset lancar Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp417.250.657.840,82 mengalami penurunan sebesar Rp119.428.282.905,24 atau 22,25% apabila dibandingkan tahun 2019.

1) **Kas di Kas Daerah**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
119.824.886.780,03	**253.200.004.143,14**

Kas di kas daerah merupakan kas dan setara kas yang ada pada Giro Bank Lampung Nomor 380.00.06.00001.1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung (**Lampiran 1**). Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp119.824.886.780,03.

Dari saldo kas di kas daerah sebesar Rp119.824.886.780,03, diantaranya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp9.021.639.605,00 berupa sisa DAK Non Fisik dan DAK Fisik. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.130 Uraian Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2020

No.	Uraian		Saldo RKUD Tahun 2020
1	Silpa DID 2020		**3.959.995.353,00**
2	Silpa DAK Non Fisik 2020 terdiri dari :		**6.061.296.250,00**
	-	TPP Guru	251.900.286,00
	-	TKG Guru	712.096.520,00
	-	Tamsil Guru	181.500.000,00
	-	BOK Tambahan	206.227.273,00
	-	BOS Kesehatan	4.134.164.300,00
	-	PK2UKM (Koperasi)	36.285.100,00
	-	Adminduk (Disdukcapil)	293.733.421,00
	-	BOP-MTB (Museum Taman Budaya)	245.389.350,00
3	Silpa DAK Fisik 2020 terdiri dari :		**2.960.343.355,00**
	-	Pendidikan (Reguler)	1.525.618.650,00
	-	Pendidikan (Penugasan)	1.383.504.530,00
	-	Kesehatan dan KB (Reguler)	1.080,00
	-	Kesehatan dan KB (Penugasan)	25.000.000,00
	-	Kelautan	26.219.095,00
4	Kelebihan Setor RS Bandar Negara Husada		**90.500.000,00**
	Sisa Saldo		**106.752.751.822,03**

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
268.460,11	**307.740,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp268.460,11. Sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp307.740,00.

Tabel 5.131 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)		Per 31 Desember 2019 (Rp)
		Jumlah	Tanggal Setor	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72.800,00	26-01-2021	
2	Dinas Energi dan SDM	195.660,11	28-01-2021/30-01-2021	
9	Dinas PP dan PA			100.740,00
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan			207.000,00
Jumlah		**268.460,11**	-	**307.740,00**

3) **Kas di Bendahara Penerimaan**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.903.800.000,00	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke kas daerah. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.903.800.000,00.

Tabel 5.132 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.891.800.000,00	
2	Dinas Perhubungan	12.000.000,00	
3	Dinas PP dan PA		
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
Jumlah		**1.903.800.000,00**	-

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan merupakan Pendapatan di UPTD Laboratorium Kesehatan dari PCR mobile, sedangkan pada Dinas Perhubungan pendapatan dari pemanfaatan aset milik daerah yang berada di Perum Damri.

4) **Kas di BLUD**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
59.957.946.534,08	**45.004.642.256,78**

Kas di BLUD merupakan kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM), dan Rumah Sakit Jiwa. Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	BLUD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	RSUAM	55.342.304.083,68	43.595.337.980,54
2	Badan Perwakilan		-
3	UPTD Koperasi & UMKM		93.684.069,36
4	UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian		9.881.448,81
5	Rumah Sakit Jiwa	4.615.642.450,40	1.305.738.758,07
Jumlah		**59.957.946.534,08**	**45.004.642.256,78**

5) **Kas di Bendahara BOS**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
790.828.430,07	**37.847.139.783,20**

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa dana BOS yang belum digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp790.828.430,07 yang belum digunakan atau disetor ke Kasda.

Tabel 5.134 Rincian Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Uraian Saldo BOS			
		Bos Reg	Bos Afkin	Jasa Giro	Total
1	SMA/SLBN	81.460.116,27	12.000.000,00	105.066.954,42	**198.527.070,69**
2	SMK	1.760.300,00	517.000.336,00	73.540.723,38	**592.301.359,38**
		-	-	-	-
	Total	**83.220.416,27**	**529.000.336,00**	**178.607.677,80**	**790.828.430,07**

Rincian saldo dana BOS pada SMAN/SLBN dan SMKN masing-masing sebesar Rp198.527.070,69 dan Rp592.301.359,38 disajikan pada **Lampiran**

2a dan **2b**.

6) **Kas Lainnya**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
498.205.512,75	**80.294.219,19**

Kas Lainnya merupakan sisa dana yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas Daerah, kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Kas Lainnya timbul akibat masih adanya penerimaan atas Rekening BLUD pada KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian sampai dengan tahun 2020 dan saldo kas penerimaan Satgas Covid 19 pada Biro Umum. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan kedua UPTD ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Akibatnya, KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian pada akhir bulan September 2019 tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Satker	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	UPTD Koperasi dan UMKM	350.859.310,91	9.050.653,97
2	UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian	36.019.038,84	71.243.565,22
3	Biro Umum (Satgas Covid 19)	111.327.163,00	-
Jumlah		**498.205.512,75**	**80.294.219,19**

7) **Investasi Jangka Pendek**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
0,00	**0,00**

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

8) **Piutang Pajak (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10.628.867,60	**3.771.873,30**

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Provinsi Lampung berupa saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang pajak per 31 Desember 2020 netto

sebesar Rp10.628.867,60 merupakan saldo piutang Pajak Air Permukaan.

Tabel 5.136 Daftar Wajib Pajak Piutang Pajak per 31 Desember 2020

No	Nama Pelanggan	NO SKPD	Masa Pajak	Nilai Tunggakan
1	PLTU Seputih Daya Prima	009282/SKPD-PAP/I/2020	Januari	718.613
2	PLTU Seputih Daya Prima	01031/SKPD-PAP/II/2020	Februari	1.180.287
3	PLTU Seputih Daya Prima	01051/SKPD-PAP/III/2020	Maret	232.019
4	PLTU Seputih Daya Prima	01108/SKPD-PAP/IV/2020	April	490.676
5	PLTU Seputih Daya Prima	01175/SKPD-PAP/V/2020	Mei	761.579
6	Pringsewu Jaya Abadi	01451/SKPD-PAP/X/2020	Oktober	615.095
7	Pringsewu Jaya Abadi	01527/SKPD-PAP/XI/2020	November	597.872
8	PTPN VII Way Berulu	01521/SKPD-PAP/XI/2020	November	167.353
9	Austasia Stockfeed	01484/SKPD-PAP/XI/2020	November	693.000
10	Teguh Wibawa Bakti Lampura	01033/SKPD-PAP/II/2020	Februari	539.674
11	Teguh Wibawa Bakti Lampura	01083/SKPD-PAP/III/2020	Maret	509.663
12	Teguh Wibawa Bakti Lampura	01132/SKPD-PAP/IV/2020	April	384.078
13	Teguh Wibawa Bakti Tuba	01036/SKPD-PAP/II/2020	Februari	424.094
14	Teguh Wibawa Bakti Tuba	01079/SKPD-PAP/III/2020	Maret	384.435
15	Teguh Wibawa Bakti Tuba	01131/SKPD-PAP/IV/2020	April	314.230
16	Teguh Wibawa Bakti Lamteng	01035/SKPD-PAP/II/2020	Februari	450.175
17	Teguh Wibawa Bakti Lamteng	01081/SKPD-PAP/III/2020	Maret	420.342
18	Teguh Wibawa Bakti Lamteng	01133/SKPD-PAP/IV/2020	April	354.602
19	Luhur Perkasa Maju Dinamika	01034/SKPD-PAP/II/2020	Februari	540.032
20	Luhur Perkasa Maju Dinamika	01082/SKPD-PAP/III/2039	Maret	517.166
21	Luhur Perkasa Maju Dinamika	01134/SKPD-PAP/IV/2020	April	387.294
	Total Piutang Pajak Bruto			**10.682.279,00**
	Penyisihan 0,50%			**53.411,40**
	Total Piutang Pajak Netto			**10.628.867,60**

9) **Piutang Retribusi (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.159.100,00	**14.004.625,00**

Piutang retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Provinsi Lampung berupa saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) berdasarkan surat ketetapan retribusi, yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Saldo Piutang Retribusi pada tahun 2020 sebesar Rp4.159.100,00 merupakan saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Sewa Rumah Dinas Kehutanan.

Tabel 5.137 Daftar Wajib Pajak Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

No	No. SKR	Nama Pelanggan	Tanggal SKR	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai SKR
1		Haidir Effendi	01-01-2020	31-12-2020	4.180.000,00
	TOTAL PIUTANG BRUTTO				**4.180.000,00**
	PENYISIHAN 0,50%				**20.900,00**
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO				**4.159.100,00**

10) **Beban Dibayar Dimuka**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
231.242.245,83	**227.458.055,00**

Beban dibayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun anggaran berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Beban dibayar dimuka antara lain terdiri dari sewa rumah, asuransi yang dibayar dalam jangka waktu tertentu tetapi belum semuanya dinikmati jasanya.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.242.245,83 terdiri dari:

Tabel 5.138 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020

No	SKPD	Uraian	Jangka Waktu	Belanja LRA (Rp)	Beban Jasa LO (Rp)	Belanja Dibayar dimuka (Rp)
1	Dinas Sosial	Sewa Rumah RPTC	08-2020 s/d 08-2021	41.500.000,00	17.291.666,67	24.208.333,33
		Sewa Rumah singgah	09-2020 s/d 09-2021	120.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
		Sub Jumlah		**161.500.000,00**	**57.291.666,67**	**104.208.333,33**
2	Setwan	Asuransi All Risk	21-10-2020 s/d 21-10-2021	131.714.550,00	32.928.637,50	98.785.912,50
		Asuransi All Risk	29-10-2020 s/d 29-10-2021	17.792.500,00	4.448.125,00	13.344.375,00
		Asuransi All Risk Ktr	23-10-2020 s/d 23-10-2021	19.871.500,00	4.967.875,00	14.903.625,00
		Sub Jumlah		**169.378.550,00**	**42.344.637,50**	**127.033.912,50**
		Jumlah		**330.878.550,00**	**99.636.304,17**	**231.242.245,83**

Tabel 5.139 Rincian Belanja Dibayar Dimuka DPRD dan Dinas Sosial Prov. Lampung per 31 Desember 2020

No	Keterangan	Jangka Waktu	Nomor Kontrak Asuransi	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nama Pihak Asuransi	Aset Yang diasuransikan
	Dinas Sosial						
1	Sewa Rumah RPTC	15-08-2020 s.d 15-08-2021	810/105/V.7/B.I/2020	15 Agustus 2020	41.500.000,00	Salmah	
2	Sewa Rumah Singga	04-09-2020 s.d 04-09-2021	027/1797/V.07/B.I/IX/2020	4 September 2020	120.000.000,00	Ir. Alexander Manik	
	di Jakarta						
	DPRD						
1	Asuransi All Risk	21-10-2020 s/d 21-10-2021	35022220000324	26-10-2020	131.714.550,00	PT. Asuransi Ramayana	Kend Dinas/Operasional
2	Asuransi All Risk	29-10-2020 s/d 29-10-2021	35010520000018	27-10-2020	17.792.500,00	PT. Asuransi Ramayana	Rumdin dan Gedung pertemuan Ketua DPRD
3	Asuransi All Risk	23-10-2020 s/d 23-10-2021	35010920000012	23-10-2020	19.871.500,00	PT. Asuransi Ramayana	Gedung Kantor DPRD Prov. Lampung

11) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
8.544.415.742,55	**10.103.404.314,59**

Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan hak Pemerintah Provinsi Lampung dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu 12 bulan kedepan. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Piutang bagian lancar penjualan angsuran merupakan bagian dari Tagihan Penjualan Tanah Kavling dan Rumah Dinas per 31 Desember 2020 (**Lampiran 3a** dan **3b**). Sedangkan Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Provinsi Lampung Tahun 2020 terdiri atas:

Tabel 5.140 Rincian Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Piutang Bag. Lancar Penj. Angs (Rp)	Penyisihan Piutang Bag. Lancar Penj. Angs (Rp)	Piutang Bag. Lancar Penj. Angs. Netto (Rp)
1	Penjualan Tanah Kavling	8.216.202.704,08	14.094.494,00	8.202.108.210,08
2	Penjualan Rumah Dinas	343.114.510,66	806.978,19	342.307.532,47
Jumlah		8.559.317.214,74	14.901.472,19	8.544.415.742,55

12) **Piutang Bagian Lancar TP/TGR (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
5.902.344,15	**68.477.057,79**

Piutang bagian lancar TP/TGR merupakan hak Pemerintah Provinsi Lampung yang berasal dari kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, yang merupakan nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih (diharapkan dapat diterima) dalam jangka waktu 12 bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) setelah dilakukan proses pengklasifikasian dan perhitungan terhadap TP/TGR ke dalam kelompok piutang (bagian lancar tuntutan ganti rugi) dan aset lainnya maka atas TP/TGR tersebut yang termasuk dalam kelompok bagian lancar TP/TGR (*netto*) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.902.344,15 dan Rp68.477.57,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rincian Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama	TP/ TGR	Tahun Kejadian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3	DESTRA YUDHA SETIAWAN, SH	TGR	2017	5.932.004,17	41.524.029,17
4	HADI SAPUTRA	TGR	2016		21.502.250,00
6	M. IRWAN	TGR	2019		5.750.000,00
JumlahBagian Lancar TPTGR (*Bruto*)				**5.932.004,17**	**68.776.279,17**
Penyisihan Bagian Lancar TPTGR				**29.660,02**	**299.221,38**
Jumlah Bagian Lancar TPTGR (*Netto*)				**5.902.344,15**	**68.477.057,79**

13) **Piutang Lainnya (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
78.408.001.767,88	**62.409.043.824,65**

Tabel

Tabel 5.142 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Jamkesda Kota, Piutang Pasien Dalam Perawatan, Piutang TGR, Piutang Pasien Umum, BPJS dan Piutang Lain lain (RSUDAM)	45.900.730.476,00	32.518.601.835,00
2	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	146.237.000,00	119.766.000,00
3	Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan (RSJ)	1.055.520.248,00	3.660.705.130,00
4	Lebih setor pajak	98.517.049,00	98.517.049,00
5	Kontrak Batal pada Dinas Cipta Karya dan SDA		1.578.686.353,00
6	Piutang SP3D Dinas Kehutanan		37.500.000,00
7	Piutang Trf Bagi Hasil Pemerintah Pusat	27.811.897.925,00	20.905.320.532,00
8	Piutang Trf Bantuan Keuangan Kab Lampura	3.824.622.174,00	3.824.622.174,00
Jumlah		**78.837.524.872,00**	**62.743.719.073,00**
Penyisihan Piutang Lainnya		**429.523.104,12**	**334.675.248,35**
Piutang Lainnya Netto		**78.408.001.767,88**	**62.409.043.824,65**

Tabel 5.143 Rincian Piutang Lainnya dan penyisihan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya	Piutang Lainnya Netto
1	Piutang Jamkesda Kota, Piutang Pasien Dalam Perawatan, Piutang TGR, Piutang Pasien Umum, BPJS dan Piutang Lain-lain (RSUDAM)	45.900.730.476,00	229.503.652,38	45.671.226.823,62
2	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	146.237.000,00	36.559.250,00	109.677.750,00
3	Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan (RSJ)	1.055.520.248,00	5.277.601,24	1.050.242.646,76
4	Lebih setor pajak	98.517.049,00	-	98.517.049,00
5	Kontrak Batal pada Dinas Cipta Karya dan SDA			-
6	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat	27.811.897.925,00	139.059.489,63	27.672.838.435,37
6	Piutang Trf Bantuan Keuangan Kab Lampura	3.824.622.174,00	19.123.110,87	3.805.499.063,13
Jumlah		**78.837.524.872,00**	**429.523.104,12**	**78.408.001.767,88**

Saldo Piutang Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp78.837.524.872,00 dan Rp62.409.043.824,65 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian lebih lanjut Piutang Lainnya dijelaskan sebagai berikut:

a) **Piutang Lainnya RSAM**

Piutang Lainnya pada RSAM merupakan piutang retribusi yang berasal dari pasien tidak mampu, Jamkesmasda, Diklat, BPJS, TGR, dan Askes Gakin per 31 Desember 2020 setelah dilakukan penyisihan adalah sebesar Rp45.900.730.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144 Rincian Piutang Lainnya RSAM per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019
1	Piutang Jamkesda Kota	7.302.775.792,00	-
2	Piutang Pasien Dalam Perawatan	1.752.813.087,00	-
3	Piutang TGR	7.941.143.422,00	
4	Piutang Pasien Umum	260.352.583,00	48.573.959,00
5	Diklat	-	236.398.000,00
6	BPJS	26.260.427.919,00	32.233.629.876,00
7	Piutang lain lain	2.383.217.673,00	-
Jumlah		**45.900.730.476,00**	**32.518.601.835,00**
Penyisihan Piutang Lainnya		**229.503.652,38**	**162.593.009,17**
Piutang Lainnya Netto		**45.671.226.823,62**	**32.356.008.825,83**

b) **Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir**

Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir merupakan piutang yang diharapkan akan diterima pada dinas yang mengelola dana bergulir dari tahun 2003 sampai 2020. Sedangkan nilai piutang atas jasa dana bergulir *netto* per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp109.677.750,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.145 Daftar Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Koperasi	146.237.000,00	119.766.000,00
2	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-
	Jumlah Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir (*Bruto*)	**146.237.000,00**	**119.766.000,00**
	Penyisihan Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	**36.559.250,00**	**29.941.500,00**
	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir (*Netto*)	**109.677.750,00**	**89.824.500,00**

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal persetujuan penggabungan/penyerahan Aset Dana Bergulir telah dilakukan penggabungan pengelolaan BLUD Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan, piutang yang terdapat di UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM yang belum tertagih netto setelah dilakukan penyisihan adalah sebesar Rp89.824.500,00. Piutang jasa dana bergulir pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM berasal dari tunggakan pembayaran jasa pinjaman atas penyaluran dana bergulir di 15 kabupaten/kota dari tahun 2003 s.d. 2019. Besarnya jasa pembinaan terhadap dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebesar 6% per tahun dari nilai dana yang disalurkan.

c) **Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan pada RSJ Daerah**

Pencatatan piutang pasien jaminan dan non jaminan pada RSJ dilakukan sejak penerapan PPK-BLUD tanggal 5 April 2014. Piutang ini merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSJD Provinsi Lampung yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien jaminan/BPJS termasuk pasien jamkesda yang belum terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 setelah penyisihan sebesar Rp1.050.242.646,76 Rincian Piutang pasien jaminan dan non jaminan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.146 Daftar Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan pada RSJD per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	BPJS dalam Program JKN	754.740.438,00	3.439.636.693,00
2	Pemkot Kota Balam dalam Program Jamkesda	247.824.700,00	92.804.200,00
3	Kemenkes dalam Program Rehabilitasi 100 ribu Pecandu Narkoba	52.995.110,00	128.264.237,00
	Jumlah Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan (*Bruto*)	**1.055.560.248,00**	**3.660.705.130,00**
	Penyisihan Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan	**5.277.601,24**	**18.303.525,65**
	Jumlah Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan (*Netto*)	**1.050.282.646,76**	**3.642.401.604,35**

d) **Lebih Setor Pajak**

Lebih setor pajak sebesar Rp98.517.049,00 terjadi pada tahun 2017. Lebih setor pajak disebabkan oleh adanya pengeluaran tiga SP2D yang potongan pajaknya telah dibayarkan, tetapi pengeluaran belanja dibatalkan (SP2D batal), satu SP2D dengan kelebihan bayar pajak dan Dinas Perhubungan yang salah menyetorkan pajak ke rekening kas umum daerah.

Tabel 5.147 Daftar Lebih Setor Pajak per 31 Desember 2020

No.	No SP2D	SKPD	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Ket
1	920/07879/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	20.670.936,00	SP2D Batal
2	920/07893/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	20.669.340,00	SP2D Batal
3	920/08372/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	58.283.771,00	SP2D Batal
4	920/07999/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR	29-12-2017	2,00	Lebih setor pajak
5		Dinas Perhubungan		(1.107.000,00)	Salah Setor Pajak
	TOTAL		-	**98.517.049,00**	

e) **Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat**

Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat adalah kurang salur dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar Rp27.811.897.925,00 (*netto*). Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 sebesar Rp27.811.897.925,00;

f) **Piutang Transfer Bantuan Keuangan Kab Lampung Utara**

Piutang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Lampura adalah kurang salur transfer bantuan keuangan pemerintah daerah ke Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 untuk bantuan ongkos transit daerah calon jemaah haji dari Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp3.805.499.063,13 (*netto*) yang terdiri dari:

Tabel 5.148 Daftar Kurang Bayar DBH Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran	SK Gubernur	Nilai (Rp)
2017	SK Gubernur No. G/277/B.03/HK/2017 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1165/KW.08.4/3/Hj.00/09/2017	1.521.342.180,00
2018	SK Gubernur No. G/272/B.03/HK/2018 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1116/KW.08.4/1/Hj.00/08/2018	1.124.521.392,00
2019	SK Gubernur No. G/332/B.03/HK/2019 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1148/KW.08.4/3/Hj.00/08/2019	1.178.758.602,00
	Total	3.824.622.174,00

	Penyisihan Piutang	19.123.110,87
	Netto	3.805.499.063,13

1) **Persediaan**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
147.070.372.055,77	**127.720.392.853,41**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan tersebut terdiri atas persediaan barang habis pakai, persediaan bahan atau material, persediaan barang cetakan, dan hewan ternak. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp147.070.372.055,77 dan Rp127.720.392.853,41. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 5.149 Saldo Persediaan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	ATK	5.800.452.257,93
2	Beras	939.469.070,50
3	Obat	26.781.823.809,76
4	Bahan Makanan	1.258.783.080,64
5	Alkes	48.594.863.635,44
6	Bahan Bangunan, Listrik dan Kimia	1.864.627.921,00
7	Barang/Jasa (Hibah)	37.783.815.631,00
8	Reklas Aset BM	3.078.996.450,00
9	Persedian Bahan Pakai Habis Bantuan Covid 19	20.967.540.199,50
Jumlah		**147.070.372.055,77**

b. **Investasi Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
487.396.970.917,00	**426.078.274.017,18**

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp487.396.970.917,00 dan Rp426.078.274.017,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150 Daftar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	8.968.848.651,01	9.455.553.225,00
2	Investasi Permanen	478.428.122.265,99	416.622.720.792,18
Jumlah		**487.396.970.917,00**	**426.078.274.017,18**

1) **Investasi Non Permanen**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
8.968.848.651,01	**9.455.553.225,00**

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi tersebut berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Saldo Investasi non permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp8.968.848.651,01 dan Rp9.455.553.225,00.

Investasi non permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat. Sejak diberlakukannya penggabungan pengelolaan BLUD Bidang Pertanian melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Rincian dana bergulir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.151 Daftar Investasi Non permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UMKM	6.443.868.651,01	6.809.343.225,00
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.524.980.000,00	2.646.210.000,00
Jumlah		**8.968.848.651,01**	**9.455.553.225,00**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung mengatur penatausahaan terhadap dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih , dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan nilai investasi non permanen per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2019. Penurunan tersebut dikarenakan semakin tingginya piutang yang diragukan dapat ditagih dan piutang yang tidak dapat ditagih:

Tabel 5.152 Mutasi Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2020

No.	Satker	Saldo Awal 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir2020 (Rp)
			Koreksi Tambah (Rp)	Koreksi Kurang (Rp)	
1	Dinas Koprasi dan UMKM	12.000.000.000,00	-	5.556.131.348,99	6.443.868.651,01
2	Dinas Pertanian. Tanaman Pangan dan Holtikultura	22.099.900.000,00	-	19.574.920.000,00	2.524.980.000,00
Jumlah		**34.099.900.000,00**	**-**	**25.131.051.348,99**	**8.968.848.651,01**

Nilai dana bergulir yang dicatat pada neraca Tahun 2020 adalah nilai investasi yang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah saldo awal dikurangi penyisihan yang terdiri dari nilai piutang dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih , dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat tertagih sebesar Rp25.131.051.348,99. Dana bergulir yang dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo 0 s.d. 1 tahun dengan persentase penyisihan 25%. Dana bergulir yang memungkinkah dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo antara lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun dengan persentase penyisihan 50%. Dana bergulir yang diragukan dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo lebih dari 2 tahun s.d. 3 tahun dengan persentase penyisihan 75%. Dana bergulir yang tidak dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo diatas 3 tahun dengan persentase penyisihan 100% Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan penyisihan dana bergulir yang dapat ditagih (kualitas lancar) dan dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih (kualitas kurang lancar), dana bergulir yang diragukan dapat ditagih (kualitas ragu-ragu) dan dana bergulir tidak dapat ditagih (kualitas macet).

Dengan adanya proses penggabungan BLUD, maka seperti pada tabel di atas nilai investasi non permanen berupa dana bergulir berada pada dua satker pengelola BLUD yaitu Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

a) **Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung**

Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung disalurkan melalui UPTD Perkuatan Modal KUMKM kepada LKM/UMKM dari Tahun 2003 sampai dengan 2019. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah terobosan untuk meningkatkan peran dan kontribusi KUMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang ditempuh melalui penguatan modal usaha daerah. Jumlah dana yang disalurkan lewat program dana bergulir melalui KUMKM atau yang dikenal dengan Dana Abadi UMKM PPK-BLUD per 31 Desember 2019 mencapai Rp60.960.500.000,00 yang disalurkan kepada 2.677 KUMKM di 15 kabupaten/kota dengan pencapaian penyaluran per tahun sebagai berikut:

1) Tahun 2003 sebesar Rp4.550.000.000,00 kepada 232 KUMKM;
2) Tahun 2004 sebesar Rp3.015.000.000,00 kepada 160 KUMKM;
3) Tahun 2005 sebesar Rp2.962.500.000,00 kepada 182 KUMKM;
4) Tahun 2006 sebesar Rp4.225.000.000,00 kepada 233 KUMKM;
5) Tahun 2007 sebesar Rp742.500.000,00 kepada 38 KUMKM;
6) Tahun 2008 sebesar Rp3.205.000.000,00 kepada 147 KUMKM;

7) Tahun 2009 sebesar Rp3.840.000.000,00 kepada 186 KUMKM;
8) Tahun 2010 sebesar Rp3.384.000.000,00 kepada 153 KUMKM;
9) Tahun 2011 sebesar Rp3.972.500.000,00 kepada 181 KUMKM;
10) Tahun 2012 sebesar Rp4.461.500.000,00 kepada 170 KUMKM;
11) Tahun 2013 sebesar Rp2.885.000.000,00 kepada 128 KUMKM;
12) Tahun 2014 sebesar Rp4.987.500.000,00 kepada 196 KUMKM;
13) Tahun 2015 sebesar Rp3.855.000.000,00 kepada 146 KUMKM;
14) Tahun 2016 sebesar Rp4.210.000.000,00 kepada 134 KUMKM;
15) Tahun 2017 sebesar Rp4.105.000.000,00 kepada 158 KUMKM;
16) Tahun 2018 sebesar Rp4.020.000.000,00 kepada 150 KUMKM;
17) Tahun 2019 sebesar Rp2.540.000.000,00 kepada 83 KUMKM.

Dana bergulir KUMKM bersumber dari APBD murni Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00 yang disalurkan melalui beberapa tahapan yaitu TA 2003 sebesar Rp4.550.000.000,00, TA 2004 sebesar Rp5.450.000.000,00 dan TA 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 pengembalian terhadap pokok dari dana bergulir tersebut mencapai nilai sebesar Rp51.171.614.983,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.257.654.300,00 dibandingkan pengembalian atas pokok dana bergulir pada Tahun 2019 yang hanya mencapai Rp49.913.960.683,00. Hal tersebut menjadi indikasi yang cukup baik atas kinerja pengelolaan dana bergulir berupa KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Namun demikian terdapat kendala atau permasalahan yang ditemui terkait pengelolaan BLUD tersebut antara lain:

1) Lemahnya jaminan atas pinjaman KUMKM yang diberikan pada UPTD BLUD sehingga tidak dapat diproses secara hukum dikarenakan seluruh perjanjian masih bersifat di bawah tangan dan belum dapat diperlakukan sebagai akte autentik;
2) KUMKM yang belum memahami teknis penyetoran angsurannya pada UPTD BLUD;
3) Masih ada penerima KUMKM yang beranggapan bahwa dana pinjaman pada UPTD BLUD tidak wajib dikembalikan karena merupakan dana bantuan dari pemerintah;
4) Kurangnya sarana mobilitas dan anggaran operasional pada UPTD BLUD dalam rangka penagihan dan verifikasi lapangan yang mencakup 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sampai dengan 31 Desember 2020 tunggakan terhadap pokok adalah

sebesar Rp9.940.548.474,00 yang terdiri atas tunggakan terhadap pokok yang belum jatuh tempo yaitu pinjaman tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp3.797.834.500,00 dan tunggakan terhadap pokok yang sudah jatuh tempo pinjaman dari tahun 2003 s.d. 2017 sebesar Rp6.142.713.974,00. Dari hasil penatausahaan terhadap dana bergulir UMKM PPK-BLUD sebesar Rp12.000.000.000,00 sebagai investasi non permanen per 31 Desember 2020 diperoleh hasil penatausahaan terdiri atas penyisihan piutang sebesar Rp5.556.131.348,99, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp6.443.868.651,01 (Rp12.000.000.000,00 – Rp5.556.131.348,99)

b) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- **Lembaga Pengelola**

  Pengelolaan Dana Bergulir pada UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian adalah unit kerja yang telah ditetapkan dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; yang dalam hal ini UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagai PPK-BLUD.

  Dasar pembentukan dan penetapan unit kerja UPTD PMUBP menerapkan PPK-BLUD adalah :

  1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pola Tata Kelola , Renstra, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
  4. Peraturan Gubernur lampung Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang pertanian Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/436/B.V/HK/2011 Tanggal 8 Juni 2011 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 821.1/602/KDS/2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Operasional Barang Milik Daerah Provinsi

Lampung Pada Dinas Pertanian Tanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

7. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ/ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyatakan UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian tidak direkomendasikan.
8. Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nota Dinas Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor 900/261/VI.02/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Permintaan Audit Dana Bergulir.

- **Penggabungan Aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)**

  Proses penggabungan aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) pada SPKD lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebelum dilikuidasi/dibubarkan per 30 September 2019, telah dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan telah dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Rapat Tanggal 5 Juli 2011 di Ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Lampung Tentang Koordinasi Penataan BLUD lingkup sektor Pertanian kedalam UPTD BLUD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
  2. Rapat Tanggal 18 Agustus 2011 di Ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Lampung Tentang Tindak lanjut Koordinasi Penataan BLUD lingkup sektor Pertanian kedalam UPTD BLUD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
  3. Tanggal 11 Oktober 2011 di Ruang Rapat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tentang Penggabungan BLUD Bidang Pertanian, Dinas Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
  4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Penggabungan/Penyerahan Aset Dana Bergulir

- **Rekapitulasi Aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)**

  Aset dana bergulir yang saat ini dikelola oleh BLUD Unit kerja UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung merupakan Aset gabungan dari beberapa SKPD lingkup pertanian yaitu :

  1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  2. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
  3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung; dan
  4. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.

Jumlah aset investasi non permanen (dana bergulir) yang telah digabungkan dari 4 SKPD tersebut diatas terdiri dari :

Tabel 5.153 Jumlah Aset Investasi Non Permanen

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	
	● Dana Bergulir APBD Tahun 2006	4.780.000.000.00
	● Dana Bergulir APBD Tahun 2007	8.380.650.000.00
	● Pernyataan Modal Tahun 2014	300.000.000.00
2	Dinas Perkebunan :	
	● Dana Bergulir APBD Tahun 2006	1.425.000.000.00
	● Dana Bergulir APBD Tahun 2007	4.345.300.000.00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan:	
	●Dana Bergulir APBD Tahun 2007	1.145.000.000.00
4	Dinas Peternakan :	
	● Dana Bergulir APBD Tahun 2009	1.723.950.000.00
Jumlah		**22.099.900.000.00**

Dasar penggabungan aset tersebut diatas telah dituangkan dalam berita acara serah terima berita acara aset oleh masing-masing SKPD pengelola dana bergulir (Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan telah disetujui oleh Gubernur Lampung c.q. Sekretaris Daerah Lampung.

- **Penyerahan Aset**

  Aset yang akan digabung atau diserahterimakan kepada BLUD Dinas Pertanian adalah :

  1. Aset Investasi Non Permanen yang dikelola oleh SKPD Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada BLUD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  2. Dokumen pendukung aset yang diserahkan.
  3. Aset dana bergulir dipilah berdasarkan tingkat ketertagihannya (tertagih, diragukan tertagih dan tidak tertagih).
  4. Aset kategori tidak tertagih dan diragukan tertagih masih menjadi tanggungjawab pihak yang menyerahkan sampai aset tersebut dapat ditagih dan diserahkan ke BLUD (termasuk bila aset tersebut akan dihibahkan).
  5. Dalam rangka penanganan aset yang tidak tertagih (macet) akan diupayakan dilakukan penghibahan melalui pembentukan tim yang bertugas melakukan menginventarisasi dan menilai aset pasca dilakukan serah terima aset dana bergulir serta memberikan rekomendasi atas aset tersebut.

- **Perkembangan Aset Investasi Non Permanen**

Jumlah Aset Non Permanen yang dikelola BLUD Dinas Pertanian per Desember 2020 berjumlah Rp22.099.900.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir bersumber dari Dinas Perkebunan merupakan dana Perkuatan Modal Usaha kelompok (PMUK) kepada kelompok Tani/kelompok usaha dan lembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM-3) sebesar Rp1.425.000.000,00 pada Tahun 2006 dan sebesar Rp4.345.300.000,00 pada Tahun 2007. Atas penyaluran dana bergulir yang bersumber dari APBD tahun 2006 *tidak dikenakan bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman dana maksimal 3 tahun.*
   Dana bergulir dari APBD tahun 2007 wajib dikembalikan maksimal 4 tahun untuk PMUK penyambungan kopi dan rehap lada, 7 tahun untuk pengembangan karet rakyat dan 5 tahun untuk UPHKOPI SEMI BASAH. Penerima PMUK dana bergulir tahun 2007 dikenakan jasa pembinaan dan pengembangan kelompok 7% dari nilai bantuan yang diterima secara flat. Dana yang dikembalikan oleh anggota kelompok tani/kelompok usaha tidak disetorkan terlebih dahulu ke Dinas Perkebunan melainkan langsung digulirkan kembali oleh ketua kelompok tani/kelompok usaha kepada anggota yang lain.
   Perkembangan dana bergulir yang bersumber dari dinas perkebunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.770.300.000,- (terdiri dari piutang tertagih sebesar Rp 0,-, Piutang Memungkinkan tertagih Rp. 0,-, Piutang diragukan tertagih sebesar Rp. 0,-, dan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 5.770.300.000,-) (Piutang tidak tertagih Rp. 5.770.300.000) dari jumlah piutang tersebut per 31 Desember 2020 belum terdapat angsuran Pengembalian dari kelompok tani/kelompok usaha (0%).

   Adapun permasalahan piutang dana bergulir sebagai berikut :

   Perkembangan dan Permasalahan dana bergulir :

   a) TA 2006
      (1) Dana bergulir TA 2006 tidak wajib dikembalikan tetapi hanya bergulir di kelompok.
      (2) Dana bergulir TA 2006 tidak ada agunan
      (3) Piutang sudah lewat jatuh tempo (tidak tertagih)

   b) TA 2007
      (1) Dana bergulir TA 2007 jatuh tempo pada 2012, 2013, dan 2014
      (2) Dana bergulir tidak mungkin tertagih akibat tanaman kopi sebagian besar mati pada musim kemarau serta bibit ternak kambing mati
      (3) Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan pasca penyaluran.
      (4) Unit Pengolahan Hasil (UPH) kopi kurang berkembang.

2. Dana bergulir yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dana bergulir yang disalurkan kepada kelompok nelayan dari APBD TA 2007 sebesar Rp1.145.000.000,00. Dana tersebut digulirkan kepada 23 kelompok pembudidaya ikan pada 9 kabupaten/kota. Dana ini disalurkan dengan jangka waktu pengembalian selama 2 tahun/4 kali musim tanam sejak disalurkanya dana dan jatuh tempo pada tahun 2010 atas pinjaman dana, kelompok nelayan dikenakan jasa pembinaan sebesar 6 % per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah ada pengembalian dana dari kelompok nelayan sebesar Rp 124.900.000,-. Dan pembayaran jasa pembinaan sebesar Rp. 6.525.000,-. Pengembalian dana tersebut berasal dari 6 kelompok sedangkan jasa pembinaan berasal dari 2 kelompokJadi,terdapat jumlah tersisa nilai investasi pokok yang tidaktertagih atas 23 kelompok sebesar Rp. 1.020.100.000,-(Rp. 1.145.000.000- Rp. 124.900.000) dan sisa jasa pembinaan yang tidak tertagih sampai 30 Desember 2020 sebesar Rp. 62.175.000,00.

   Adapun permasalahan dana bergulir sebagai berikut :

   a) Terjadinya bencana banjir yang menyerang kolam pembudidaya ikan;
   b) Kegagalan panen karena terjadi serangan hama penyakit;
   c) Adanya dana pengembalian yang disetorkan oleh anggota pada ketua kelompok namun oleh ketua kelompok tidak disetorkan ke rekening BLUD;
   d) Pinjaman telah jatuh tempo (kategori piutang tak tertagih).
3. Dana bergulir bidang Peternakan merupakan penyaluran dana bergulir dalam bentuk ternak sapi pada kelompok tani pada tahun 2009 sebesar Rp1.343.550.000,00 perguliran ternak sapi ini melalui 2 kegiatan yaitu kegiatan bimbingan teknis untuk pembibitan dan penggemukan sapi dan kegiatan demplot pengembangan sapi dan jagung. Untuk kegiatan penggemukan sapi, petani harus mengembalikan dana bergulir penggemukan sapi paling lambat 31 Desember 2010 atau sekurang-kurangnya peternak telah melakukan kerja sama penggemukan sapi sebanyak 3 kali periode penggemukan dengan pembagian petani mendapat sebesar 80 % dari penambahan berat badan setelah dikurangi biaya operasional, dari hasil penggemukan tersebut diperoleh sebagai berikut :

   a) **Periode 1** :
      - Peternak mendapat pembagian Rp36.220.465,00
      - Pemerintah mendapat pembagian Rp274.927.160,00

   b) **Periode 2** :
      - Peternak mendapat pembagian Rp24.343.330,00
      - Pemerintah mendapat pembagian Rp296.728.870,00

   c) **Periode 3** :
      - Peternak mendapat pembagian Rp59.087.200,00

- Pemerintah mendapat pembagian Rp311.735.390,00

Untuk sapi pembibitan sebanyak 10 ekor betina disebarkan kepada kelompok "BUDIDAYA" kelompok budidaya Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah kepada 20 penggaduh untuk dikembangbiakan dengan perjanjian induk akan digulirkan ke anggota kelompok lain apabila sudah menghasilkan anak dan setelah 5 tahun induk akan dikembalikan ke pemerintah untuk saat ini jumlah ternak yang ada terdiri induk betina 20 ekor.

Sapi pejantan (pemacek) sebanyak 1 ekor ditempatkan di BIBD terbanggi besar Lampung tengah ternak pejantan ini berfungsi sebagai pemacek untuk diambil spermanya untuk dibuat semen beku untuk insenminasi buatan (kawin suntik).

Kegiatan ternak demplot pengembangan integrasi sapi dan jagung sebanyak 15 ekor jantan, dan 150 ekor betina disebarkan kepada 15 kelompok, dimana masing-masing kelompok menerima 1 ekor jantan dan 10 ekor betina yang disebarkan di 9 kabupaten/kota dalam perjanjian tiap kelompok berkewajiban mengembalikan 21 ekor anak setelah 5 tahun (1 ekor induk mengembalikan 2 ekor anak, 1 ekor pejantan dan induk mengembalikan 3 ekor anak, jumlah dan keberadaan ternak sampai 31 Desember 2014 yaitu jumlah induk 140 ekor (jantan 13 ekor, betina 127 ekor), anak sejumlah 80 ekor (jantan 16 ekor,betina 64 ekor). Dari kegiatan ternak pembibitan penggemukan dan pemacek sebesar Rp557.400.000,00, yang masuk dalam inventasi non permanen adalah 40 ekor sapi bakalan sebesar Rp356.400.000,00 dan pemacek (jantan) 1 ekor di UPTD BIBD nilai awal sebesar Rp24.000.000,00. Sedangkan 20 ekor sapi betina sebesar Rp177.000.000,00 sudah dihibahkan ke kelompok.

Investasi atas 40 ekor sapi bakalan sebesar Rp356.400.000,00 telah dilakukan 3 kali periode penggemukan dimana pembagian keuntungan kepada pemerintah sebesar Rp311.735.390,00. Dari hasil pembagian pemerintah tersebut telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp311.735.390,00 sesuai bukti setor pada tanggal 7 Februari 2012. Jadi terdapat jumlah sisa nilai investasi (kemungkinan tertagih dan tidak tertagih) sebesar Rp1.343.550.000,00 (Rp1.723.950.000,00 – Rp311.735.390,00 – Rp44.664.610,00 – 24.000.000,00). Rincian sebagai berikut :

a) Ternak Sapi Bakalan (jantan atau penggemukan) telah dilakukan penjualan dengan bagi hasil ke Pemerintah sebesar Rp311.735.390,00 (telah disetor ke Kas Daerah).
b) Hasil Penjualan terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan ke Pemerintah (terjadi kerugian) sebesar Rp44.664.610,00
c) Persediaan sapi pemacek/pejantan sebesar Rp24.000.000,00

Dari dana yang digulirkan pada tahun 2009 ke 16 Poktan yang tersebar di 9 Kabupaten diwilayah Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.343.550.000,00 terdapat pengembalian dana bergulir dari pokok ditahun 2014 yang terdiri dari1 kelompok tani dikabupaten Tanggamus sebesar Rp. 77.700.000,00 dan 3 kelompok dikabupaten Lampung Tengah sebesarp. 177.000.000,00 . (Rp. 77.700.000,00+ Rp. 177.000.000,00 = Rp. 254.770.000,00) terdapat nilai investasi pokok yang tidak tertagih sebesar Rp. 1.088.780.000,00.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pengembalian dana bergulir darai BLUD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebesar Rp. 254.770.000,00.

4. Dana bergulir yang bersumber dari Dinas Pertanian TPH menyalurkan dana bergulir kepada kelompok tani dan LUEP sejak tahun 2006. Dana yang disalurkan bersumber dari APBD Provinsi Lampung TA 2006 sebesar Rp4.780.000.000,00, APBD TA 2007 sebesar Rp8.380.650.000,00 dan Dana Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp300.000.000,00.

   Pada Tahun 2006 dana PMUK bergulir disalurkan kepada 96 kelompok tani di 42 desa pada 8 kabupaten/kota. Jangka Waktu Pengembalikan selama 1 Tahun (12 Bulan) sejak tanggal transfer. Jatuh tempo pengembalian dana ini pada bulan Desember 2007.

   Untuk Dana Bergulir pada Tahun 2006 sampai dengan September 2019 jumlah pengembalian dana oleh kelompok tani sebesar Rp2.699.400.000,00 (56,47%), sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp2.080.600.000,00 (Rp4.780.000.000,00 - Rp2.699.400.000,00).

   Tahun 2007 alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp8.380.650.000,00 diperuntukan pengadaan saprodi. Dana disalurkan kepada kelompok tani dan LUEP berjumlah 164 yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Jangka waktu pengembalian dana selama 1 tahun (12 bulan) sejak tanggal transfer jatuh tempo pengembalian dana ini pada bulan Desember 2008. Sampai dengan September 2019 dana yang telah dikembalikan oleh kelompok tani dan LUEP sebesar Rp1.498.150.000,00 (17,88%), sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp6.882.500.000,00 (Rp8.380.650.000,00 – Rp1.498.150.000,00).

   Sejak tahun 2008 pengelola dana PMUK telah menggulirkan kembali pengembalian dana (*revolving*) sebanyak 11 periode perguliran yaitu tahun 2008, 2009,2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan total perguliran sebesar Rp22.745.317.000,00. Jangka waktu pengembalian dana selama 1 tahun (12 bulan) sejak tanggal transfer dana ke rekening kelompok tani.

   Sampai dengan 31 Desember 2020 dana PMUK yang telah disalurkan seluruhnya (TA. 2006 sampai dengan 2020sebesar Rp. 44.164.817.500,-(sudah termasuk Sub bidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunaan dengan total pengembalian angsuran Pokoksebesar

Rp. 22.647.147.500,00 (51%), Angsuran jasa sebesar Rp. 1.834.178.250,00 . Untuk sisa pinjaman pokok dan jasa masing-masing (pokok Rp. 21.166.670,00 dan jasa Rp. 474.074.500,00)Jadi tedapat tunggakan angsuran dari hasil pengguliran TA. 2006 sampai dengan TA 2020 yang kemungkinan dapat tertagih sebesar Rp. 2.025.000.000,00, Memungkinkan tertagih sebesar Rp. 777.000.000,00, Diragukan untuk ditagih sebesar Rp. 153.000.000,00 dan tidak tertagih sebesar Rp. 18.211.670.000,00.

Keseluruhan dana bergulir yang dicatat sebagai investasi non permanen (dana bergulir) pada BLUD UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian TPH Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 44.164.817.500,00 (terdiri dari Pertanian sebesar Rp. 35.905.967.500,00 Perkebunan sebesar Rp. 5.770.300.000,00, Perikanan dan kelautan sebesar Rp. 1.145.000.000,00, dan Peternakan sebesar Rp. 1.343.550.000,00.

Pengembalian terhadap pokok dana bergulir tersebut sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 22.647.147.500,00 (51%) dari batas akhir jatuh tempo TA. 2020, (terdiri dari Pertanian sebesar Rp. 22.647.147.500,00 Perkebunan sebesar Rp. 0,00, Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 124.900.000,00, Peternakan dan Kesehatan hewan sebesar Rp. 254.770.000,00 sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp. 21.166.670.000,00 dan jasa sebesar Rp. 474.074.500,00

2) **Investasi Permanen**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
478.428.122.265,99	**416.622.720.792,18**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp475.451.925.265,99 dan Rp413.646.523.792,18. Peningkatan penyertaan modal pada Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2020 berasal dari peningkatan penyertaan modal saham pada PT Bank Lampung. Adapun rincian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 5.154 Daftar Investasi Permanen Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Investasi	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
I. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH			
1	PT Bank Lampung	434.313.693.573,34	368.100.795.957,57
2	PT Wahana Raharja	8.352.566.061,09	10.123.070.740,05
3	PT Lampung Jasa Utama	32.785.665.631,56	35.422.657.094,56
	Jumlah I	**475.451.925.265,99**	**413.646.523.792,18**
II. INVESTASI PERMANEN LAINNYA			
4	PT Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	1.074.211.000,00
5	Asuransi Bangun Askrida	500.000.000,00	500.000.000,00
6	PT Kawasan Industri Lampung	401.996.000,00	401.986.000,00
7	PT Riau Airlines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

a) **Penyertaan Modal Pemerintah**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
475.451.925.265,99	**413.646.523.792,18**

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp475.451.925.265,99 dan Rp413.646.523.792,18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Investasi	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	PT Bank Lampung	434.313.693.573,34	368.100.795.957,57
2	PT Wahana Raharja	8.352.566.061,09	10.123.070.740,05
3	PT Lampung Jasa Utama	32.785.665.631,56	35.422.657.094,56
Jumlah I		**475.451.925.265,99**	**413.646.523.792,18**

Atas pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung di atas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

(1) Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT.Bank Lampung

Berdasarkan laporan *Unaudited* yang disampaikan PT Bank Lampung (**Lampiran 4**) jumlah keseluruhan modal disetor per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp434.313.693.573,34. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung, 15 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Lampung serta direksi dan karyawan PT Bank Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, saham/modal pemerintah yang ada pada PT Bank Lampung ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Pasal 7 ayat 2 huruf a). Sedangkan sampai 31 Desember 2020 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan sertifikat saham sudah mencapai Rp104.039.620.000,00. Dengan demikian persentase kepemilikan atas modal disetor yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar 35,79%.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar antara 20% sampai 50% atau jika

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan maka atas kepemilikan penyertaan modal tersebut menggunakan metode ekuitas dalam penilaiannya. Dari ketentuan tersebut, secara lebih lengkap dijelaskan pula bahwa dalam kondisi tertentu kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Adapun ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain meliputi:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PT Bank Lampung, selain nilai kepemilikan atas penyertaan modal antara 20% sampai 50%. Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki peran yang cukup signifikan pada PT Bank Lampung selaku perusahaan *investee*, terutama dalam penentuan direktur utama dan pergantian kepengurusan pada PT Bank Lampung. Atas dasar tersebut, maka sejak Tahun 2011 penilaian investasi pada PT Bank Lampung menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT Bank Lampung dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Bank Lampung Tahun 2020 *unaudited*, besarnya laba bersih yang diperoleh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan besarnya deviden tunai PT Bank Lampung yang diberikan ke Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.156 Daftar Investasi Bank Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Laba Bersih PT Bank Lampung	192.617.020.316,00	147.532.615.495,00
Deviden Tunai	29.729.274.051,14	27.510.730.057,92
Persentase Kepemilikan Modal Saham	35,79%	31,72%

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode equity *(equty method)*. atas persentase modal saham Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157 Daftar Investasi Awal Bank Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Investasi awal	368.100.795.957,57	366.035.560.896,62
Kepemilikan Tahun 2019 = 31,72% (31,72% X Rp 147.532.615.495,00)		
Kepemikikan Tahun 2020 =35,79% (35,79% X Rp 192.617.020.316,00)	68.942.171.666,91	46.796.202.992,93
Deviden	(29.729.274.051,14)	(27.510.730.057,92)
Koreksi Terlalu Besar mencatat investasi awal		(17.220.237.874,06)
Penyertaan Modal	27.000.000.000,00	-
Investasi akhir	**434.313.693.573,34**	**368.100.795.957,57**

Nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2020 yang tercatat di Laporan Keuangan tahun 2019 sebesar Rp68.942.171.666,91 (35,79% x Rp192.617.020.316,00) merupakan nilai Laba PT Bank Lampung. Pada Tahun 2020 ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp56.000.000.000,00, namun yang telah disahkan menjadi tambahan modal tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui RUPS PT. Bank Lampung sebesar Rp27.000.000.000,00.

Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Wahana Raharja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 pasal 9 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Wahana Raharja adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud yang tercatat dalam neraca keuangan (*audited*) pada saat perubahan bentuk badan hukum PD Wahana Raharja menjadi PT Wahana Raharja disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar perseroan.

Perusahaan Daerah Wahana Raharja telah berubah menjadi PT Wahana Raharja melalui Akta Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. Nomor 166 tanggal 29 November 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHV-03224.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2019 (**Lampiran 5**) nilai modal disetor Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebesar Rp19.563.000.000,00 dari total modal disetor sebesar Rp19.558.000.000,00 dan tunai dari PT Wahana Raharja sebesar Rp35.000.000,00 dengan besarnya presentase kepemilikan tahun 2020 sebesar 99,97% maka jumlah nilai penyertaan modal per 31 Desember 2020 adalah sebesar:

Tabel 5.158 Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Laba/Rugi Bersih	(1.507.190.668,67)	(1.300.671.059,00)
Deviden Tunai	-	-
Persentase Kepemilikan		
Modal Ditempatkan	19.563.000.000,00	19.563.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Provinsi	19.558.000.000,00	19.558.000.000,00
%	99,97	99,97

Tabel 5.159 Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Investasi Awal	10.123.070.740,05	6.522.511.936,71
Nilai Lab/Rugi yang diperhitungkan	(1.506.805.454,06)	(1.300.338.627,61)
Deviden yang diterima		
Koreksi kurang mencatat investasi awal	(263.699.224,90)	(649.102.569,05)
Tambahan Penyertaan Modal	-	5.550.000.000,00
Jumlah	8.352.566.061,09	10.123.070.740,05

Berdasarkan laporan keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2020 (*unaudited*) (**Lampiran 6)**, PT Wahana Raharja mengalami kerugian yang mengurangi saldo investasi sebesar Rp1.507.190.668.67.

Nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2019 yang tercatat di Laporan Keuangan tahun 2019 sebesar Rp1.300.338.627,61 (99,97% x Rp1.300.671.059,00) merupakan nilai Rugi PT Wahana Raharja sebelum audit. Nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2019 setelah audit sebesar Rp1.564.037.852,51 (99,96% x Rp1.564.437.698,57). Sehingga nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2019 terlalu kecil sebesar Rp263.699.224,90 (Rp1.564.037.852,51-1.300.338.627,61) dan perlu dilakukan koreksi terhadap investasi awal tahun 2020. Sehingga saldo akhir investasi permanen pada PT Wahana Raharja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.352.566.061,09

(2) Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Lampung Jasa Utama

Investasi permanen Pemerintah ProvinsiLampung pada PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.160 Daftar Investasi PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Laba/Rugi Bersih	(2.633.615.433,00)	8.844.972,00
Deviden Tunai	3.430.654,00	-
Persentase Kepemilikan	100,00%	100,00%
Modal Ditempatkan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Provinsi	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
%	100,00	100,00

Tabel 5.161 Daftar Investasi PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Investasi Awal	35.422.657.094,56	25.630.277.927,17
Nilai Laba/Rugi yang diperhitungkan	(2.633.615.433,00)	8.844.972,00
Deviden	(3.430.654,00)	(47.260.947,00)
Koreksi terlalu besar mencatat investasi awal	54.624,00	(169.204.857,62)
Tambahan Penyertaan Modal	-	10.000.000.000,00
Saldo Akhir Penyertaan Modal	32.785.665.631,56	35.422.657.094,55

Berdasarkan laporan keuangan PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2020 (*unaudited*) (**Lampiran 6)**, PT Lampung Jasa Utama mengalami kerugian sebesar Rp2.633.615.433,00. Pada Tahun 2020 PT Lampung Jasa Utama membagikan Dividen sebesar Rp3.430.654,00.

Nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2019 yang tercatat di Laporan Keuangan tahun 2018 sebesar Rp8.844.972,00 merupakan nilai Laba PT Lampung Jasa Utama sebelum audit. Nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2019 setelah audit sebesar Rp8.899.596,00. Sehingga nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2019 terlalu kecil sebesar Rp54.624,00 (Rp8.899.596,00 - Rp8.844.972,00) dan perlu dilakukan koreksi terhadap investasi awal tahun 2020. Sehingga saldo akhir investasi permanen pada PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.785.665.631,56.

b) **Investasi Permanen Lainnya**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2.976.197.000,00	**2.976.197.000,00**

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.976.197.000,00 dan Rp2.976.197.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.162 Daftar Investasi Permanen Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Investasi	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	PT Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	1.074.211.000,00
2	Asuransi Bangun Askrida	500.000.000,00	500.000.000,00
3	PT Kawasan Industri Lampung	401.986.000,00	401.986.000,00
4	PT Riau Airlines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		**2.976.197.000,00**	**2.976.197.000,00**

Nilai Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2019. Secara ringkas, mutasi penambahan dan pengurangan Investasi Permanen Tahun 2020, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.163 Rekapitulasi Investasi Permanen per 31 Desember 2020

No.	Investasi (Rp)	Saldo Awal		Penambahan Investasi Permanen Th 2020	Pengurangan Investasi Permanen Th 2020	Saldo Akhir		Nilai Investasi hasil konfirmasi (Rp)
		Nilai (Rp)	Kepemilikan			Nilai (Rp)	Kepemilikan	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah							
1	PT. Bank Lampung	368.100.795.957,568	31,72	68.942.171.666,912	29.729.274.051,140	407.313.693.573,340	35,79	407.313.693.573,34
2	PT. Wahana Raharja	10.123.070.740,053	99,97	0,00	1.770.504.678,964	8.352.566.061,089	99,97	8.352.566.061,09
3	PT. LJU	35.422.657.094,56						
	Investasi Permanen Lainnya							
1	PT. Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	5,63	0,00	0,00	1.074.211.000,000		1.074.211.000,00
2	Asuransi Bangun As	500.000.000,000	0,13	0,00	0,00	500.000.000,000		500.000.000,00
3	PT Kawasan Industri	401.986.000,000	4,64	0,00	0,00	401.986.000,000		401.986.000,00

Data perhitungan Investasi Permanen, selalu mengalami koreksi dikarenakan laporan keuangan yang disampaikan oleh *Investee* pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan *Unaudited*

c. **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 secara keseluruhan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.164 Rincian Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

1) Nilai Saldo Awal Aset Tetap TA 2020
2) Penambahan Aset Tetap selama TA 2020, meliputi:
   a) Belanja Modal TA. 2020;
   b) Belanja Barang Jasa yang memenuhi kriteria kapitalisasi;
   c) Belanja Tak Terduga yang memenuhi kriteria kapitalisasi;
   d) Penilaian Aset;

e) Hibah dari Pihak Lain;
f) Donasi dari Pihak Lain terkait Penanganan Covid-19;
g) Reklasifikasi Aset;
h) Temuan /pencatatan baru;
i) Bertambah Akibat Lain-Lain.

3) Pengurangan Aset Tetap selama TA 2020
a) Hibah ke Pihak Lain;
b) Penghapusan;
c) Reklasifikasi Aset.

Uraian Nilai Aset Tetap berdasarkan perhitungan tabel diatas sebagai berikut:

1) **Nilai Saldo Neraca Aset Tetap Per 31 Desember 2019**

Saldo Neraca Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.764.592.008.041,70 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp4.180.870.386.102,32 sehingga nilai buku per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.583.721.621.939,36 (*audited*).

Pada TA 2020, terdapat perubahan nomenklatur terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung. Penerapan peraturan dimaksud mengakibatkan terjadinya pemisahan dan penggabungan aset pada Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, namun pemisahan dan penggabungan aset ini tidak mengakibatkan perubahan saldo awal pada aset tetap milik Pemerintah Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel hasil rekonsiliasi Pisah Gabung Aset sebagai berikut :

Tabel 5.165 Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Pisah Gabung TA 2020

KIB	URAIAN ASET	SALDO 31 DES 2019		PISAH GABUNG 2020				SALDO PISAH GABUNG 2020	
				PENAMBAHAN		PENGURANGAN			
		JUMLAH BARANG	NILAI	JUMLAH BARANG	NILAI	JUMLAH BARANG	NILAI	JUMLAH BARANG	NILAI
A.	TANAH	1.077	842.778.681.739,03	357	502.340.400.361,00	357	502.340.400.361,00	1.077	842.778.681.739,03
B.	PERALATAN DAN MESIN	363.113	1.775.009.788.978,76	90.890	218.115.780.468,50	90.890	218.115.780.468,50	363.113	1.775.009.788.978,76
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.292	3.012.518.366.951,73	3.346	787.263.907.317,78	3.346	787.263.907.317,78	10.292	3.012.518.366.951,73
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.883	6.238.558.950.839,92	848	1.950.697.296.776,00	848	1.950.697.296.776,00	2.883	6.238.558.950.839,92
E.	ASET TETAP LAINNYA	3.811.742	213.456.699.347,49	1.309.972	61.466.783.033,64	1.309.972	61.466.783.033,64	3.811.742	213.456.699.347,49
F.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	156	682.269.520.184,75	15	33.123.683.970,00	15	33.123.683.970,00	156	682.269.520.184,75
	JUMLAH	**4.189.263**	**12.764.592.008.041,70**	**1.405.428**	**3.553.007.851.926,92**	**1.405.428**	**3.553.007.851.926,92**	**4.189.263**	**12.764.592.008.041,70**

2) **Penambahan Aset Tetap selama TA 2020**

Rincian penambahan asset tetap berupa:

Tabel 5.166 Rincian Penambahan TA 2020

Keterangan Perolehan	Nilai (Rupiah)
Belanja Modal yang Dikapitaisasi sebagai Aset	658.275.408.448,00
Retensi dibayarkan tahun 2021	26.512.113.577,34
Belanja Barang Jasa Dikapitalisasi sebagai Aset	23.625.175.118,44
Belanja Tak Terduga Dikapitalisasi sebagai Aset (Penanganan Covid-19)	21.698.882.513,29
Appraisal	1.395.463.999.901,00
Hibah dari Pihak Lain	76.191.498.279,59
Donasi Covid-19	7.827.212.229,00
Reklasifikasi Aset	5.945.708.168,00
Temuan (Pencatatan Baru)	10,00
Bertambah Akibat Lain-Lain	633.091.000,00
JUMLAH	2.216.173.089.244,66

e) **Belanja Modal TA 2020**

Nilai Belanja Modal TA 2020 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp752.528.210.219,89 atau mengalami penurunan sebesar Rp261.509.313.801,50 atau 25,79% dari Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp1.014.037.524.021,39, Nilai Realisasi Belanja Modal pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebesar Rp752.528.210.219,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167 Nilai Realisasi Belanja Modal Per OPD TA 2020

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	291.192.064.735,00
2	Dinas Kesehatan	7.662.109.464,00
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	77.881.224.140,89
4	Rumah Sakit Jiwa	8.486.691.024,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	265.355.433.725,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	39.674.254.343,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	24.219.482.162,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	136.611.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana	247.550.000,00
10	Dinas Sosial	710.196.600,00
11	Dinas Tenaga Kerja	30.910.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	362.565.080,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	93.682.000,00
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	198.622.375,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	291.402.900,00
16	Dinas Perhubungan	792.207.000,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.743.088.947,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	73.010.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	373.278.500,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.287.333.900,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	901.980.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	980.543.070,00
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	46.708.500,00
24	Dinas Ketahanan Pangan TPH	1.333.430.770,00
25	Dinas Perkebunan	128.830.300,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.291.723.135,00
27	Dinas Kehutanan	463.983.919,00

Sementara berdasarkan data hasil Rekonsiliasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh nilai belanja modal yang dapat diakui sebagai aset adalah sebesar Rp658.275.408.448,00 dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.168 Realisasi Belanja Modal yang diakui sebagai aset per 31 desember 2020

NO	Perangkat Daerah (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	283.096.735.492,00
2	Dinas Kesehatan	7.151.786.384,00
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	72.776.835.419,00
4	Rumah Sakit Jiwa	7.776.342.971,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	228.539.340.892,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	17.024.830.470,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	11.036.745.712,00
8	Badan Penanggulangan Bencana	247.550.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	136.611.000,00
10	Dinas Sosial	682.784.500,00
11	Dinas Tenaga Kerja	30.910.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	340.967.980,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	93.682.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.655.375,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	290.568.900,00
16	Dinas Perhubungan	112.653.088,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.663.823.000,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	71.800.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	354.758.500,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.642.040.500,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	804.080.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	977.318.070,00

hasil rekonsiliasi aset tetap terhadap LRA Pemerintah Provinsi Lampung, hal tersebut dikarenakan terdapat realisasi belanja modal yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap.

Tabel 5.169 Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal TA 2020

No	Kualifikasi	Nilai (Rp)
1	Aset Intrakomtabel (Aset Tetap)	658.275.408.448,00
2	Aset Ekstrakomtabel	4.064.475.852,00
3	Aset Lain-lain	
4	Aset Tidak Berwujud	1.202.413.500,00
5	Hibah Kepada Pihak Lain	28.101.823.072,00
6	Pembayaran Hutang Retensi TA 2019	40.244.709.809,89
7	Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	
	- Barang Habis Pakai	3.078.996.450,00
	- Beban Lain-lain	17.560.383.088,00
	Jumlah	**752.528.210.219,89**

Selain Belanja Modal sebagaimana tersebut diatas, terdapat penambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari :

b) **Retensi**

Retensi merupakan anggaran pemeliharaan aset yang akan dibayarkan melalui belanja pada tahun berikutnya. Retensi TA 2020 yang akan dibayarkan pada TA 2021 dan sudah dikapitalisasi/diakui sebagai aset adalah sebesar Rp26.512.113.577,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170 Daftar Retensi TA 2020

No.	Nama OPD	Nilai (dalam Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	381.843.003,34
2	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	1.277.749.655,00
3	Rumah Sakit Jiwa	25.025.022,00
4	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	22.844.084.477,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	825.097.120,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.134.689.800,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.885.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultur	13.739.500,00
	Jumlah	**26.512.113.577,34**

c) **Belanja Barang Jasa yang Dikapitalisasi Sebagai Aset**

Aset tetap yang diperoleh dari belanja barang jasa yang dapat diakui sebagai Aset tetap (Aset Intrakomtabel) adalah sebesar Rp23.625.175.118,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171 Daftar Aset Intrakomtabel dari Belanja Lain-lain TA 2020

No.	Nama OPD	Nilai Kapitalisasi Aset dari Belanja Lainnya
1	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.313.653.696,00
2	Sekretariat Dinas Kesehatan	1.730.301.343,19
3	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	3.095.791.900,00
4	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	595.748.724,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.862.451.350,00
6	Dinas Pengelola Sumber daya Air	3.682.999.126,25
21	Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000,00
	Dinas Komunikasi, informatika dan statistik	199.800.000,00
8	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	2.195.613.000,00
20	Sekretariat Dinas Pariwisata	605.340.360,00
13	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	817.455.019,00
14	Sekretariat Dinas Perkebunan	249.989.000,00
12	Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.298.000,00
1	Dinas Kehutanan	79.900.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.520.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	225.200.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	839.077.600,00
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	784.253.000,00
15	Badan Penghubung di Jakarta	9.500.000,00
16	Biro Umum	149.583.000,00
17	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40.300.000,00
18	Sekretariat DPRD	48.900.000,00
	JUMLAH	23.625.175.118,44

(d) Belanja Tak Terduga Dikapitalisasi Sebagai Aset

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat Belanja Tak Terduga (BTT) yang dibelanjakan sebagai aset untuk penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp21.698.882.513,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172 Belanja Tak Terduga Penanganan Covid-19 Dibelanjakan sebagai Aset

No	OPD	Nilai Kapitalisasi Aset dari BTT covid-19
1	Dinas Kesehatan	2.968.510.869,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	406.379.000,00
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	796.507.000,00
4	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	13.806.168.179,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.721.317.465,29
	Jumlah	**21.698.882.513,29**

(e) Penilaian Aset (*Appraisal*)

Hasil Penilaian *(appraisal*) terhadap aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang masih bernilai Rp1,00 sebesar Rp1.395.463.999.901,00

Tabel 5.173 Hasil Penilaian (*appraisal)* terhadap aset TA 2020

NO	ASET TETAP	NILAI APPRAISAL
	Tanah	1.395.463.999.901,00
	Peralatan dan Mesin	
	Gedung dan Bangunan	
	Jalan, irigasi dan Jaringan	
	Aset Tetap lainnya	
	JUMLAH	**1.395.463.999.901,00**

(f) Hibah dari Pihak Lain

Aset tetap yang diperoleh dari hibah dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi Lampung pada TA 2020 adalah sebesar Rp76.191.498.279,59 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.174 Aset tetap yang diperoleh dari hibah dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi Lampung pada TA 2020

NO	ASAL	NILAI (Rp)
1	Hibah Komite Sekolah	2.163.321.060,00
2	Hibah dari Kementerian Pendidikan	10.805.138.339,00
3	Hibah Kementerian Pendidikan *(center of excellent)*	15.080.204.896,00
4	Hibah dari panitia pembangunan masjid	1.400.000.000,00
5	Hibah dari kementerian kesehatan	31.085.752.259,00
6	Hibah dari kabupaten lampung selatan (DBH)	13.352.944.684,59
7	Hibah dari Kementerian Sosial	20.700.000,00
8	Hibah Kementerian Ketenagakerjaan	696.472.614,00
9	Hibah dari PT. BUKIT ASAM	459.500.000,00
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	1.000.573.375,00
11	Hibah Kampung	126.891.052,00
	JUMLAH	**76.191.498.279,59**

(g) Donasi Covid-19

Pada TA 2020 terdapat penambahan aset yang berasal dari donasi berbagai pihak untuk penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung dengan total nilai wajar pada saat perolehan senilai Rp7.827.212.229,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.175 Aset tetap yang diperoleh dari Donasi Penanganan Pandemi Covid-19

NO	ASAL	NILAI (Rp)
1	Bantuan Bank Indonesia	5.685.885,00
2	Donasi Dari OJK Otoritas Jasa Keuangan	5.685.885,00
3	Donasi Dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung	5.685.885,00
4	PT. BUKIT ASAM	273.501.000,00
5	DONASI DARI ILUNI UI	841.551.429,00
6	Yayasan Temasek Singapura	39.000.000,00
8	PT Pertamina Trainer Consulting	163.667.947,00
7	KEMENTRIAN KESEHATAN	5.734.804.198,00
9	PT. Prima Citra Inovindo	757.630.000,00
	JUMLAH	**7.827.212.229,00**

(h) Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi merupakan koreksi pencatatan terhadap aset akibat adanya perubahan pencatatan aset, baik akibat perubahan pencatatan bidang barang maupun koreksi kualifikasi aset. Pada TA 2020 terdapat reklasifikasi aset bertambah sebesar Rp5.945.708.168,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan Aset dari Aset KDP ke Aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.176 Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

NO	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Gedung Hall B Way Halim	3.219.053.000,00
2	Pembangunan Hall B PKOR Way Halim (Lanjutan)	510.141.000,00
3	Rehab Gedung Hall B Way Halim	475.157.390,00
4	Gerbang Kota Baru	1.741.356.778,00
	JUMLAH	5.945.708.168,00

(i) Temuan / Pencatatan Baru

Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp.10,00 yang berasal dari pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum tercatat pada Buku Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.177 Tanah, Gedung dan bangunan yang belum tercatat Pada TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

(j) Bertambah Akibat Lain-Lain

Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp633.091.000,00 dari penambahan akibat lain-lain pada TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi Aset dari Persediaan Hibah TA 2019 menjadi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung senilai Rp30.350.000,00 berupa alat keselamatan kerja.
- Pencatatan Aset Bertambah pada SLB PKK Provinsi Lampung TA 2020 senilai Rp18.350.000,00
- Pencatatan Aset Hasil Penggantian Gedung Mess Perhubungan yang terkena Pembebasan Jalan Tol dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : UM.01.11/05415-AP/271020-5 senilai Rp584.391.000,00

3) **Penguragan Aset Tetap selama TA 2020**

Terdapat pengurangan aset senilai Rp10.524.667.229,00 dengan Rincian pengurangan aset tetap berupa:

Tabel 5.178 Rincian Pengurangan TA 2020

Keterangan	Nilai (Rupiah)
Hibah ke Pihak Lain	2.445.773.627,00
Penghapusan TA 2020	1.491.479.434,00
Reklasifikasi Aset	6.587.414.168,00
JUMLAH	10.524.667.229,00

(a) Hibah ke Pihak Lain

Terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp2.445.773.627,00 berupa hibah kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.179 Hibah ke Pihak Lain TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

(b) Penghapusan TA 2020

Terdapat penghapusan aset senilai Rp1.491.479.434,00 pada TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.180 Penghapusan TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

(c) Berkurang Akibat Reklasifikasi Aset

Terdapat reklasifikasi aset berkurang senilai Rp6.587.414.168,00 pada TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi Pencatatan dari KDP ke KIB C pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air senilai Rp5.945.708.168,00
- Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset eks. KORPRI yang tidak ditemukan senilai Rp159.927.000,00
- Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap usulan penghapusan aset pada SMAN 3 Metro senilai Rp312.793.000,00
- Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMAN 1 Sekampung Udik senilai Rp86.600.000,00
- Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMKN 1 Kota Agung Timur senilai Rp78.000.000,00
- Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke Persediaan Pakai Habis terhadap barang berupa service Model pada SMAN 14 Bandar Lampung senilai Rp4.386.000,00
-

Uraian masing – masing per jenis Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016, sejak Tahun 2015 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Nilai Aset Intrakomtabel berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Renovasi sudah disusutkan berdasarkan masa manfaat yang telah ditentukan, dan nilai aset berupa Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Nilai Aset Tetap Intrakomtabel Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020 sebesar Rp14.970.240.430.057,30 merupakan hasil penambahan dan pengurangan yang

terjadi pada tahun 2020 terhadap nilai Saldo Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.764.592.008.041,70 Penambahan dan Pengurangan Aset yang terjadi pada TA 2020 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.181 Penambahan dan Pengurangan Aset Intrakomtabel

KIB	ASET TETAP	SALDO 31 DES 2019	MUTASI 2020		SALDO 31 DES 2020
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
A.	TANAH	842.778.681.739,03	1.399.345.382.609,00	7.310.780,00	2.242.116.753.568,03
B.	PERALATAN DAN MESIN	1.775.009.788.978,76	318.178.305.645,00	946.953.000,00	2.092.241.141.623,76
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.012.518.366.951,73	163.138.331.049,48	3.624.695.281,00	3.172.032.002.720,21
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.238.558.950.839,92	281.475.005.496,18	-	6.520.033.956.336,10
E.	ASET TETAP LAINNYA	213.456.699.347,49	27.406.851.145,00	-	240.863.550.492,49
F.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	682.269.520.184,75	26.629.213.300,00	5.945.708.168,00	702.953.025.316,75
	J U M L A H	**12.764.592.008.041,70**	**2.216.173.089.244,66**	**10.524.667.229,00**	**14.970.240.430.057,34**

1) **Tanah**

Rincian Nilai Tanah (Aset Tetap) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.182 Rincian Nilai Tanah per 31 Desember 2020

EMBED Excel.Sheet.12

Tanah yang tercatat dalam Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.242.116.753.568,03 atau mengalami kenaikan/bertambah sebesar Rp1.399.338.071.829,00 atau 166,04% dari nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp842.778.681.739,03*(audited)*, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan pada tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut:

a) Penambahan TA 2020 sebesarRp1.399.345.382.609,00 yaitu berupa :

(1) Belanja Modal sebesar Rp3.632.712.750,00 yang merupakan pembelian tanah SMKN 6 Bandar Lampung seluas 6.687 m2. Pembelian tanah ini merupakan tindak lanjut terhadap LHP BPK RI terkait 10 gedung milik SMKN 6 Bandar Lampung dan dibangun di atas tanah warga yang berpotensi terjadi sengketa dengan pihak lain.

(2) Belanja barang jasa senilai Rp76.778.900,00 yang merupakan belanja *appraisal* terhadap pembelian tanah SMKN 6 Bandar Lampung.

(3) Hibah sebesar Rp171.891.052,00 yang terdiri dari:

- Hibah Tanah Bangunan Kantor Cabdin Wilayah VII dari Masyarakat Kampung Panca Mulya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang seluas : 12.500 m2, senilai Rp1,00;
- Hibah Tanah dari Komite SMKN 1 Sukoharjo (Pringsewu) untuk Kantin Sekolah seluas 630 M2 senilai Rp25.000.000,00.
- Hibah Tanah dari Komite SMKN 1 Bakauheni (Lampung Selatan) seluas 1.065 M2 senilai Rp20.000.000,00.

- Hibah Tanah dari Kampung Umpu Kencana kepada SMAN 3 Blambangan Umpu (Way Kanan) seluas 15.390 M2 senilai Rp110.038.500,00 dan seluas 2.357 M2 senilai Rp16.852.550,00
- Hibah Tanah kepada SMKN 1 Purbolinggo dari Masyarakat Desa Tegal Gondo, Kab Lampung Timur seluas : 15.000 m2, senilai Rp1,00

(4) Penilaian Aset (*Appraisal)* terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang masih bernilai Rp1,00 sebesar Rp1.395.463.999.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penilaian terhadap tanah di bawah jalan pada 87 ruas jalan Provinsi dengan total nilai Rp1.390.691.599.913,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.183 Hasil *Appraisal* Tanah di Bawah Jalan TA 2020

No	Nama Barang	Luas(m2)	Nilai Awal	Nilai Appraisal	Nilai Total
1	Tanah Ruas Jalan Ikan Tenggiri Kota Bandar Lampung (R.041.11)	1146	1	10.483.999.999,00	10.484.000.000,00
2	Tanah Ruas Jalan R.E. Martadinata Kota Bandar Lampung (R.041.12)	72625	1	103.459.899.999,00	103.459.900.000,00
3	Tanah Ruas Jalan Ryacudu Kota Bandar Lampung (R.012.11)	105965	1	293.647.699.999,00	293.647.700.000,00
4	Tanah Jalan Ruas Gedong Tataan - Kedondong (R.038)	192390	1	7.032.399.999,00	7.032.400.000,00
5	Tanah Jalan Ruas Padang Cermin - Sp. Teluk Kiluan (R.043)	355278	1	4.838.299.999,00	4.838.300.000,00
6	Tanah Jalan Ruas Kalirejo - Pringsewu (R.033)	155293	1	8.268.999.999,00	8.269.000.000,00
7	Tanah Jalan Ruas Pringsewu - Pardasuka (R.034)	169173	1	96.209.599.999,00	96.209.600.000,00
8	Tanah Jalan Ruas Pardasuka - Sukamara (R.035)	54475	1	1.213.999.999,00	1.214.000.000,00
9	Tanah Jalan Ruas Branti - Gedong Tataan (R.037)	242592	1	8.199.999.999,00	8.200.000.000,00
10	Tanah Jalan Ruas Kedondong - Pardasuka (R.039)	105241	1	2.648.199.999,00	2.648.200.000,00
11	Tanah Jalan Ruas Padang Cermin - Kedondong (R.040)	324918	1	6.528.499.999,00	6.528.500.000,00
12	Tanah Jalan Ruas Lempasing - Pd. Cermin (R.042)	321156	1	8.457.299.999,00	8.457.300.000,00
13	Tanah Jalan Ruas Pekurun Udik - Aji Kagungan (R.031)	131387	1	1.361.999.999,00	1.362.000.000,00
14	Tanah Jalan Ruas Abung Raya Timur (Kotabumi) (R.061.12)	8800	1	4.646.399.999,00	4.646.400.000,00
15	Tanah Jalan Ruas Kotabumi - Bandar Abung (R.062)	219450	1	1.579.699.999,00	1.579.700.000,00
16	Tanah Jalan Ruas Bandar Abung - Sp. Tujok (R.066)	118580	1	527.599.999,00	527.600.000,00
17	Tanah Jalan Ruas Kotabumi - Ketapang (R.070)	183998	1	3.102.499.999,00	3.102.500.000,00
18	Tanah Jalan Ruas Negara Ratu - Sp. Soponyono (R.081)	173875	1	9.865.299.999,00	9.865.300.000,00

- Penilaian terhadap 4 unit rumah penjaga air pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dengan total nilai sebesar Rp606.299.996,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.184 Hasil Appraisal Tanah Bangunan Penjaga Air TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

- Penilaian terhadap 6 bidang tanah bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.185 Hasil Appraisal Tanah Bangunan Pendidikan TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

- Penilaian terhadap 2 bidang tanah rumah dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanah Rumah Dinas Way Pengubuan Seluas 414 m2 dengan hasil *appraisal* senilai Rp2.149.499.999,00
  - Tanah Rumah Dinas Jl. Pramuka No.04 Rajabasa dengan hasil *appraisal* senilai Rp99.699.999,00

(5) Temuan Baru Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum tercatat yang berupa Tanah Rumah Penjaga Pintu Air sejumlah 6 bidang tanah senilai Rp6,00 pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Rumah Penjaga Pintu Air di Desa Lugusari Kec Pagelaran Kab. Pringsewu seluas 437 m2 senilai Rp1,00
- Tanah Rumah Penjaga Pintu Air di Desa Way Kerap Kec Semaka Tanggamus seluas 226 m2 senilai Rp1,00
- Tanah Rumah Penjaga Pintu Air di Desa Banjar Agung Udik Kec Pugung, Tanggamus seluas 8.775 m2 senilai Rp1,00
- Tanah Rumah Penjaga Pintu Air di Desa Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus seluas 304 m2 senilai Rp1,00
- Tanah Rumah Penjaga Pintu Air di Desa Banjar Agung Udik Kec Pugung, Tanggamus seluas 6005 m2 senilai Rp1,00

b) Pengurangan TA 2020 sebesar Rp7.310.780,00 yaitu berupa penghapusan sebagian terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung di desa Haduyang, Natar seluas 3.000 m2 ke KPP Natar senilai Rp7.310.780,00.

2) **Peralatan dan Mesin**

Mutasi tambah kurang Aset Peralatan dan Mesin TA 2020

Tabel 5.186 Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin TA 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
1. ALAT BESAR	59.653.752.372,00	4.421.516.129,00	-	64.075.268.501,00
2. ALAT ANGKUTAN	242.933.367.368,00	5.984.530.571,00	-	248.917.897.939,00
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	49.452.064.694,00	46.600.725.834,00	-	96.052.790.528,00
4. ALAT PERTANIAN	19.361.165.915,50	802.125.946,00	-	20.163.291.861,50
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	438.285.568.592,80	54.952.589.646,00	103.754.000,00	493.134.404.238,80
6. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	35.800.454.017,00	7.397.722.021,00	601.900.000,00	42.596.276.038,00
7. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	459.817.617.279,00	82.486.740.281,00	4.386.000,00	542.299.971.560,00
8. ALAT LABORATORIUM	180.189.474.737,68	38.508.237.610,00	-	218.697.712.347,68
9. ALAT PERSENJATAAN	2.313.194.764,00	64.657.680,00	-	2.377.852.444,00
10. ALAT KOMPUTER	264.227.209.145,50	76.079.578.257,00	236.913.000,00	340.069.874.402,50
11. ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
12. ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
13. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	71.230.000,00	-	-	71.230.000,00
14. ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
15. ALAT KESELAMATAN KERJA	1.226.431.682,00	251.812.832,00	-	1.478.244.514,00
16. ALAT PERAGA	2.999.126.000,00	74.300.000,00	-	3.073.426.000,00
17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI	252.269.034,00	25.800.000,00	-	278.069.034,00
18. RAMBU - RAMBU	11.840.553.736,33	58.459.088,00	-	11.899.012.824,33
19. PERALATAN OLAH RAGA	6.586.309.640,95	469.509.750,00	-	7.055.819.390,95
	1.775.009.788.978,76	**318.178.305.645,00**	**946.953.000,00**	**2.092.241.141.623,76**

Nilai aset Peralatan dan Mesin yang tercatat dalam neraca aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.092.241.141.623,76 atau meningkat/bertambah sebesar Rp317.231.352.645,00 atau 17,87% dari nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.775.009.788.978,76, hal tersebut karena adanya penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin pada TA 2020.

(1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

Penambahan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp318.178.305.645,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.187 Penambahan Peralatan dan Mesin TA 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal yang menjadi aset Tetap	250.425.811.824,00
2	Belanja Barang Jasa yang dikapitalisasi sebagai aset	3.051.417.900,00
3	Belanja Tak Terduga Penanganan Pandemi Covid-19 yang dibelanjakan sebagai aset	14.847.123.048,00
4	Hibah Dari Pihak Lain	41.978.040.644,00
5	Reklas dari Persediaan Hibah ke Aset Tetap pada Dinas Perhubungan	48.700.000,00
6	Donasi Penanganan Covid-19 dari Piahk Lain	7.827.212.229,00
	Jumlah	**318.178.305.645,00**

(2) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Pengurangan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp946.953.000,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.188 Pengurangan Peralatan dan Mesin TA 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Hibah Ke Kepolisian Daerah Lampung	618.040.000,00
2	Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (Aset Eks. KORPRI Tidak Ditemukan)	159.927.000,00
3	Reklasifikasi ke aset Lain-Lain (Kehilangan/pencurian pada SMKN 1 Kota Agung Timur dan SMAN 1 Sekampung Udik)	164.600.000,00
4	Reklas Service Model dari Aset Intrakomptabel ke Aset Lain-Lain	4.386.000,00
	Jumlah	**946.953.000,00**

3) **Gedung dan Bangunan**

Mutasi tambah kurang Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

Tabel 5.189 Rincian Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
BANGUNAN GEDUNG	2.903.226.765.761,73	159.507.879.878,48	3.624.695.281,00	3.059.109.950.359,21
MONUMEN	15.533.972.566,00	170.929.000,00	-	15.704.901.566,00
BANGUNAN MENARA	431.803.000,00	-	-	431.803.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	93.325.825.624,00	3.459.522.171,00	-	96.785.347.795,00
	3.012.518.366.951,73	**163.138.331.049,48**	**3.624.695.281,00**	**3.172.032.002.720,21**

Nilai Gedung dan Bangunan yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.172.032.002.720,21 atau meningkat/bertambah sebesar Rp159.513.635.768,48 atau 5,30% dari nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.012.518.366.951,73, hal tersebut karena adanya penambahan dan pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada TA 2020:

(1) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan
Penambahan saldo gedung dan banguan sebesar Rp163.138.331.049,48 pada tabel berikut:

Tabel 5.190 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal yang menjadi aset tetap	118.182.861.007,00
2	Belanja barang jasa yang dikapitalisasi sebagai aset	13.748.046.772,19
3	Belanja tak terduga penanganan covid-19 dibelanjakan sebagai aset	4.602.351.465,29
4	Retensi dibayarkan TA.2020 sudah diakui sebagi aset	1.185.154.912,00
5	Hibah dari pihak lain	18.889.817.722,00
6	Temuan baru belum tercatat	3,00
7	Penggantian mess perhubungan yang terkena jalan tol oleh Kementerian PUPR	584.391.000,00
8	Reklasifikasi dari aset KDP ke aset gedung dan	5.945.708.168,00
	Jumlah	**163.138.331.049,48**

(2) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Pengurangan saldo gedung dan bangunan sebesar Rp3.624.695.281,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.191 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Hibah ke Kepolisian Daerah Lampung berdasarkan SK Hibah No G/300/VI.02/HK/2020	1.820.422.847,00
2	Penghapusan berdasarkan SK No. G/137/VI.02/HK/2020	1.491.479.434,00
3	Reklasifikasi Gedung pada SMKN 3 Metro dari Intra ke Aset Lain-Lain (dalam Proses Penghapusan)	312.793.000,00
	Jumlah	**3.624.695.281,00**

4) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

Tabel 5.192 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
JALAN DAN JEMBATAN	5.625.807.758.913,92	255.561.628.192,59		5.881.369.387.106,51
BANGUNAN AIR	548.937.129.924,00	23.392.874.603,59		572.330.004.527,59
INSTALASI	43.406.135.636,00	503.381.900,00		43.909.517.536,00
JARINGAN	20.407.926.366,00	2.017.120.800,00		22.425.047.166,00
	6.238.558.950.839,92	**281.475.005.496,18**	**-**	**6.520.033.956.336,10**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat dalam neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.520.033.956.336,10 atau bertambah sebesar Rp281.475.005.496,18 atau 4,51% dari Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.238.558.950.839,92, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.193 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal yang menjadi aset Tetap	234.290.863.752,00
2	Belanja Barang Jasa yang dikapitalisasi sebagai aset	5.841.103.046,25
3	Belanja Tak Terduga Penanganan Pandemi Covid-19	2.249.408.000,00
4	Retensi dibayarkan TA. 2021 sudah diakui sebagai aset	24.019.601.835,34
5	Hibah Dari Pihak Lain	15.074.028.861,59
6	Temuan Baru belum Tercatat	1,00
	Jumlah	**281.475.005.496,18**

5) Aset Tetap Lainnya

Mutasi tambah kurang Aset Tetap Lainnya TA 2020

Tabel 5.194 Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2020

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	180.966.050.950,37	25.289.394.200,00		206.255.445.150,37
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	15.688.069.026,12	1.159.549.945,00		16.847.618.971,12
3	HEWAN	1.940.755.000,00	212.900.000,00		2.153.655.000,00
4	BIOTA PERAIRAN	-	49.275.000,00		49.275.000,00
5	TANAMAN	639.051.700,00	-		639.051.700,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	644.393,00	-		644.393,00
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	14.222.128.278,00	695.732.000,00		14.917.860.278,00
		213.456.699.347,49	**27.406.851.145,00**	**-**	**240.863.550.492,49**

Nilai Aset Tetap Lainnya yang tercatat dalam neraca aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp240.863.550.492,49 atau meningkat/bertambah sebesar Rp27.406.851.145 atau 12,84% dari nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2019 senilai Rp213.456.699.347,49, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada TA 2020.

(1) Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2019

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp27.406.851.145,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.195 Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Hibah	77.720.000,00
2	Belanja Modal TA. 2020	26.864.380.070,00
3	Belanja Barang Jasa yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap lainnya	445.030.500,00
4	Retensi dibayarkan TA 2021 sudah diakui sebagai aset	19.720.575,00
Jumlah		**27.406.851.145,00**

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Tabel 5.196 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
Konstruksi Dalam Pengerjaan	682.269.520.184,75	26.629.213.300,00	5.945.708.168,00	702.953.025.316,75
	682.269.520.184,75	26.629.213.300,00	5.945.708.168,00	702.953.025.316,75

Adapun nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020 adalah sebesar Rp702.953.025.316,75 atau bertambah sebesar Rp20.683.505.132,00 atau 3,03% dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp682.269.520.184,75 (*audited*), hal tersebut karena adanya penambahan dan pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2020.

a. Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp26.629.213.300,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.197 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020

No.	Nama UPB	Uraian	Nilai
1	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Non Bedah	25.554.993.100,00
2	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Non Bedah	413.690.200,00
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Parkir	99.880.000,00
4	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Konsultan Perencanaan Rehab sudha Nirmala A	50.000.000,00
5	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Perawatan Bedah	199.650.000,00
6	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Revisi Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Neurologi	66.880.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pondasi tanda batas KEBUN PKK AGROPARK	197.732.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengawasan Pondasi tanda batas KEBUN PKK AGROPARK	24.404.000,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Perencanaan Pondasi tanda batas KEBUN PKK AGROPARK	21.984.000,00
		Jumlah	**26.629.213.300,00**

b. Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengurangan sebesar Rp5.945.708.168,00 merupakan reklas aset Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai ke aset Gedung dan Bangunan, yang terdiri dari :

Tabel 5.198 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020

EMBED Excel.Sheet.12

7) **Akumulasi Penyusutan**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.788.134.194.539,68 sehingga Nilai Buku Aset Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp10.182.106.235.517,66.

Tabel 5.199 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020

NO	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Desember 2019	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Desember 2020	NILAI BUKU
				SEMESTER I	SEMESTER II		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANAH	2.242.116.753.568,03					2.242.116.753.568,03
2	PERALATAN DAN MESIN	2.092.241.141.623,76	1.183.102.386.937,11	98.818.967.564,00	109.024.412.426,00	1.390.945.766.927,11	701.295.374.696,65
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.172.032.002.720,21	509.844.891.707,00	29.352.311.323,50	29.768.085.879,50	568.965.288.910,00	2.603.066.713.810,21
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.520.033.956.336,10	2.511.134.146.576,92	157.788.229.853,00	157.505.776.986,00	2.826.428.153.415,92	3.693.605.802.920,18
5	ASET TETAP LAINNYA	240.863.550.492,49	1.282.132.127,28	143.651.370,96	369.201.788,41	1.794.985.286,65	239.068.565.205,84
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	702.953.025.316,75					702.953.025.316,75
	JUMLAH	**14.970.240.430.057,34**	**4.205.363.557.348,31**	**286.109.160.111,46**	**296.667.477.079,91**	**4.788.134.194.539,68**	**10.182.106.235.517,66**

d. **Dana Cadangan**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

e. **Aset Lainnya**

Per 31 Desember2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
145.243.841.042,25	170.573.244.564,90

Aset Lainnya merupakan pos untuk mencatat Aset nonlancar lainnya yang tidak dapat dikelompokan ke dalam Investasi Jangka Panjang, Dana Cadangan, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), serta Aset Lain-lain.

Jumlah Aset Lainnya yang tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Tabel 5.200 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020
1	Taghan Penj. Angsuran	26.469.583.431,50
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
3	Aset Tidak Berwujud	6.874.732.756,92
4	Aset Lain-lain	111.899.524.853,83
	Jumlah	**145.243.841.042,25**

1) **Tagihan Penjualan Angsuran**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)

26.469.583.431,50	**35.331.487.409,75**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.469.583.431,50 yang terdiri dari Piutang Angsuran Penjualan Rumah Dinas sebesar Rp373.086.621,40 dan Piutang Angsuran Penjualan Tanah Kavling sebesar Rp26.096.496.810,10 (**Lampiran 3 dan 4**).

2) **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Per 31 Desember2020 (Rp)	**Per 31 Desember 2019 (Rp)**
0,00	**250.000,00**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara. Menurut SAP disebutkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi dicatat dalam neraca pemerintah daerah ke dalam kelompok Aset Lancar (Piutang) dan Aset Lainnya.

Penyajiannya ke dalam kelompok Aset Lancar dinyatakan sebagai bagian lancar TPTGR yang nilainya adalah sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, sedangkan atas tuntutan ganti rugi (TGR) tersebut disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Jumlah TGR yang masuk dalam kelompok Aset Lainnya dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp00. Secara lebih jelas, jumlah TGR yang masuk dalam kelompok Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.201 Rincian Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama	Tahun Kejadian	Saldo per 31 des 2020 (Rp)	Saldo per 31 des 2019 (Rp)

1	M. Irwan	2019	00	250.000,00
Jumlah			**00**	**250.000,00**

3) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Per 31 Desember2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
0,00	**0,00**

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00.

4) **Aset Tidak Berwujud (*Netto*)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6.874.732.756,92	**7.461.601.500,72**

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan ataupun hanya bertujuan administrasi. Saldo Aset Tidak berwujud (*Netto*) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp6.874.732.756,92 dan Rp7.461.601.500,72.

Tabel 5.202 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Satker	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.218.543.429,00	7.218.543.429,00
2	DINAS KESEHATAN	1.339.866.600,00	1.339.866.600,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK	169.879.000,00	-
4	RUMAH SAKIT JIWA	317.904.000,00	174.504.000,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	74.820.000,00	74.820.000,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	641.578.600,00	641.578.600,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.000.000,00	65.000.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	291.855.000,00	291.855.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	448.151.000,00	448.151.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	388.734.500,00	388.734.500,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99.507.000,00	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39.600.000,00	39.600.000,00
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.850.000,00	
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	97.900.000,00	
15	DINAS KEHUTANAN	10.000.000,00	10.000.000,00
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	173.261.000,00	173.261.000,00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.790.772.840,00	1.646.772.840,00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.672.884.500,00	1.672.884.500,00
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.638.955.000,00	1.339.175.000,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	49.000.000,00	49.000.000,00
21	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	216.552.500,00	191.310.000,00
22	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	800.340.000,00	627.485.000,00
23	BIRO ORGANISASI	74.662.500,00	74.662.500,00
24	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	59.910.000,00	59.910.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	305.477.000,00	305.477.000,00
	JUMLAH	**18.035.004.469,00**	**16.832.590.969,00**
	Amortisasi	(11.160.271.712,08)	(9.370.989.468,28)
	Aset Tak Berwujud Netto	6.874.732.756,92	7.461.601.500,72

5) **Aset Lain-lain (*Netto*)**

Per 31 Desember2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
111.899.524.853,83	**127.779.905.654,43**

A

Aset Lain-lain merupakan pos untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset lancar, investasi atau tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap akibat aset tersebut dalam kondisi rusak berat, akan dihibahkan atau sudah diusulkan proses penghapusannya. Saldo Aset Lain-lain yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp111.899.524.853,83 atau mengalami penurunan sebesar Rp15.880.380.800,60 atau 12.43% dari nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.779.905.654,43.

Tabel 5.203 Rincian Aset Lain-lain Per 31 Desember 2020

No.	Satker	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Penyisihan/Akumulasi Penyusutan (Rp)	*Netto (Rp)*
1	Biro Perlengkapan	Penjualan Angsuran Roda Dua	105.025.000,00	(105.025.000,00)	-
		Penjualan Angsuran Rumdis	595.441.852,94	(595.441.852,94)	-
		Penjualan Angsuran tanah kavling	4.161.035.818,82	(4.161.035.818,82)	-
2	PPKD	TP/TGR	931.034.317,15	(931.034.317,15)	-
3	Dinas Koperasi	Piutang Jasa Dana Bergulir	579.662.632,00	(461.529.257,00)	118.133.375,00
4	Dinas Pertanian	Piutang Jasa Dana Bergulir	474.074.500,00	(474.074.500,00)	-
5	RSUAM	Piutang Retribusi	2.505.425.845,00	(2.174.865.136,40)	330.560.708,60
6	Dinas Pendapatan	Piutang PAP	34.810.000,00	(19.955.000,00)	14.855.000,00
8	RSJ	Piutang Jaminan/Non Jaminan	108.011.356,00	(10.801.135,60)	97.210.220,40
9	BPBD	Kas Tekor	64.730.718,00		64.730.718,00
10	PPKD	Penyertaan Modal pemerintah	200.000.000,00		200.000.000,00
11	Dinas Pertanian	Dana Bergulir	176.480.000,00		176.480.000,00
12	Biro Perlengkapan	Aset Lain-lain	236.576.290.169,70	(125.678.735.331,57)	110.897.554.838,13
		Jumlah	**246.512.022.209,61**	**(134.612.497.349,48)**	**111.899.524.860,13**

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Tagihan Penjualan Angsuran – Biro Perlengkapan

(1) Penjualan Angsuran Roda Dua

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran kendaraan roda dua sebesar Rp105.025.000,00 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(2) Penjualan Angsuran Rumdis

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran rumah dinas sebesar Rp595.441.852,94 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya (**Lampiran 3**) sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(3) Penjualan Angsuran Tanah Kavling

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran tanah kavling sebesar Rp4.161.035.818.82 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya (data **Lampiran 4**) sehingga memiliki saldo *netto* sebesar

Rp0,00.

(b) TP/TGR – PPKD

Merupakan reklasifikasi atas piutang TP/TGR yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan sebesar Rp931.034.317,15 dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(c) Piutang Jasa Dana Bergulir – Dinas Koperasi dan UMKM

Merupakan reklasifikasi atas piutang jasa pembinaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp579.662.632,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dengan penyisihan piutang sebesar Rp461.529.257,00 sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp118.133.375,00 (Rp579.662.632,00 - Rp461.529.257,00).

(d) Piutang Jasa Dana Bergulir – Dinas Pertanian

Merupakan reklasifikasi atas piutang jasa pembinaan dana bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp474.074.500,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(e) Piutang Retribusi – RSUAM

Merupakan reklasifikasi atas piutang retribusi pada RSUAM sebesar Rp2.505.425.845,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dengan penyisihan piutang sebesar Rp2.174.865.136,40 sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp330.560.708,60 (Rp2.505.425.845,00 – Rp2.174.865.136,40).

Tabel 5.204 Penyisihan Piutang pada RSUAM per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Kategori Piutang			Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
		Kurang Lancar (1-3 bl) (Rp)	Diragukan (3-12 b l) (Rp)	Macet (> 12 bl) (Rp)		
1	Pasien Umum	218.374.399,00	268.047.499,00	1.466.922.011,00	1.953.343.909,00	1.622.783.200,40
2	Pasien Tak Mampu			464.993.365,00	464.993.365,00	464.993.365,00
3	Pasien Jamkesda Kabupaten			87.088.571,00	87.088.571,00	87.088.571,00
4	Pasien Jamkesda Kota			0	-	-
5	Diklat		-	0	-	-
6	BPJS		-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**2.505.425.845,00**	**2.174.865.136,40**

(f) Piutang PAP – Badan Pendapatan (Bapenda)

Merupakan reklasifikasi atas piutang Pajak Air Permukaan (PAP) pada Badan Pendapatan sebesar Rp34.810.000,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dengan penyisihan piutang sebesar Rp19.955.000,00 sehingga memiliki nilai *netto* sebesar Rp14.855.000,00 (Rp34.810.000,00 –Rp19.955.000,00).

(g) Piutang Jaminan/Non Jaminan – RSJ

Merupakan reklasifikasi atas piutang jaminan pasien NAPZA rawat jalan dan rawat inap periode bulan Juli s.d Desember 2019. Pihak Penjamin adalah Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

(h) Kas Tekor – BPBD

Merupakan reklasifikasi kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah tidak layak diklasifikasi sebagai kas karena merupakan kas tekor Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp64.730.718.00.

(i) Penyertaan Modal Pemerintah – PPKD

Merupakan reklasifikasi atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung Rp200.000.000.00 yang terdapat pada PT Sumatera Promotion Center dan PT Sumatera Shipping Lines masing-masing sebesar Rp100.000.000.00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP Penyertaan Modal tahun 2011. BPK Perwakilan Lampung merekomendasikan untuk membuat Peraturan Daerah Terhadap Penyertaan Modal Provinsi Lampung pada PT SPC dan PT SSL. Pembuatan Peraturan Daerah tersebut harus didahului dengan penelusuran terhadap status penyertaan modal terhadap kedua perusahaan tersebut. Informasi yang didapatkan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional PT SPC dan PT SSL diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut tidak beroperasi dengan baik dan mempunyai kinerja yang rendah hingga saat ini, khususnya pada PT SSL yang belum cukup mampu untuk bersaing dengan perusahaan asing. Sampai dengan Tahun Anggaran 2016 kedua perusahaan tersebut belum memberikan kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun memberikan laporan tertulis secara periodik dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang seharusnya menjadi bahan kontrol bagi Pemerintah Provinsi Lampung atas status atau posisi penyertaan modal pada kedua perusahaan tersebut sejak pertama kali dilakukan penyertaan modal Tahun 2000 masing-masing sebesar Rp100.000.000.00. Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Lampiran I. Pernyataan Nomor 06 tentang Investasi Paragraf 6, yang menyatakan bahwa investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu penyertaan modal pada PT SPC dan PT SSL sudah tidak efektif dan tidak memberikan nilai manfaat pada Pemerintah Provinsi Lampung sehingga tidak dapat dikelompokkan lagi menjadi investasi dan direklasifikasi ke dalam kelompok Aset Lain-lain. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan untuk melakukan penelusuran terhadap status penyertaan modal Pemerintah Provinsi

Lampung pada Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil Rakor Gubernur se-Sumatera tanggal 31 Mei s.d. 2 Juni 2012 untuk mengagendakan pembahasan usulan pemberhentian kerjasama dengan kedua Perusahaan tersebut.

(j) Dana Bergulir – Dinas Pertanian

Merupakan reklasifikasi atas investasi non permanen (dana bergulir) bidang pertanian sebesar Rp176.480.000,00 berupa hewan ternak karena hewan ternak tersebut sudah tidak ada (mati) dan sedang menunggu proses penghapusan. Pada TA 2013 terjadi penambahan ternak yang mati sebesar Rp105.690.000,00 dan atas permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku SKPD pengelola BLUD Bidang Pertanian setelah terjadi proses penggabungan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya bersama Biro Aset dan Perlengkapan Daerah akan menindaklanjuti proses penghapusan atas kematian ternak tersebut. Untuk sementara dalam penyajian investasi non-permanen pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, nilai tersebut dimasukkan dalam kategori piutang yang tidak dapat tertagih.

(k) Aset Tetap – Bidang Aset BPKAD

Tabel 5.205 Aset Lain-Lain Yang Berasal Dari Aset TetapTA 2020

KIB	ASET	SALDO 31 DES 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO 31 DES 2020
A.	TANAH	5.104.147.123,70			5.104.147.123,70
B.	PERALATAN DAN MESIN	23.846.388.499,00	324.527.000,00		24.170.915.499,00
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN	26.294.023.197,00	312.793.000,00	10.165.936.819,00	16.440.879.378,00
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	189.639.378.285,00		83.467.000,00	189.555.911.285,00
E.	ASET TETAP LAINNYA	1.304.436.884,00			1.304.436.884,00
F.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				-
	J U M L A H ……	**246.188.373.988,70**	**637.320.000,00**	**10.249.403.819,00**	**236.576.290.169,70**

perhitungan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp236.576.290.169,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.612.083.819,00 atau 3,90% dari nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp246.188.373.988,70

Pada TA 2020 terdapat Peningkatan/Penambahan nilai aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Lampung berasal dari :

(1) Penambahan sebesar Rp637.320.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset intra ke aset lain-lain akibat usulan penghapusan dan laporan kehilangan akibat pencurian dengan rincian sebagai berikut :

(2) Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset eks. KORPRI yang tidak ditemukan senilai Rp159.927.000,00

(3) Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap usulan penghapusan aset pada SMAN 3 Metro senilai Rp312.793.000,00

(4) Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMAN 1 Sekampung Udik senilai Rp86.600.000,00

(5) Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMKN 1 Kota Agung Timur senilai Rp78.000.000,00

(2) Pengurangan sebesar Rp10.249.403.819,00 yang merupakan pengurangan aset akibat penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206 Rincian Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun 2020

EMBED Excel.Sheet.12

Rincian Aset Lain – lain sebagai berikut:

(1) **Tanah**

Nilai aset lain – lain berupa tanah sebagai berikut:

Tabel 5.207 Rincian Aset Tanah Pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
Tanah	5.104.147.123,70			5.104.147.123,70
	5.104.147.123,70	**-**	**-**	**5.104.147.123,70**

Tanah yang tercatat dalam Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.104.147.123,70 atau tidak mengalami perubahan terhadap nilai saldo per 31 Desember 2019.

Sebelas bidang tanah yang tercatat pada TA 2020 sebesar Rp5.104.147.123,70 yaitu:

(1) Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung eks. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II yang terkena untuk pelebaran jalan di Kotabumi, akan tetapi sampai dengan saat ini

proses *ruislag* atas aset tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum selesai senilai Rp5.895.000,00;

(2) Tanah kavling seluas 176.110 m2 senilaiRp3.070.402.122,70 yang diperjualbelikan kepada pegawai negeri.

(3) Tanah Kavling seluas 20.448 m2 di Desa Sabah Balau Sukarame I Bandar Lampung senilai Rp315.000.000,00

(4) Tanah Kavling seluas 42.490 m2 di Desa Sabah Balau senilai Rp315.000.000,00

(5) Tanah Kavling seluas 11.085 m2 di Jl. Pramuka Sumberejo Kamiling Bandar lampung senilai Rp500.113.900,00

(6) Tanah kavling seluas 1.600 m2 yang terletak di Jl. Pramuka Sumbrejo Kemiling Bandar Lampung senilai Rp72.186.100,00

(7) Tanah Bangunan Pembibitan pada UPTD Balai Benih Induk di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah senilai Rp4.000.000,00 dengan luas 51.770 m2

(8) Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) pada SMKN 1 Tegineneng di Jl. Raya Tegineneng-Metro Desa Batanghari Ogan Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran senilai Rp578.550.000,00 dengan luas 10.150 m2

(9) Tanah Persawahan di UPB Padi Way Seputih Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp1,00 dengan luas 42.500 m2.

(10) Tanah Kavling di Jalan Pramuka seluas 43.969 m2 senilai Rp43.000.000,00 sesuai SK No. G/73.a/B.X/HK/2013 tanggal 8 Februari 2013.

(11) Tanah gedung anggar yang mengalami *double* catat karena merupakan satu hamparan dengan tanah stadion Pahoman berdasarkan peta ukur pada SHP No.74 Tahun 2012, dengan nilai reklasifikasi sebesar Rp200.000.000,00

(2) **Peralatan dan Mesin**

Tabel 5.208 Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
1. ALAT BESAR	1.032.597.500,00	-		1.032.597.500,00
2. ALAT ANGKUTAN	429.995.000,00	-		429.995.000,00
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	576.431.100,00	-		576.431.100,00
4. ALAT PERTANIAN	304.584.291,50	-		304.584.291,50
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.650.778.966,00	80.714.000,00		3.731.492.966,00
6. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	966.598.909,00	6.900.000,00		973.498.909,00
7. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	78.988.500,00	-		78.988.500,00
8. ALAT LABORATORIUM	3.965.940.954,00	-		3.965.940.954,00
9. ALAT PERSENJATAAN	4.528.750,00	-		4.528.750,00
10. ALAT KOMPUTER	12.691.490.098,50	236.913.000,00		12.928.403.098,50
11. ALAT EKSPLORASI	-	-		-
12. ALAT PENGEBORAN	-	-		-
13. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIA	-	-		-
14. ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-		-
15. ALAT KESELAMATAN KERJA	4.400.000,00	-		4.400.000,00
16. ALAT PERAGA	-	-		-
17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-		-
18. RAMBU - RAMBU	9.650.000,00	-		9.650.000,00
19. PERALATAN OLAH RAGA	130.404.430,00	-		130.404.430,00
	23.846.388.499,00	**324.527.000,00**	**-**	**24.170.915.499,00**

Nilai Peralatan dan Mesin yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.170.915.499,00 atau bertambah sebesar Rp324.527.000. atau 1,36% dari Nilai aset lain-lain Per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.846.388.499,00, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp324.527.000,00 yang berasal dari :

(6) Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset eks. KORPRI yang tidak ditemukan senilai Rp159.927.000,00

(7) Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMAN 1 Sekampung Udik senilai Rp86.600.000,00

(8) Reklasifikasi Pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap laporan kehilangan aset akibat pencurian aset pada SMKN 1 Kota Agung Timur senilai Rp78.000.000,00

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset lain – lain berupa Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.209 Rincian Aset Aset Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
BANGUNAN GEDUNG	24.931.822.747,00	312.793.000,00	9.806.712.219,00	15.437.903.528,00
MONUMEN	45.478.900,00		45.478.900,00	-
BANGUNAN MENARA	57.698.000,00		-	57.698.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.259.023.550,00		313.745.700,00	945.277.850,00
	26.294.023.197,00	**312.793.000,00**	**10.165.936.819,00**	**16.440.879.378,00**

Nilai Gedung dan Bangunan yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.440.879.378,00,00 atau berkurang sebesar Rp9.853.143.819,00 atau 37,47% dari Nilai Gedung dan Bangunan pada aset lain-lain Per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.294.023.197,00 (Audited), hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan pada tahun 2020 sebagai berikut :

(a) Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset intrakomtabel ke aset lain-lain terhadap aset gedung yang masih dalam proses penghapusan senilai Rp312.793.000,00 padaSMAN 3 Metro.

(b) Pengurangan sebesar Rp10.165.936.819,00 yang merupakan pengurangan aset akibat penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

No	Asal	No. Berita Acara	Nilai (dalam Rupiah)
1	SMKN 5 Bandar Lampung	G/137/VI.02/HK/2020	51.400.000,00
2	Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	G/137/VI.02/HK/2020	2.196.435.700,00
3	Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	G/137/VI.02/HK/2020	45.478.900,00
4	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	G/137/VI.02/HK/2020	7.766.501.219,00
5	SMAN 1 PADANG CERMIN (Pesawaran)	G/137/VI.02/HK/2020	4.914.000,00
6	SMKN 3 Bandar Lampung	G/137/VI.02/HK/2020	61.307.000,00
7	SMAN 10 Bandar Lampung	G/137/VI.02/HK/2020	39.900.000,00
			10.165.936.819,00

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset lain – lain berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.211 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
JALAN DAN JEMBATAN	174.965.855.256,00		-	174.965.855.256,00
BANGUNAN AIR	7.960.851.829,00		-	7.960.851.829,00
INSTALASI	53.767.000,00		53.767.000,00	-
JARINGAN	6.658.904.200,00		29.700.000,00	6.629.204.200,00
	189.639.378.285,00	**-**	**83.467.000,00**	**189.555.911.285,00**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp189.555.911.285,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp83.467.000,00 atau sebesar 0,04% dibandingkan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat pada aset lain-lain Per 31 Desember 2019 sebesar Rp189.639.378.285,00

(Audited), hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.212 Rincian Berkurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

No	Asal	No. Berita Acara	Nilai (dalam Rupiah)
1	Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	G/137/VI.02/HK/2020	83.467.000,00
			83.467.000,00

(5) **Aset Tetap Lainnya**

Nilai aset lain – lain berupa Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Aset Tetap Lainnya pada Aset Lain-Lain Tahun 2020

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2020
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	685.801.439,00			685.801.439,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	102.212.945,00			102.212.945,00
3	HEWAN	59.225.000,00			59.225.000,00
4	BIOTA PERAIRAN	-			-
5	TANAMAN	457.197.500,00			457.197.500,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-			-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-			-
		1.304.436.884,00	**-**	**-**	**1.304.436.884,00**

Nilai Aset Tetap Lainnya yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.304.436.884,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan Nilai aset lain-lain Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.304.436.884,00 (Audited).

(6) **Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**

Pada Tahun 2020, nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebesar Rp125.678.735.331,57.

Tabel 5.214 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

ASET LAIN-LAIN	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2020	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN2 PER 31 DES 2020	NILAI BUKU PER 31 DES 2020
TANAH	5.104.147.123,70		5.104.147.123,70
PERALATAN DAN MESIN	24.170.915.499,00	10.318.849.274,57	13.852.066.224,43
GEDUNG DAN BANGUNAN	16.440.879.378,00	6.203.696.868,00	10.237.182.510,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	189.555.911.285,00	109.156.189.189,00	80.399.722.096,00
ASET TETAP LAINNYA	1.304.436.884,00		1.304.436.884,00
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-		-
	236.576.290.169,70	**125.678.735.331,57**	**110.897.554.838,13**

2. **Kewajiban**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	**Per 31 Desember 2019 (Rp)**

873.388.365.230,16	1.102.785.690.547,03

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Lampung.

Kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp873.388.365.230,16 dan Rp1.102.785.690.547,03.

Tabel 5.215 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	652.416.720.033,16	740.637.712.646,03
2	Kewajiban Jangka Panjang	220.971.645.197,00	362.147.977.901,00
	Jumlah	**873.388.365.230,16**	**1.102.785.690.547,03**

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
652.416.720.033,16	740.637.712.646,03

Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp652.356.860.033,16 dan Rp740.637.712.646,03 yang terdiri atas:

Tabel 5.216 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	337.777.287,84	-
2	Utang Bunga	4.781.328.590,00	6.519.993.558,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.165.335.250,00	1.574.421.416,67
4	Beban y g masih hrs dibay ar	14.790.786.751,00	20.000.509.502,00
5	Bag. Lancar Utang Jk Panjang	167.263.263.747,00	167.263.263.747,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	464.078.228.407,32	545.279.524.422,36
	Jumlah	**652.416.720.033,16**	**740.637.712.646,03**

1) **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
337.777.287,84	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo Utang PFK Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp337.777.28,84 dan Rp0,00.

2) **Utang Bunga**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4.781.328.590,00	**6.519.993.558,00**

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Saldo Utang Bunga Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.781.328.590,00 dan Rp6.519.993.558,00.

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.781.328.590,00 merupakan utang bunga yang timbul dari pinjaman Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp599.999.408.000,00. Pinjaman ini bertujuan untuk pembiayaan pekerjaan insfrastruktur prioritas di Provinsi Lampung, yaitu untuk pembangunan 6 (enam) ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung. Perjanjian pinjaman pembiayaan sesuai dengan Akta Notaris PRATIWI HANDAYANI, S.H. Nomor 04 tanggal 23 Januari 2018.

PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah). Pencairan pinjaman sebesar Rp599.999.408.000,00 dilakukan secara bertahap yaitu:

a. 2 Agustus 2018	Rp117.269.258.600,00
b. 1 November 2018	Rp149.865.831.400,00
c. 7 Desember 2018	Rp110.956.720.000,00
d. 28 Desember 2018	Rp101.792.127.500,00
e. 2 April 2019	Rp120.115.470.500,00
Total	Rp599.999.408.000,00

Pemerintah Provinsi Lampung wajib membayar bunga *(fixed rate)* kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) sebesar 6,52% (enam koma lima dua pesen) per anum. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu dihitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir triwulan.

Setiap masa tenggang pembayaran pokok fasilitas pembiayaan (*grace periode*) berakhir, bulan dan tanggal pembayaran bunga disamakan

dengan bulan dan tanggal pembayaran pokok fasilitas pembiayaan, dengan dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan hari bunga apabila terdapat perbedaan antara bulan jatuh tempo pembayaran bungan dengan bulan jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman.

Bunga akrual Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.781.328.590,00.

3) **Pendapatan Diterima Dimuka**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.165.335.250,00	**1.574.421.416,67**

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.165.335.250,00 dan Rp1.574.421.416,67,00. Pendapatan diterima dimuka berasal dari sewa tanah dan bangunan pada Biro Umum. Rincian pada lampiran 15.

4) **Beban Yang Masih Harus Dibayar**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
14.790.786.751,00	**20.000.509.502,00**

Beban Yang Masih Harus Dibayar merupakan akun yang digunakan untuk mencatat beban yang telah dimanfaatkan namun belum dilakukan pembayaran. Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp14.790.786.751,00 dan Rp20.000.509.502,00. Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.790.786.751,00 terdiri dari:

Tabel 5.217 Rincian Beban yang masih Harus di Bayar

No.	Jenis Beban	Nilai (Rp)
1	Tagihan Listrik	1.632.579.767,00
2	Tagihan Air	39.388.842,00
3	Tagihan Telephone	72.498.580,00
4	Tagihan Internet	96.494.646,00
5	Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan	12.946.322.800,00
6	Utang Gaji PNS pd RSJ	3.502.116,00
Jumlah		**14.790.786.751,00**

5) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
167.263.263.747,00	**167.263.263.747,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Pajang merupakan bagian utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp167.263.263.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.218 Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020

No.	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	25/10/2020 - 24/01/2021	35.294.083.176
2	25/01/2021 - 24/04/2021	35.294.083.176
3	25/04/2021 - 24/07/2021	35.294.083.176
4	25/07/2021 - 24/10/2021	35.294.083.176
5	25/10/2021 - 31/12/2021	26.086.931.043
	Jumlah	**167.263.263.747**

6) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
464.078.228.407,32	**545.279.524.422,36**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun yang mencatat kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dilunasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota, pihak ketiga, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Sewa Menara Siger, dan Penyetoran Penyertaan Modal kepada BUMD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.219 Rincian Kewajiban Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Utang Dana Bagi Hasil Kab/Ko	365.335.866.990,00	440.428.122.986,92
2	Utang Retensi dan Pihak Ketig	35.562.710.941,32	48.434.466.527,44
3	Utang Jaminan Kecelakaan Ke	155.582.492,00	155.582.492,00
4	Utang Menara Siger	1.264.000.000,00	1.264.000.000,00
5	Utang RSAM	61.033.413.691,00	52.857.569.929,00
6	Utang Sewa Dinas Pendidikan	-	467.500.000,00
7	Utang pada RSJ	726.654.293,00	1.672.282.487,00
	Jumlah	**464.078.228.407,32**	**545.279.524.422,36**

a) Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Tabel 5.220 Saldo Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	PKB	122.720.599.629,00	121.268.533.741,73
2	BBNKB	55.712.979.493,00	105.919.829.845,88
3	PBB-KB	185.851.659.097,00	212.497.821.563,46
4	Pajak ABT	0	741.937.835,85
5	PAP	1.050.628.771,00	-
6	Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**365.335.866.990,00**	**440.428.122.986,92**

Rincian Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota disajikan pada Lampiran 8.

b) Utang Retensi dan Pihak Ketiga

Tabel 5.221 Saldo Utang Retensi Kepada Pihak Ketiga yang Belum Dibayar per 31 Desember 2020

No.	Dinas	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pengelola Sumber Daya Air	5.819.424.746,00
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya	3.413.189.622,00
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	23.800.848.677,00
4	Dinas Kesehatan	250.209.609,00
5	Dinas Pendidikan	587.219.560,32
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan	95.097.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	194.592.050,00
8	Rumah Sakit Jiwa	25.025.022,00
9	Rumah Sakit Abdul Muluk	1.277.749.655,00
10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	49.457.500,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.897.500,00
	Jumlah	**35.562.710.941,32**

c) Utang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Saldo utang jaminan kecelakaan kerja yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp155.582.492.00.

d) Utang Menara Siger

Saldo utang menara siger yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.264.000.000.00 merupakan utang kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas sewa lahan seluas 32.860 m2 yang terletak di Desa Bakauheni,Kecamatan Bakauheni. Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan monumen/tugu Menara Siger yang merupakan *icon* Provinsi Lampung.Perjanjian sewa menyewa lahan tersebut tertuang dalam perjanjian antara PT ASDP Indonesia Fery (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Sperj 210/HK.201/ASDP-2013. Nomor G/502/BX/HK/2013.

Jumlah keseluruhan biaya sewa atas lahan untuk pembangunan Menara Siger periode pembangunan pertama tahun 2006 sampai dengan 2010 dan pembangunan kedua periode 2011 adalah sebesar Rp1.764.000.000,00.

Atas biaya sewa tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 melalui Bank BRI Cabang Roxy Jakarta pada

tanggal 14 November 2014. Sehingga utang sewa lahan Menara Siger per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.264.000.000,00.

e) Utang RSAM

Utang pada RSAM adalah utang pengadaan obat-obatan, alkes, dan jasa medik sebesar Rp61.033.413.691,00

f) Utang pada RSJ

Utang pada RSJ adalah utang pengadaan obat-obatan, alkes, dan jasa medik sebesar Rp726.654.293,00

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
220.971.645.197,00	**362.147.977.901,00**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp220.971.645.197,00 dan Rp362.147.977.901,00 yang terdiri atas:

1) **Utang Dalam Negeri**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
220.971.645.197,00	**362.147.977.901,00**

Utang Dalam Negeri merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi. Saldo Utang Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp220.971.645.197,00 dan Rp362.147.977.901,00.

Utang Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp220.971.645.197,00 merupakan pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pinjaman ini bertujuan untuk pembiayaan pekerjaan insfrastruktur prioritas di Provinsi Lampung, yaitu untuk pembangunan 6 (enam) ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung. Perjanjian pinjaman pembiayaan

sesuai dengan Akta Notaris PRATIWI HANDAYANI, S.H. Nomor 04 tanggal 23 Januari 2018.

PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah).

Hutang jangka panjang yang timbul berdasarkan pinjaman pembiayaan ini meliputi akan tetapi tidak terbatas pada pokok, bunga, denda dan biaya atau ongkos-ongkos yang terhitung dan wajib dibayar oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal penarikan pertama, termasuk masa tenggang *(grace periode)* pembayaran pokok fasilitas pembiayaan selama 11 (sebelas) bulan. Pemerintah Provinsi Lampung wajib membayar bunga *(fixed rate)* sebesar 6,52% (enam koma lima dua persen) per anum. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), yaitu dihitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayarkan paling lambat setia tangga 25 (dua puluh lima) setiap akhir triwulan.

Tabel 5.222 Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020

No	Tanggal Penarikan	Jumlah	Pengembalian		Bag. Lancar utang jangka panjang		Utang Jangka Panjang
			Tanggal	Jumlah	Jangka Waktu	Jumlah	
1	02/08/2018	117.269.258.600,00	23/07/2019	35.294.083.176,00	25/10/2019 - 24/01/2020	35.294.083.176	220.971.645.197
2	01/11/2018	149.865.831.400,00	21/10/2019	35.294.083.176,00	25/01/2020 - 24/04/2020	35.294.083.176	
3	07/12/2018	110.956.720.000,00	24/01/2020	35.294.083.176,00	25/04/2020 - 24/07/2020	35.294.083.176	
4	28/12/2018	101.792.127.500,00	24/04/2020	35.294.083.176,00	25/07/2020 - 24/10/2020	35.294.083.176	
5	17/04/2019	120.115.470.500,00	24/07/2020	35.294.083.176,00	25/10/2020 - 31/12/2020	26.086.931.043	
			24/10/2020	35.294.083.176,00	24/01/2021		
	Jumlah	**599.999.408.000,00**		**211.764.499.056,00**		**167.263.263.747**	**220.971.645.197**

2) **Utang Luar Negeri**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
0,00	**0,00**

Utang Luar Negeri merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh pemerintah daerah.Saldo Utang Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3. **Ekuitas**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10.358.609.340.087,60	**8.614.266.390.720,46**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah padatanggal laporan. Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Lampung per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp10.358.609.340.087,60 dan Rp8.614.266.390.720,46.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan – LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit – LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan Operasional dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter. Serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Operasional per 31 Desember 2020 ditutup dengan jumlah Pendapatan Operasional sebesar Rp7.190.345.071.951,57 dan Beban Operasional sebesar Rp6.799.237.485.891,25 serta mengalami surplus sebesar Rp391.107.586.060,32

Tabel 5.223 Laporan Operasional per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Pendapatan Operasional – LO	7.190.345.071.951,57	7.533.004.995.125,43
2	Beban Operasional – LO	6.799.237.485.891,25	6.558.222.488.473,53
3	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO	391.107.586.060,32	974.782.506.651,90
4	Pos Luar Biasa	0	0
5	Surplus/Defisit LO	391.107.586.060,32	974.782.506.651,90

1. PENDAPATAN – LO

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
7.190.345.071.951,57	**7.533.004.995.125,43**

Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.190.345.071.951,57 dan Rp7.533.004.995.125,43. Pendapatan tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp342.659.923.173,86 atau 4,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.224 Pendapatan Operasional per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	2.868.161.448.094,48	3.081.338.605.220,00
2	Pendapatan Transfer – LO	2.515.226.885.350,00	2.693.782.750.027,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.806.956.738.507,09	1.757.883.639.878,43
Jumlah		**7.190.345.071.951,57**	**7.533.004.995.125,43**

a. **Pendapatan Asli Daerah – LO**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.868.161.789.161,83 dan Rp3.081.338.605.220,00. Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp213.176.816.058,17 atau 6,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.225 Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Pajak Daerah – LO	2.427.359.475.419,56	2.663.676.684.848,44
2	Retribusi Daerah – LO	17.479.399.270,67	9.806.337.116,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	35.679.032.096,95	27.746.078.380,60
4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	387.643.882.374,65	380.109.504.874,96
Jumlah		**2.868.161.789.161,83**	**3.081.338.605.220,00**

1) **Pendapatan Pajak Daerah - LO**

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LO Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.427.359.475.419,56 dan Rp2.663.676.684.848,44. Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp236.317.209.428,88 atau 7,76% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.226 Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	786.228.389.430,00	799.767.612.251,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	440.909.561.650,00	728.165.240.209,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	536.625.926.088,00	599.660.914.181,00
4	Pajak Air Permukaan	5.098.520.521,56	3.669.205.085,44
5	Pajak Rokok	658.497.077.730,00	532.413.713.122,00
Jumlah		**2.427.359.475.419,56**	**2.663.676.684.848,44**

Pendapatan Pajak Daerah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.427.359.475.419,56 tidak sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LRA Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.386.345.268.304,00.

Perbedaan Nilai Pajak Daerah – LO dengan nilai Pajak Daerah – LRA sebesar Rp41.014.207.115,56 yaitu :

1. Mutasi tambah sebesar Rp41.052.807.943,00 berupa Pendapatan Pajak Rokok yang dialokasikan untuk BPJS TA 2020 sebesar Rp41.007.315.664,00, piutang PAP TA 2020 sebesar Rp45.492.279,00;

2. Mutasi kurang sebesar Rp38.600.827,44 berupa piutang PAP TA 2019 yang sudah dibayar.

Perbedaan Realisasi Pajak Rokok LO dengan realisasi Pajak Rokok – LRA sebesar Rp41.007.315.664,00 disebabkan karena adanya pemotongan dana BPJS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan pada pasal 2 PMK Nomor 128/PMK.07/2019 yang menyatakan bahwa.

a) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

b) Dukungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota;

c) Kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan PMK tersebut Provinsi Lampung memberikan dukungan terhadap program tersebut dengan memberikan kontribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK dimaksud.

2) **Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.479.399.270,67 dan Rp9.806.337.116,00. Pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.673.062.154,67 atau 78,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.227 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	6.170.230.166,00	196.208.849,00
2	Retribusi Jasa Usaha	10.646.113.704,67	9.329.670.467,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	663.055.400,00	280.457.800,00
Jumlah		**17.479.399.270,67**	**9.806.337.116,00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.479.399.270,67 tidak sama dengan Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.080.208.104,00.

Perbedaan Nilai Retribusi Daerah – LO dengan nilai Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp399.191.166,67 yaitu:

1. Mutasi tambah sebesar Rp1.578.601.416,67 berupa pendapatan diterima dimuka pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan Bangunan TA 2019 dan retribusi Dinas Kehutanan.
2. Mutasi kurang sebesar Rp1.179.410.250,00 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan Bangunan yang dibayar seluruhnya di TA 2020 dan retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan.

3) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp35.679.032.096,95 dan Rp27.746.078.380,60. Pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.932.953.716,35 atau 28,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	35.534.675.524,95	27.466.164.036,60
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	144.356.572,00	279.914.344,00
Jumlah		**35.679.032.096,95**	**27.746.078.380,60**

Perbedaan Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp 5.805.401.473,81 yaitu berupa mutasi tambah dan kurang atas penyesuaian perhitungan penyertaan modal pada BUMD karena perubahan perhitungan metode ekuitas.

4) **Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO**

Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp387.643.882.374,65 dan Rp380.109.504.874,96. Pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.534.377.499,69 atau 1,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.229 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	54.287.333,00	25.021.272.356,00
2	Penerimaan Jasa Giro	25.060.528.008,71	28.959.985.291,56
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.500.000,00	6.000.000,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.435.767,00	49.202.288,00
6	Pendapatan Denda Pajak	18.258.922.697,00	19.144.586.776,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	8.798.099.875,00	11.613.934.486,53
8	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	328.988.471.255,47	274.201.509.858,90
9	Penerimaan Lain-lain	6.207.637.438,47	21.113.013.817,97
Jumlah		**387.643.882.374,65**	**380.109.504.874,96**

Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp387.643.882.374,65 tidak sama dengan Jumlah

Pendapatan Lain - lain Pendapatan yang Sah – LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp408.987.713.106,57.

Perbedaan nilai Lain - Lain Pendapatan yang Sah - LO dengan nilai Lain - Lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp13.402.687.309,92 yaitu:

1. Mutasi tambah sebesar Rp91.815.640.500,32 berupa :
    a. Piutang Penjualan Angsuran TA 2020 sebesar Rp39.890.403.318,00 yang terdiri dari Bagian Lancar Penjualan sebesar Rp8.559.317.214,74, Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran Rp26.469.583.431,50, dan Aset Lain - Lain berupa Penjualan Angsuran Rp4.861.502.671,76;
    b. Piutang TP/TGR TA 2020 sebesar Rp936.966.321,32 yang terdiri dari Bagain Lancar TP/TGR sebesar Rp5.932.004,17, dan Aset Lain – Lain berupa Piutang TP/TGR Rp931.034.317,15;
    c. Piutang Jasa Dana Bergulir TA 2020 sebesar Rp1.199.974.132,00 yang terdiri dari Piutang Lainnya – Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp146.237.000,00 dan Aset Lain – Lain berupa Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp1.053.737.132,00;
    d. Piutang BLUD TA 2020 sebesar Rp49.788.296.729,00 yang terdiri dari Piutang Lainnya – RSUD AM sebesar Rp46.123.242.887,00 dan RSJ sebesar Rp1.055.520.248,00, serta Aset Lain – Lain berupa Piutang RSUAM sebesar Rp2.505.425.845,00 serta RSJ sebesar Rp104.107.749,00
2. Mutasi kurang sebesar Rp113.159.471.232,24 berupa :
    a. Piutang Penjualan Angsuran TA 2019 sebesar Rp49.543.257.983,00;
    b. Piutang TP/TGR TA 2019 sebesar Rp946.966.321,32;
    c. Piutang Jasa Dana Bergulir TA 2019 sebesar Rp1.009.131.305,92
    d. Piutang BLUD TA 2019 sebesar Rp52.140.285.847,00 yang terdiri dari Piutang RSUD AM sebesar Rp48.516.799.005,00 dan Piutang RSJ sebesar Rp3.623.486.842,00
    e. Piutang kareana adanya kontrak batal teropong bintang sebesar Rp1.578.686.353,00
    f. Kas Tekor Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek sebesar Rp7.941.143.422,00

b. **Pendapatan Transfer – LO**

Jumlah Pendapatan Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.515.226.885.350,00 dan Rp2.693.782.750.027,00. Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp178.555.864.677,00 atau 6,63%.

Perbedaan nilai Pendapatan Transfer – LO dengan nilai Lain - Lain Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp6.906.577.393,00 berupa mutasi tambah dari piutang transfer tambah salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp27.811.897.925,00 dan mutasi kurang piutang DBH Rp20.905.320.532,00.

c. **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.806.956.738.507,09 dan Rp1.757.883.639.878,43. Pendapatan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp49.073.098.628,66 atau 2,79%.

Pendapatan Lain - lain Pendapatan yang Sah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.806.956.738.507,09 tidak sama dengan Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan yang Sah – LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.668.698.257.693,00.

Perbedaan nilai Lain - lain Pendapatan yang Sah-LO dengan nilai Lain - lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp37.500.000,00 yaitu mutasi kurang Piutang SP3D Dinas Kehutanan dan mutasi tambah sebesar Rp138.220.980.814,09 yang merupakan Pendapatan Hibah Aset Tetap, Bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang langsung diterima oleh sekolah serta bantuan covid-19 berupa persediaan dan asset tetap.

2. **BEBAN - LO**

a. **Beban Operasi**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6.799.237.485.891,25	**6.558.222.488.473,53**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nilai Beban Operasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp6.799.237.485.891,25 dan Rp6.558.222.488.473,53 yang terdiri dari:

Tabel 5.230 Beban Operasi per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Pegawai	1.965.546.675.330,00	1.946.852.144.428,00
2	Beban Persediaan	594.015.443.862,05	527.875.705.272,95
3	Beban Jasa	351.493.179.383,69	372.489.028.785,34
4	Beban Pemeliharaan	122.276.768.127,99	39.895.510.026,46
5	Beban Perjalanan Dinas	133.425.637.700,00	185.605.933.979,00
6	Beban Bunga	29.844.950.845,00	36.226.247.436,00
7	Beban Subsidi		926.015.480,00
8	Beban Hibah	1.686.698.047.514,26	1.612.250.207.677,00
9	Beban Bantuan Sosial	68.535.810.830,00	47.645.359.336,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	585.913.867.716,92	535.293.197.802,53
11	Beban Penyisihan	643.280.392,65	3.218.920.082,60
12	Beban Transfer	1.156.316.438.148,00	1.211.357.492.210,00
13	Beban Lain-lain	102.527.386.040,70	38.586.725.957,65
Jumlah		**6.799.237.485.891,26**	**6.558.222.488.473,53**

Rincian masing-masing beban operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Beban Pegawai**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.965.546.675.330,00	**1.946.852.144.428,00**

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.965.546.675.330,00 dan Rp1.946.852.144.428,00. Beban Pegawai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp18.694.530.902,00 atau 0,96%. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.231 Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Pegawai (Tidak Langsung)	1.726.295.320.621,00	1.780.768.401.096,00
2	Beban Pegawai (Langsung)	239.251.354.709,00	166.083.743.332,00
Jumlah		**1.965.546.675.330,00**	**1.946.852.144.428,00**

Perbedaan Beban Pegawai Tahun 2020 dengan nilai Belanja Pegawai sebesar Rp5.765.689.904,00 yaitu berasal dari mutasi tambah berupa Hutang Tunjangan Profesi Guru TA 2020 sebesar Rp12.946.322.800,00 pada Dinas Pendidikan, Hutang Jasa Medis pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung TA 2020 sebesar Rp3.502.116,00 dan Hutang Jasa Pelayanan RSJ sebesar Rp463.851.200,00 kemudian mutasi kurang yang berasal dari Pelunasan Hutang TPG Dinas Pendidikan sebesar Rp17.729.971.320,00 dan pembayaran hutang jaspel RSJ sebesar Rp1.449.394.700,00

2) **Beban Persediaan**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
596.015.443.862,05	**527.875.705.272,95**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp596.015.443.862,05 dan Rp527.875.705.272,95. Beban Persediaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp68.139.738.589,10 atau 12,91%. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.232 Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	68.401.006.266,47	40.143.427.282,17
2	Beban Bahan/Material	20.138.768.302,91	13.907.083.724,97
3	Beban Cetak dan Penggandaan	51.048.740.777,43	33.319.239.301,00
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	261.555.453.481,24	253.767.538.385,81

5	Beban Barang dan Jasa BOS	188.236.578.749,00	186.738.416.579,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal 2019	6.634.896.285,00	
Jumlah		**596.015.443.862,05**	**527.875.705.272,95**

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp596.015.443.862,05 tidak sama dengan nilai Belanja Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp585.150.385.002,02. Perbedaan nilai Beban Persediaan dengan nilai Belanja Persediaan sebesar Rp10.865.058.860,03 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp136.855.847.700,22 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp125.990.788.840,19, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.233 Penambahan dan pengurangan dari penyesuaian Beban Persediaan per 31 Desember 2020

Beban Persediaan			
Tambah (Rp)		**Kurang (Rp)**	
Persediaan ATK 2019	5.007.384.865,41	Persediaan ATK 2020	5.800.452.257,93
aset Beras 2019	762.669.020,50	Persediaan Beras 2020	939.469.070,50
Persediaan Obat 2019	23.236.785.686,98	Persediaan Obat 2020	17.630.774.629,76
Persediaan Bahan Bangunan 2019	9.711.250,00	Persediaan Alkes 2020	19.655.984.126,44
Persediaan Alkes 2019	14.466.589.491,79	Persediaan Bahan Makanan 2020	1.258.783.080,64
Persediaan bahan Makanan 2019	1.326.812.250,73	Persediaan Bahan Bangunan 2020	1.860.241.921,00
Utang RSAM dan RSJ	52.854.357.886,81	Koreksi Saldo utang Obat BHP (RSAM)	25.764.626.037,92
Utang Jasa Pihak Ketiga RSAM	8.397.908.558,00	Utang Jasa pihak Ketiga (RSAM) 2019	16.680.541.947,00
Reklas BM 2019	6.634.896.285,00	Utang RSAM dan RSJ	36.399.915.769,00
Persediaan Covid 19	21.482.113.500,00		
Bantuan Pendidikan	2.676.618.905		
Jumlah	**136.855.847.700,22**	**Jumlah**	**125.990.788.840,19**

3) **Beban Jasa**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
351.493.179.383,69	**372.489.028.785,34**

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp351.493.179.383,69 dan Rp372.489.028.785,34. Beban Jasa tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.995.849.401,65 atau 5,64%. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.234 Beban Jasa per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019
1	Beban Jasa Kantor	78.612.220.038,52	59.433.924.140,67
2	Beban Makanan dan Minuman	75.605.049.974,00	54.924.442.341,00
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.444.614.000,00	2.360.325.700,00
4	Beban Pakaian Kerja	344.917.500,00	1.748.924.400,00
5	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.352.534.350,00	6.009.750.940,00
6	Beban Premi Asuransi	70.069.204.610,50	47.823.748.769,33

7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.934.812.866,67	32.035.267.433,33
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.053.333.400,00	2.207.775.000,00
9	Beban Sewa Alat Berat		
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.264.737.490,00	5.480.128.000,00
11	Beban Jasa Keamanan	2.148.605.000,00	1.735.479.800,00
12	Beban Restitusi Pajak	53.788.615,00	59.469.065,00
13	Beban Jasa Pihak Ketiga	44.935.905.653,00	128.985.504.024,00
14	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	33.369.332.416,00	23.457.874.072,00
15	Belanja Jasa Konsultansi	14.304.123.470,00	6.226.415.100,00
	Jumlah Beban Jasa	**351.493.179.383,69**	**372.489.028.785,34**

Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp351.493.179.383,69 tidak sama dengan Jumlah Belanja Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp352.380.454.921,52. Perbedaan Nilai Beban Jasa dengan nilai Belanja Jasa sebesar Rp887.275.537,83 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp2.068.419.890,00 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp2.955.695.427,83.

Tabel 5.235 Penambahan dan Pengurangan Dari Penyesuaian Beban Jasa

Beban Jasa			
Tambah		**Kurang**	
Beban Listrik des 2020	1.632.579.767,00	Beban Listrik. Air. Telepon dan Internet des 2019	2.256.953.182,00
Beban Air Des 2020	39.388.842,00	Utang Sewa Kendaraan Dinas	467.500.000,00
Beban Telepon 2020	72.498.580,00		
Beban Internet 2020	96.494.646,00		
Beban di bayar muka 2019	227.458.055,00	Beban di bayar muka 2020	231.242.245,83
Jumlah	**2.068.419.890,00**	**Jumlah**	**2.955.695.427,83**

4) **Beban Pemeliharaan**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	**Per 31 Desember 2019 (Rp)**
122.276.768.127,99	**39.895.510.026,46**

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp122.276.768.127,99 dan Rp39.895.510.026,46. Beban Pemeliharaan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp82.381.258.101,53 atau 206,49%. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.236 Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	19.392.357.384,00	20.248.034.056,00
2	Beban Pemeliharaan	102.884.410.743,99	19.647.475.970,46
	Jumlah	**122.276.768.127,99**	**39.895.510.026,46**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp122.276.768.127,99 tidak sama dengan Jumlah Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020

sebesar Rp146.610.706.120,00. Perbedaan Nilai Beban Pemeliharaan dengan nilai Belanja Pemeliharaan sebesar Rp24.333.937.992,01 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp9.050.597.363,98 yang merupakan retensi barang dan jasa tahun 2020 dan Rp33.384.535.355,99 yang merupakan retensi barang dan jasa tahun 2019, beban pemeliharaan alkes RSJ, kapitalisasi asset tetap.

5) **Beban Perjalanan Dinas**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
133.425.637.700,00	**185.605.933.979,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp133.425.637.700,00 dan Rp185.605.933.979,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp52.180.296.279,00 atau 28,11%. Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas TA 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp133.425.637.700,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 5.237 Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas	112.101.289.419,00	160.954.377.852,00
2	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	477.450.000,00	483.700.000,00
3	Beban kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.247.123.735,00	9.529.593.307,00
4	Beban Akomodasi. Transportasi dan Uang Saku Peserta	16.599.774.546,00	14.638.262.820,00
Jumlah		**133.425.637.700,00**	**185.605.933.979,00**

6) **Beban Bunga**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
29.844.950.845,00	**36.226.247.436,00**

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp29.844.950.845,00 dan Rp36.226.247.436,00. Rincian Beban Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.238 Beban Bunga per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Bunga	29.844.950.845,00	36.226.247.436,00
Jumlah		**29.844.950.845,00**	**36.226.247.436,00**

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.844.950.845,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Bunga Per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.583.615.813,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.738.664.968,00 yang berasal dari selisih tambah sebesar Rp4.781.328.590,00 yang merupakan utang

bunga per 31 desember 2020 dan selisih kurang sebesar Rp6.519.993.558,00 yang merupakan utang bunga per 31 Desember 2019.

7) **Beban Subsidi**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
0,00	**926.015.480,00**

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp926.015.480,00. Rincian Beban Subsidi sebagai berikut:

Tabel 5.239 Beban Subsidi per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Subsidi	0,00	926.015.480,00
Jumlah		**0,00**	**926.015.480,00**

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2020 tidak ada perbedaan dengan Belanja Subsidi – LRA Per 31 Desember 2020.

8) **Beban Hibah**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.686.698.047.514,26	**1.612.250.207.677,00**

Jumlah Beban Hibah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.686.698.047.514,26 dan Rp1.612.250.207.677,00. Beban Hibah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp74.447.839.837,26 atau 4,62%. Rincian Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.240 Beban Hibah per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Hibah Uang	1.437.518.594.295,00	1.397.472.390.552,00
2	Beban Hibah Aset Tetap	4.707.677.720,00	3.838.720.381,00
3	Beban Hibah Barang & Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	244.471.775.499,26	210.939.096.744,00
Jumlah		**1.686.698.047.514,26**	**1.612.250.207.677,00**

Jumlah Beban Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.686.698.047.514,26 tidak sama dengan Jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.616.117.182.565,26. Terdapat selisih sebesar Rp70.580.864.949,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.241 Mutasi Tambah Kurang Beban Hibah per 31 Desember 2020

Beban Hibah			
Tambah (Rp)		**Kurang (Rp)**	
Hibah Persediaan Barang yang Diserahkan 2019	76.261.065.361,00	Hibah Persediaan Barang yang Diserahkan 2020	40.935.474.831,00
HIbah Dari Belanja Modal	28.101.823.072,00		
Hibah Aset Tetap	7.153.451.347,00		
Jumlah	**111.516.339.780,00**	**Jumlah**	**40.935.474.831,00**

9) **Beban Bantuan Sosial**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
68.535.810.830,00	**47.645.359.336,00**

Jumlah Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp68.535.810.830,00 dan Rp47.645.359.336,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp20.890.451.494,00 atau 43,85%. Rincian Beban Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.242 Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang	48.885.285.164,00	36.978.146.426,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang dan Jasa	19.650.525.666,00	10.667.212.910,00
Jumlah		**68.535.810.830,00**	**47.645.359.336,00**

Jumlah Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.535.810.830,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.528.495.166,00. Terdapat selisih sebesar Rp41.007.315.664,00 yang merupakan pemotongan pajak rokok untuk BPJS.

10) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
585.913.867.716,92	**535.293.197.802,53**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp585.913.867.716,92 dan Rp535.293.197.802,53. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 50.620.669.914,39 atau 9,46 %. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.243 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.202.702.468,80	4.507.812.060,47
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	582.711.165.248,12	530.785.385.742,06
Jumlah		**585.913.867.716,92**	**535.293.197.802,53**

Adapun rincian per masing-masing beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.202.702.468,80 yang terdiri dari:

Tabel 5.244 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020

No.	OPD	Beban Amortisasi 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.399.158.685,80
2	DINAS KESEHATAN	267.726.653,33
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK	2.831.316,67
4	RUMAH SAKIT JIWA	37.290.800,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	13.717.000,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	111.611.303,33
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.000.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	54.006.750,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	82.161.016,67
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	68.479.400,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.658.450,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.260.000,00
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	830.833,33
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.631.666,67
15	DINAS KEHUTANAN	2.000.000,00
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23.556.683,33
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	278.539.234,67
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	308.138.233,33
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	265.482.250,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.983.333,33
21	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	38.682.708,33
22	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	127.946.250,00
23	BIRO ORGANISASI	14.932.500,00
24	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	11.982.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	61.095.400,00
Jumlah		**3.202.702.468,80**

(b) Beban Penyusutan Aset Tetap

Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp582.711.165.248,12 yang terdiri dari:

Tabel 5.245 Rincian Penyusutan Semester I dan Semester II TA 2020

Aset Tetap	Beban Penyusutan 2020		Total (Rp)
	Semester I (Rp)	Semester II (Rp)	
Peralatan dan Mesin	98.807.820.308,00	109.035.559.682,00	207.843.379.990,00
Gedung dan Bangunan	29.077.219.000,00	30.043.178.203,00	59.120.397.203,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.728.757.909,7530	157.505.776.986,00	315.234.534.895,7530
Aset Tetap Lainnya	143.651.370,96	369.201.788,41	512.853.159,37
Jumlah	**285.757.448.588,7130**	**296.953.716.659,41**	**582.711.165.248,1230**

11) **Beban Penyisihan Piutang**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
643.280.392,65	**3.218.920.082,60**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp643.280.392,65 yang terdiri dari:

Tabel 5.246 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2020

No	OPD	Penyisihan Piutang 2020	Penyisihan Piutang 2019	Penyesuaian penyisihan piutang	Beban Penyisihan Piutang
1	RSAM	2.404.368.788,78	4.658.519.616,87	(2.483.654.480,47)	229.503.652,38
2	RSJ	16.078.743,14	18.303.525,65	(17.782.986,91)	15.558.204,40
3	Dinas Koperasi	498.088.507,00	189.832.929,00		308.255.578,00
4	Dinas Pertanian	474.074.500,00	474.074.500,00		0,00
5	Dinas Kelautan		70.375,00	(70.375,00)	0,00
6	PPKD	1.089.246.577,67	1.001.888.977,06		87.357.600,61
7	BPKAD	4.876.404.143,95	7.533.227.995,66	(2.656.823.851,71)	0,00
8	Dinas Pendapatan	20.008.411,40	17.423.954,14		2.584.457,26
9	Dinas Kehutanan	20.900,00	187.500,00	(187.500,00)	20.900,00
JUMLAH		9.378.290.571,94	13.893.529.373,38	(5.158.519.194,08)	643.280.392,64

12) **Beban Transfer**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.156.316.438.148,00	1.211.357.492.210,00

Jumlah Beban Transfer per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.156.316.438.148,00 dan Rp1.211.357.492.210,00. Beban Transfer tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp55.041.054.062,00 atau 4,54%. Rincian Beban Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.247 Beban Transfer per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.156.316.438.148,00	1.195.461.219.410,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik		15.896.272.800,00
Jumlah		**1.156.316.438.148,00**	**1.211.357.492.210,00**

Beban Transfer per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.156.316.438.148,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Transfer – LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.231.408.694.144,94. Jumlah perbedaan nilai Beban Transfer dengan nilai Belanja Transfer – LRA sebesar Rp75.092.255.996,94 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp1.156.316.438.148,00 yang berasal dari SK Penetapan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2020 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp1.231.408.694.144,94 yang merupakan realisasi belanja dana bagi hasil kepada kabupaten/kota tahun 2020.

13) **Beban Lain-lain**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
102.527.386.040,70	**10.651.235.375,52**

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp102.527.386.040,70 dan Rp10.651.235.375,52. Beban Lain-lain tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp91.876.150.664,48 atau 862,59%. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5.248 Beban Lain-lain per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1	Beban Belanja Tak Terduga	68.674.939.273,71	0,00
2	Beban Penurunan nilai Dana Bergulir	486.704.573,99	5.240.350.830,00
3	Beban Ekstrakomtabel	4.064.475.852,00	5.736.997.147,56
4	Beban BM tidak jadi Aset	17.560.383.088,00	25.790.575.900,09
5	Beban Penghapusan Aset Tetap	1.491.479.434,00	1.818.802.080,00
6	Beban Penghapusan Aset Lainnya	10.249.403.819,00	0,00
7	Beban Luar Biasa		0,00
Jumlah		**102.527.386.040,70**	**38.586.725.957,65**

3. **SURPLUS/(DEFISIT) – LO**

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
391.107.586.060,31	**913.932.768.128,85**

Jumlah Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp391.107.586.060,31 dan Rp913.932.768.128,85. Surplus/Defisit – LO Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp522.862.682.068,54 atau 57,21%

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2020 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Ekuitas Awal	8.614.266.390.720,46	7.616.165.266.250,23
Surplus/Defisit-LO	391.107.586.060,31	974.782.506.651,90
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1.396.097.090.911,00	39.627.811.691,00
Lain-lain	(42.861.727.604,21)	(16.309.193.872,67)
Ekuitas Akhir	**10.358.609.340.087,60**	**8.614.266.390.720,46**

Tabel 5.249 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal per 1 Januari 2020 Rp8.614.266.390.720,46 dengan penambahan adanya Surplus – LO sebesar Rp391.107.586.060,31. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp1.396.097.090.911,00 kemudian adanya koreksi lain-lain sebesar Rp42.861.727.604,21 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.250 Rincian Penambahan dan Pengurangan Selisih Revaluasi Aset Tetap Laporan Perubahan Ekuitas TA 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bertambah akibat lain-lain	633.091.000,00
2	Temuan baru	10,00
3	Appraisal	1.395.463.999.901,00
	Jumlah	**1.396.097.090.911,00**

Tabel 5.251 Rincian Penambahan dan Pengurangan Koreksi Lain-lain Laporan Perubahan Ekuitas TA 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyesuaian Amortisasi ATB 2019	1.413.420.225,00
2	Koreksi Pembulatan DBH	(0,02)
3	Koreksi Saldo utang RSAM Tahun Lalu	(25.764.626.037,92)
4	Penyesuaian Piutang Awal RSJ	(37.218.288,00)
5	Penyesuaian Piutang Awal RSAM	2.475.833.565,00
6	Penyesuaian Piutang Awal Penjualan Angsuran	(3.424.861.737,00)
7	Penyesuaian Penyisihan Piutang RSAM	2.483.654.480,47
8	Penyesuaian Penyisihan Piutang RSJ	17.782.986,91
9	Penyesuaian Penyisihan Piutang Aset	2.656.823.851,71
10	Penyesuaian Penyisihan Piutang Kelautan	70.375,00
11	Penyesuaian Penyisihan Piutang Kehutanan	187.500,00
12	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Te	(24.905.668.002,68)
13	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	2.281.830.718,00
14	Penyesuaian Piutang Awal Koperasi	188.354.376,92
15	Koreksi kurang catat piutang NAPZA Tahun 2019 pada RSJ	3.903.607,00
16	Koreksi Utang Obat Tahun 2020 pada RSAM	(43.950.339,19)
17	Koreksi atas Utang PPh 21 kurang bayar) Jasa Pelayanan JKN bulan Maret 2019 pada RSAM	(191.567.128,62)
18	Koreksi atas utang PPh kurang bayar Jasa Pelayanan Februari s.d. Mei 2019 pada RSAM	(146.210.159,22)
19	Koreksi atas pengakuan piutang TGR atas pertanggungjawaban yang belum di BKU-kan tahun 2019 pada RSAM	(222.512.411,00)
20	(Koreksi Kurang atas akumulasi penyusutan akibat kesalahan perhitungan penyusutan KIB B pada OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	6.045.143,00
21	(Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan akibat kesalahan peritungan penyusutan KIB C pada OPD Dinas Pemuda dan Olahrag, RSUAM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bapenda dan Kehutanan)	(422.204.387,56)
22	(Koreksi akumulasi penyusutan akibat Koreksi Kapitalisasi Gedung pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PSDA, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Penghubung)	764.798.058,00
23	(Koreksi kurang atas mutasi aset ke persediaan pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.386.000,00)-Reff 002JR	4.386.000,00
	Jumlah	**(42.861.727.604,21)**

1. Penyesuaian Amostisasi Aset Tak Berwujud 2019 karena adanya koreksi perhitungan sebesar Rp1.413.420.225,00;
2. Koreksi Pembulatan Dana Bagi Hasil karena selisih pencatatan Rp0,02;
3. Koreksi Saldo Hutang RSAM Tahun lalu setelah Audit KAP Rp25.764.626.037,92;
4. Penyesuaian Awal RSJ sebesar Rp37.218.288,00 merupakan hasil akhir verifikasi dengan pihak penjamin;

5. Penyesuaian Piutang RSAM sebesar Rp2.475.833.565,00 dikarenakan koreksi Kelebihan Piutang Pasien Umum karena kesalahan aritmatik, Kelebihan saldo Piutang BPJS Kesehatan karena klaim belum terverifikasi BPJS, Koreksi saldo piutang jamkeskot Bandar Lampung, Penambahan Piutang Pasien dalam Perawatan, karena perubahan kebijakan serta koreksi Piutang Pasien dalam Perawatan karena Perbedaan di SIM RS;
6. Penyesuaian pencatatan Piutang Penjualan angsuran sebesar Rp3.424.861.737,00 karena adanya penghapusan dan koresi pencatatan lain;
7. Penyesuaian Penyisihan Piutang RSAM Rp2.483.654.480,47 akibat adanya perubahan kebijakan tentang penyisihan piutang hanya untuk piutang pasien umum, untuk piutang institusi tidak disisihkan;
8. Penyesuaian Penyisihan Piutang RSJ Rp17.782.986,91 akibat adanya koreksi Piutang;
9. Penyesuaian Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Rp 2.656.823.851,71
10. Penyisihan Piutang Dinas Kelautan sebesar Rp70.375,00 karena adanya pembayaran.
11. Penyisihan Piutang Dinas Kehutanan sebesar Rp187.500,00 karena adanya pembayaran.
12. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain akibat mutasi tambah kurang Rp2.281.830.718,00;
13. Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.905.668.002,68.
14. Penyesuaian Piutang Awal Koperasi sebesar Rp188.354.376,92.
15. Koreksi Kurang Catat Piutang NAPZA Tahun 2019 pada RSJ sebesar Rp3.903.607,00
16. Koreksi Utang Obat Tahun 2020 pada RSAM sebesar Rp43.950.339,19
17. Koreksi atas Utang PPH 21 kurang bayar Jasa Pelayanan JKN bulan Maret 2019 pada RSAM sebesar Rp191.567.128,62
18. Koreksi atas Utang PPh kurang bayar Jasa Pelayanan Februari s.d Mei 2019 pada RSAM sebesar Rp146.210.159,22
19. Koreksi atas pengakuan piutang TGR atas pertanggungjawaban yang belum di BKU-kan tahun 2019 pada RSAM sebesar Rp222.512.411,00
20. Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan akibat kesalahan perhitungan penyusutan KIB B pada OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.045.143,00
21. Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan akibat kesalahan perhitungan penyusutan KIB C pada OPD Dinas Pemuda dan Olahraga, RSAM, Dinas

Pendidikan, Dinas Sosial, Bapenda dan Dinas Kehutanan sebesar Rp422.204.387,56

22. Koreksi akumulasi penyusutan akibat koreksi Kapitalisasi Gedung pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PSDA, Dinas Ketahahan Pangan dan Badan Penghubung sebesar Rp764.798.058,00
23. Koreksi kurang atas mutasi aset ke persediaan pada OPD Dinas Pendidikan sebesar Rp4.386.000,00

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

Saldo akhir Kas Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020 adalah sebesar Rp.182.975.9935.717,04 yang terdiri atas Saldo akhir kas di BUD/Kas daerah sebesar Rp119.824.886.780,03 saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp268.460,11 saldo akhir kas di bendahara BOS sebesar Rp790.828.430,07 saldo Kas di BLUD sebesar Rp59.957.946.534,08, saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.903.800.000,00 dan saldo Kas Lainnya sebesar Rp498.205.512,75. Jumlah Kas tidak sama dengan perhitungan saldo akhir kas karena adanya kas tekor akibat penggunaan kas BLUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek sebesar Rp7.941.143.422,00

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2020. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. **Arus Masuk Kas**

Rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.252 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	2.386.345.268.304,00	2.627.888.230.394,00
Penerimaan Retribusi Daerah	17.080.208.104,00	11.069.477.866,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.873.630.623,14	27.837.905.348,92
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	399.280.230.041,22	342.669.440.871,96
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	123.204.760.040,00	87.416.096.820,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.589.203.086,00	51.128.238.596,00
Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.732.551.921.000,00	1.906.780.297.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus	571.540.325.831,00	581.870.716.694,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Pendapatan Dana Penyesuaian	46.434.098.000,00	26.756.363.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
Penerimaan Hibah	8.946.876.858,00	11.362.590.000,00
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan Bantuan Keuangan	-	17.746.958.783,00
Penerimaan Lainnya	1.659.765.807.998,00	1.565.864.886.775,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**7.009.612.329.885,36**	**7.258.391.202.148,88**

b. **Arus Kas Keluar**

Rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.253 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Pembayaran Pegawai	1.971.312.365.234,00	1.927.672.778.408,00
Pembayaran Barang	1.423.341.867.179,80	1.277.194.649.465,29
Pembayaran Bunga	31.583.615.813,00	33.382.304.468,00
Pembayaran Subsidi	-	926.015.480,00
Pembayaran Hibah	1.437.518.594.295,00	1.329.394.600.511,00
Pembayaran Bantuan Sosial	352.400.000,00	1.030.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	119.312.701.296,00	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.231.408.694.144,94	1.459.179.743.870,73
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Belanja Bantuan Keuangan	-	15.896.272.800,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-

c. **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.254 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	7.009.612.329.885,36	7.258.391.202.148,88
Arus Keluar Kas	6.214.830.237.962,74	6.044.676.365.003,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**794.782.091.922,62**	**1.213.714.837.145,86**

2. **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN**

Arus Kas dari aktivitas Investasi/Investasi aset non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

a. **Arus Masuk Kas**

Arus kas dari aktivitas investasi/Investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Provinsi Lampung TA 2020 sebesar Rp9.707.141.998,00 yang merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. **Arus Keluar Kas**

Tabel 5.255 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi aset Non Keuangan Provinsi Lampung Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	8.785.013.950,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	254.349.003.701,00	166.619.328.650,44
Perolehan Gedung dan Bangunan	182.406.597.671,89	302.998.946.941,95
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	280.131.995.852,00	499.805.986.099,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	26.855.599.045,00	44.613.262.330,00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	56.000.000.000,00	15.550.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Pengeluaran Investasi Lainnya	-	2.398.994.250,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**808.528.210.219,89**	**1.031.986.518.271,39**

c. **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.

Tabel 5.256 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	9.707.141.998,00	8.602.236.679,00
Arus Keluar Kas	808.528.210.219,89	1.031.986.518.271,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Keuangan	**(798.821.068.221,89)**	**(1.023.384.281.592,39)**

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN

Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Realisasi penyertaan modal pemerintah daerah TA 2020 masuk di aliran arus keluar kas pada arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan. Pada Arus Kas Masuk dari aktivitas Pembiayaan Provinsi Lampung tahun 2020 tidak ada realisasi. Arus Kas Keluar dari aktivitas Pembiayaan Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar Rp141.176.332.704,00 merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan sebesar Rp141.176.332.704,00.

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan

kiriman uang keluar. Penerimaan dari aktivitas non anggaran ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari fihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau utang yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Selama TA 2020 arus masuk kas dan keluar dari aktivitas non anggaran Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.257 Penerimaan Kas dari Fihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk Penerimaan PFK	252.511.365.446,48	285.646.102.882,30
Arus Kas Keluar Pengeluaran PFK	252.511.365.446,48	285.646.102.882,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	-	-

5. KENAIKAN/ PENURUNAN KAS

Merupakan jumlah seluruh arus kas bersih Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2020, yang terdiri dari

Tabel 5.258 Kenaikan/Penurunan Kas
Pemerintah Provinsi Lampung Selama TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	794.782.091.922,62	1.213.714.837.145,86
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(798.821.068.221,89)	(1.023.384.281.592,39)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan	(141.176.332.704,00)	49.527.304.148,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitori/Non Anggaran	-	-
Kenaikkan (Penurunan Kas)	**(145.215.309.003,27)**	**239.857.859.701,47**

6. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 sebesar Rp190.917.079.139,04 yang terdiri atas kas di BUD/Kas daerah sebesar Rp119.824.886.780,03, saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp268.460,11, saldo akhir Kas di bendahara BOS sebesar Rp790.828.430,07, saldo Kas di BLUD sebesar Rp59.957.946.534,08, saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp1.903.800.000,00 dan saldo kas Lainnya sebesar Rp386.878.349,75. Terdapat selisih antara Saldo Akhir kas Arus Kas dan Neraca sebesar Rp7.941.143.422,00 yang merupakan kas tekor akibat penggunaan kas BLUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Tabel 5.259 Saldo Akhir Kas

Uraian	Realisasi 2020
Kenaikan (Penurunan Kas)	(145.215.309.003,27)
Saldo Awal Kas	336.132.388.142,31
Saldo Akhir Kas Arus Kas 2020	**190.917.079.139,04**
Saldo Akhir Kas di Neraca 2020	**182.975.935.717,04**
Selisih	**7.941.143.422,00**